

# **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK BASED BANK RATING (RBBR)***

**(STUDI PADA BANK MILIK PEMERINTAH PUSAT YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ALIZATUL FADHILA  
NIM. 115030200111050**



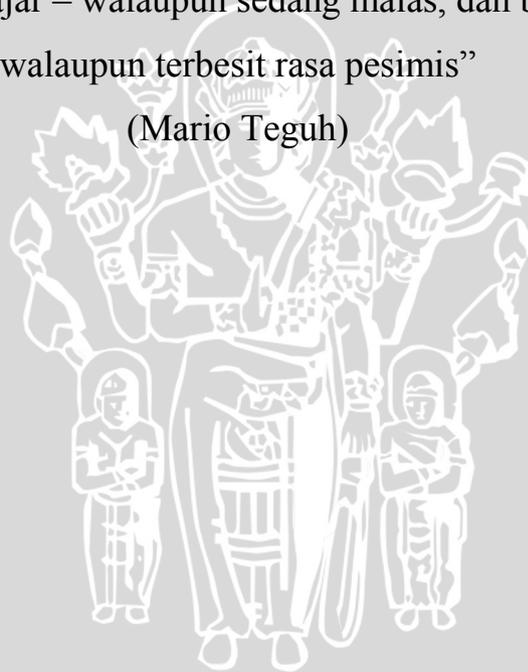
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN  
MALANG  
2015**

## MOTTO

“Jika gagal Bangkitlah  
Jika gagal Semangatlal  
Jika gagal Bertindaklah  
karena kegagalan merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan”

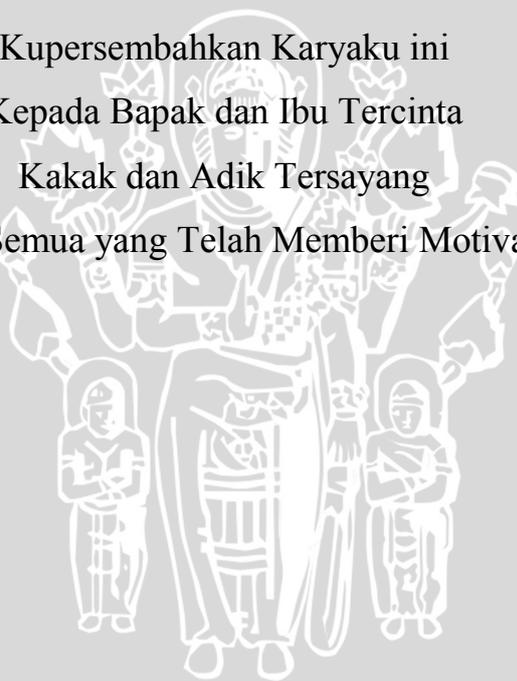
“yang akan sukses besar di masa depan adalah orang yang tetap memaksa diri belajar – walaupun sedang malas, dan bekerja keras – walaupun terbesit rasa pesimis”

(Mario Teguh)



## Halaman Persembahan

Kupersembahkan Karyaku ini  
Kepada Bapak dan Ibu Tercinta  
Kakak dan Adik Tersayang  
Serta Semua yang Telah Memberi Motivasi



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) (Studi Pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di BEI Tahun 2011–2013)

Disusun oleh : Alizatul Fadhila

NIM : 115030200111050

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

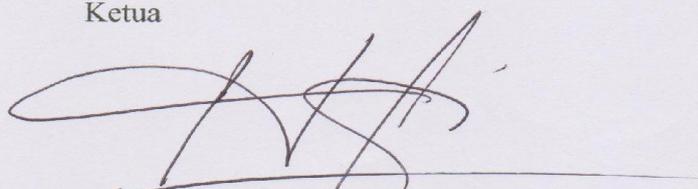
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, 19 Januari 2015

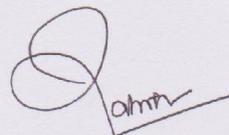
### Komisi Pembimbing

Ketua



**Drs. Muhammad Saifi, Msi**  
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



**Dra. Zahroh Z.A, Msi**  
NIP. 19591202 198403 2 001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Rabu
- Tanggal : 28 Januari 2015
- Pukul : 08.00 WIB
- Skripsi Atas Nama : Alizatul Fadhila
- Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) (Studi Pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

**Dr. Muhammad Saifi, M.Si**  
NIP. 19570712/198503 1 001

**Dra. Zahroh Z.A, M.Si**  
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota

Anggota

**Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si**  
NIP. 19550902 196202 2 001

**Dr. Zainul Arifin, M.S**  
NIP. 19570415 198601 1 001



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 15 Januari 2015



Nama : Alizatul Fadhila  
NIM : 115030200111050

## RINGKASAN

Alizatul Fadhila, 2015, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) (Studi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2013), Muhammad Saifi Drs, M.si, Zahroh Z.A Dra, M.si, 170 hal + xiv.

Bank adalah lembaga keuangan yang peran utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan menyediakan jasa lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi kesehatan setiap bank diharuskan untuk tetap diawasi maka, Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Bank diwajibkan melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) yang terdiri dari empat faktor yakni, faktor profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*). Penelitian ini menggunakan empat faktor yang ada pada metode *Risk-based Bank Rating* (RBBR) untuk menilai tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat yakni, faktor profil risiko yang mengukur tiga risiko dengan data kuantitatif antara lain, risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL), risiko pasar dengan menggunakan rasio *Interest Rate Risk* (IRR) dan risiko likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) dianalisis melalui hasil *self assessment* bank, faktor rentabilitas dinilai dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan faktor permodalan dinilai dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Penelitian terhadap faktor profil risiko menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat memiliki rata-rata NPL di bawah 5% dan rata-rata IRR adalah 107,01%, sedangkan rasio LDR bank milik pemerintah pusat rata-rata berpredikat cukup baik dikarenakan terlalu tingginya dana dari pihak ketiga yang dialokasikan pada kredit yang diberikan bank. Hasil penilaian faktor GCG bank milik pemerintah pusat menunjukkan bahwa rata-rata bank mendapatkan predikat penerapan GCG sangat baik, dikarenakan bank mampu memenuhi sebelas aspek penilaian GCG. Hasil penilaian faktor *earning* dengan rasio ROA dan NIM menunjukkan secara keseluruhan, rata-rata rentabilitas bank milik pemerintah pusat sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan permodalan bank. Hasil penilaian faktor permodalan menunjukkan, secara keseluruhan CAR bank milik pemerintah pusat berpredikat sangat sehat yang berarti bank mampu memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum sebesar 8%. Kondisi faktor profil risiko bank milik pemerintah pusat sebaiknya dikelola lebih lanjut agar bank dapat terhindar dari tingginya jumlah kredit bermasalah dan likuiditas, sedangkan faktor GCG, rentabilitas dan permodalan diharapkan manajemen bank dapat terus mempertahankan agar kesehatan bank milik pemerintah pusat tetap terjaga.

Kata Kunci : tingkat kesehatan bank, metode *risk based bank rating* (RBBR)

## SUMMARY

Alizatul Fadhila, 2015, The Bank Soundness Level Analysis Using Risk Based Bank Rating Method (RBBR) (Studies in Central Government Owned Banks Listed in Indonesia Stock Exchange In 2011-2013), Muhammad Saifi Drs, M.si, Zahroh ZA Dra , M.si, 170 page + xiv

Bank is a financial institution whose primary role is raise funds from the public in the form of deposits and then channel the funds back to the community in the form of loans, and provide other services to improve people's lives. The health condition of each bank is required to remain supervised then, Bank Indonesia issued a regulation regarding the rating system set forth in Bank Indonesia Regulation No. 13/1 / PBI / 2011 on the assessment of the bank. Banks are required to assess the soundness level by using the approach of risk (Risk Based Bank Rating/RBBR). There are four factors to the rating RBBR method, factor risk profile, good corporate governance (GCG), earnings, and capital. This study uses four factors that exist in the RBBR method to assess the soundness of the central government-owned banks, factors that measure the risk profile of the three risk with quantitative data, among others, credit risk by using the ratio of Non Performing Loans (NPL ), market risk by using the ratio of Interest Rate risk (IRR) and liquidity risk by using the ratio of Loan to Deposit Ratio (LDR). Factors of Good Corporate Governance (GCG) were analyzed through the results of self-assessment of banks, earnings factor was assessed by using the ratio Return On Assets (ROA) and Net Interest Margin (NIM), while the capital factor was assessed using Capital Adequacy Ratio (CAR).

Research on the risk profile shows that bank owned by the central government overall has an average NPL under 5% and average IRR is 107,01 % , while the ratio LDR bank owned by the central government average predicated good enough because of too high of funds from third party allocated on loans given by banks. The results of the assessment of factors GCG bank owned by the central government show that average the banks get the predicate of the application of GCG very good, because of the bank unable to meet eleven GCG assessment aspects. The results of the assessment of a factor with the ratio of earning, ROA and NIM show overall the average of earning bank owned by the central government is very sufficient to support the growth of bank capital .The results of the assessment showed the capital, overall CAR bank owned by the central government predicated very healthy which means bank able to meet obligations capital by 8%. The condition of the bank risk profile belonging to the central government should be managed by further so that banks could avoid the high numbers of credit turmoil and liquidity, while GCG factors, capital and bank management is expected to continue to maintain that the soundness level bank owned by the central government of staying awake.

Keyword : the bank soundness level, risk based bank rating method (RBBR)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) (Studi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2013). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Iqbal S.Sos, M.IB, DBA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Ketua Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Zahroh Z.A, M.Si selaku Anggota Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa dan restunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsinya, serta kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
7. Sahabat-sahabat peneliti dan kawan seperjuangan, Fitria Dwi Susanti, Fahimah, Tiwik Alsabiyah, Chikita Puspa Nirmala, Bela Dwi Kuntari, dan Kiki Rindy Aini yang selalu hadir memberikan doa, semangat, tawa, senyum, dan motivasi dari awal perkuliahan sampai menempuh skripsi.
8. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2011 yang telah banyak membantu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

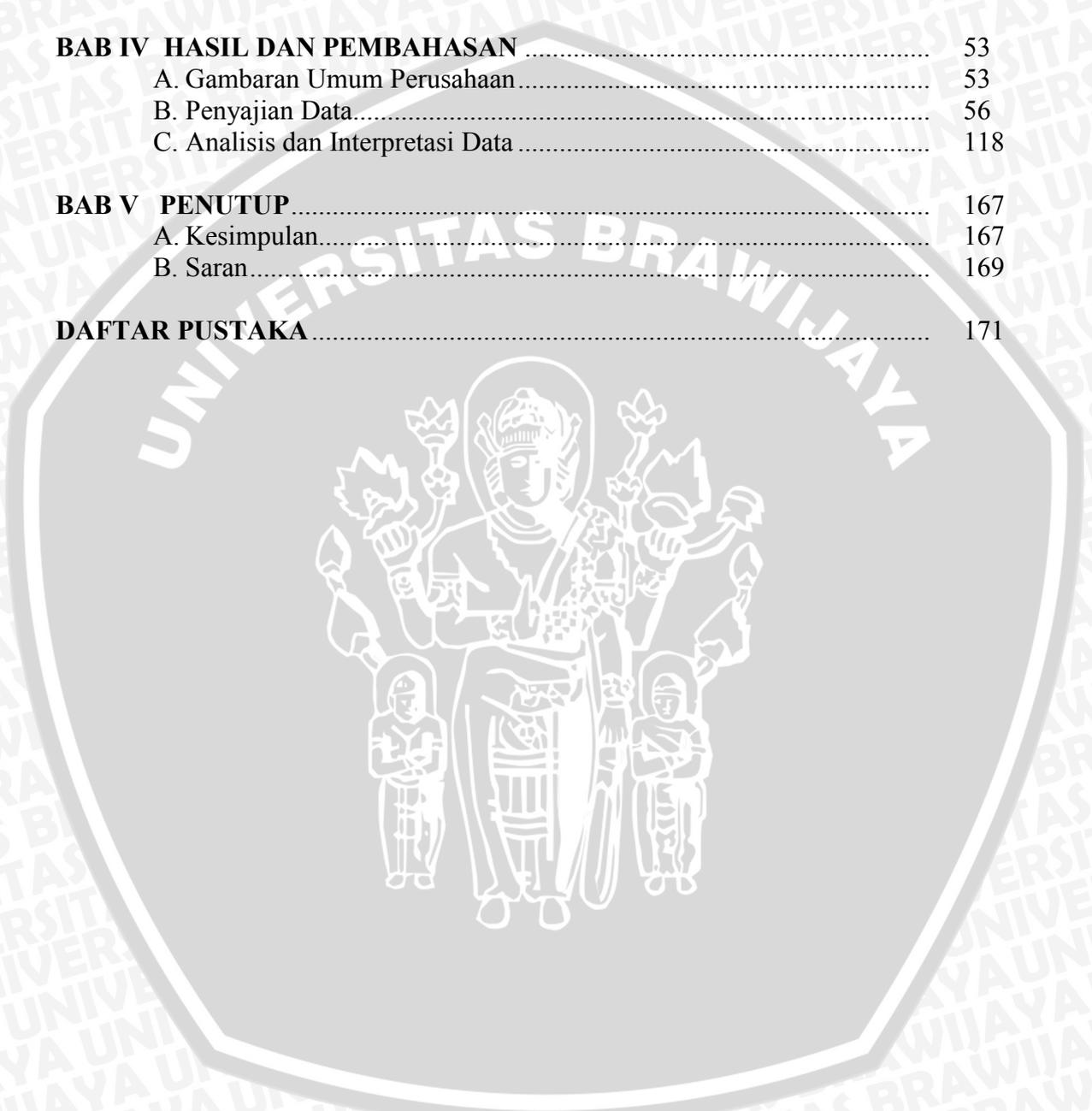
Malang, 19 Januari 2015

Peneliti

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pemikiran .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Bank .....	14
1. Pengertian Bank .....	14
2. Jenis Bank .....	16
3. Kegiatan Bank .....	17
4. Keuntungan Bank .....	20
5. Sumber Dana Bank .....	21
C. Laporan Keuangan .....	23
1. Pengertian Laporan Keuangan .....	23
2. Tujuan Laporan Keuangan .....	24
3. Pihak yang Berkepentingan .....	24
4. Jenis Laporan Keuangan Bank .....	25
D. Kesehatan Bank .....	28
E. Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> .....	29
1. Profil Risiko ( <i>Risk Profile</i> ) .....	30
2. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	36
3. Rentabilitas ( <i>Earning</i> ) .....	38
4. Permodalan ( <i>Capital</i> ) .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Fokus Penelitian .....	46

D. Populasi dan Sampel .....	47
E. Sumber Data .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	53
B. Penyajian Data .....	56
C. Analisis dan Interpretasi Data .....	118
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>167</b>
A. Kesimpulan .....	167
B. Saran .....	169
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>171</b>



## DAFTAR TABEL

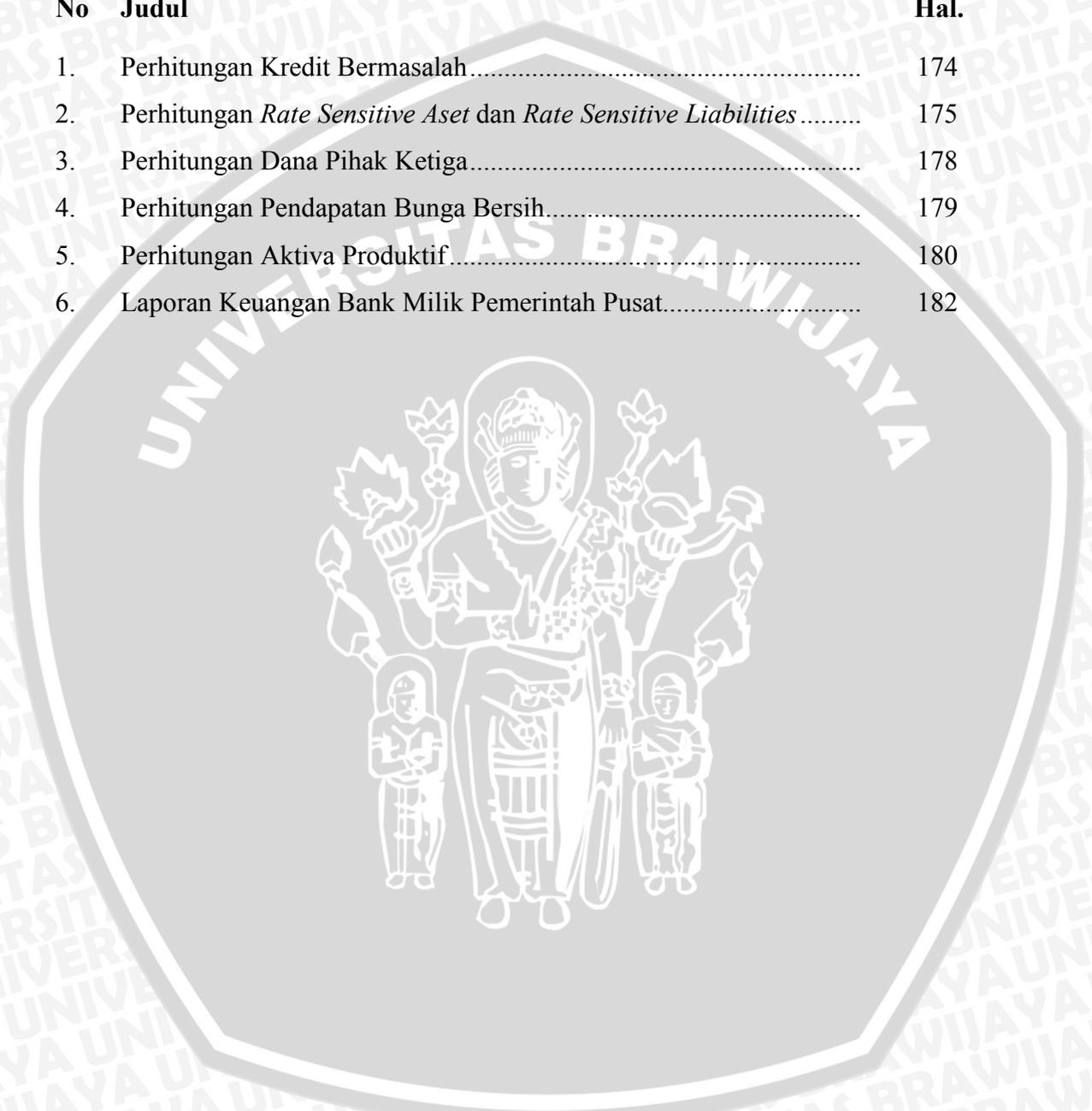
No	Judul	Hal.
1.	Perbedaan dan Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu.....	13
2.	Predikat <i>Non Performing Loan</i> Bank.....	33
3.	Predikat <i>Loan to Deposit Ratio</i> Bank.....	35
4.	Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA.....	39
5.	Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NIM.....	40
6.	Matriks Peringkat Faktor Rentabilitas.....	40
7.	Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan CAR.....	43
8.	Matriks Peringkat Faktor Permodalan.....	43
9.	Daftar Sampel Penelitian.....	48
10.	<i>Non Performing Loan</i> Bank Milik Pemerintah Pusat.....	57
11.	<i>Interest Rate Risk</i> Bank Milik Pemerintah Pusat.....	58
12.	<i>Loan to Deposit Ratio</i> Bank Milik Pemerintah Pusat.....	59
13.	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatauhan.....	70
14.	Penyediaan Dana Bank BRI Tahun 2011.....	73
15.	Penyediaan Dana Bank BRI Tahun 2013.....	74
16.	Penyediaan Dana Bank Mandiri Tahun 2011-2013.....	89
17.	Jumlah Temuan Audit Intern Bank BTN.....	98
18.	Penyediaan Dana Bank BTN Tahun 2011-2013.....	100
19.	<i>Return On Asset</i> Bank Milik Pemerintah Pusat.....	115
20.	<i>Net Interest Margin</i> Bank Milik Pemerintah Pusat.....	116
21.	<i>Capital Adequacy Ratio</i> Bank Milik Pemerintah Pusat.....	118
22.	Predikat Bank Berdasarkan Rasio NPL.....	160
23.	Predikat Bank Berdasarkan Rasio LDR.....	161
24.	Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA.....	162
25.	Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NIM.....	163
26.	Matriks Peringkat Rentabilitas Bank Milik Pemerintah Pusat.....	164
27.	Matriks Peringkat dan Predikat Kesehatan CAR Bank.....	165

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1.	Rasio Keuangan Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.....	6
2.	Bagan Struktur Perbankan Indonesia.....	17
3.	Kegiatan Utama Bank.....	19
4.	Prinsip-prinsip dasar GCG.....	38
5.	NPL Bank Milik Pemerintah Pusat.....	119
6.	IRR Bank Milik Pemerintah Pusat.....	121
7.	LDR Bank Milik Pemerintah Pusat.....	123
8.	<i>Return On Asset</i> Bank BRI Tahun 2011-2013.....	145
9.	<i>Return On Asset</i> Bank Mandiri Tahun 2011-2013.....	147
10.	<i>Return On Asset</i> Bank BTN Tahun 2011-2013.....	148
11.	<i>Return On Asset</i> Bank BNI Tahun 2011-2013.....	150
12.	<i>Net Interest Margin</i> Bank BRI Tahun 2011-2013.....	151
13.	<i>Net Interest Margin</i> Bank Mandiri Tahun 2011-2013.....	153
14.	<i>Net Interest Margin</i> Bank BTN Tahun 2011-2013.....	154
15.	<i>Net Interest Margin</i> Bank BNI Tahun 2011-2013.....	156
16.	<i>Capital Adequency Ratio</i> Bank BRI Tahun 2011-2013.....	157
17.	<i>Capital Adequency Ratio</i> Bank Mandiri Tahun 2011-2013.....	158
18.	<i>Capital Adequency Ratio</i> Bank BTN Tahun 2011-2013.....	159
19.	<i>Capital Adequency Ratio</i> Bank BNI Tahun 2011-2013.....	160

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1.	Perhitungan Kredit Bermasalah.....	174
2.	Perhitungan <i>Rate Sensitive Aset</i> dan <i>Rate Sensitive Liabilities</i> .....	175
3.	Perhitungan Dana Pihak Ketiga.....	178
4.	Perhitungan Pendapatan Bunga Bersih.....	179
5.	Perhitungan Aktiva Produktif.....	180
6.	Laporan Keuangan Bank Milik Pemerintah Pusat.....	182



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sektor perbankan berperan aktif dalam memberikan sumbangsinya terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Selama beberapa tahun terakhir ini perbankan telah mengalami perubahan. Bank menjadi lebih fleksibel dalam layanan yang diberikan, bukan sekedar sebagai tempat penyimpanan uang bagi pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dan sebagai sumber dana bagi pihak yang memerlukan dana (*defisit fund*). Produk dan jasa perbankan yang ditawarkan juga semakin beraneka dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi, hal tersebut dilakukan untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya.

Peristiwa krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun 1997 dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran. Fluktuasi dan ketidakstabilan makro ekonomi menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi yang membuat tingginya tingkat bunga dan inflasi, kemudian terjadi krisis. Krisis ekonomi tahun 1998 diawali dengan kesulitan likuiditas akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sektor perbankan menjadi salah satu dari sekian banyak perusahaan yang terkena dampak krisis perekonomian. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh pemerintah berdasarkan Kepres No 27 Tahun 1998 didasari dengan semakin tingginya pinjaman bank kepada Bank Indonesia berupa Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menutupi kesulitan likuiditas. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pencabutan izin usaha enam belas bank swasta juga dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tahun 1997 karena ketidakmampuan bank dalam memobilisasi dana masyarakat dan ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, khususnya bank swasta yang dianggap memiliki kinerja keuangan yang rendah. Likuidasi akhirnya membuat bank melakukan pemutusan hubungan kerja dan berakibat semakin terpuruknya masalah sosial. Selain likuidasi tindakan pemerintah lainnya ialah mengambil alih kepengurusan bank karena besarnya BLBI sudah melebihi 200%. Program rekapitulasi juga diupayakan oleh pemerintah agar sektor perbankan dapat sehat kembali, (Dendawijaya, 2004:7).

Krisis perbankan kembali terjadi di Indonesia pada tahun 2008. Krisis keuangan global dari Amerika Serikat tahun 2007 berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis tersebut dikarenakan harga mengalami kenaikan yang kemudian diikuti dengan inflasi yang tinggi dan berdampak pada meningkatnya suku bunga kredit. Krisis tersebut mempengaruhi harga saham yang semakin anjlok dan mendorong investor menarik asetnya, tidak terkecuali di Indonesia, ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

Krisis 2008 berdampak sistemik terhadap sektor perbankan, sehingga tingkat bunga diturunkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Berulangnya krisis perbankan tersebut terjadi karena bank merupakan institusi kepercayaan yang rentan terhadap penarikan dana besar-besaran oleh nasabah.

Bank sebagai lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan penyimpanan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, harus terus menjaga kesehatan bank dan menjaga kepercayaan tersebut. Pengawasan bank diperlukan untuk memantau dan memeriksa pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan perbankan. Pengawasan terhadap bank juga dilakukan untuk mengetahui kinerja bank dan mengukur tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan bank adalah suatu gambaran bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Kesehatan bank dinilai sebagai kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, (Taswan, 2010:537).

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia menetapkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004.

Peraturan tersebut mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Secara umum penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dikenal dengan CAMELS. Sejak tanggal 5 Januari 2011 Peraturan Bank Indonesia mengenai kesehatan bank diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang menggunakan metode risiko (*Risk Based Bank Rating*).

Metode *Risk Based Bank Rating* atau RBBR mewajibkan bank baik secara individual maupun konsolidasi untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian mencakup faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*). Pada metode *Risk-based Bank Rating* analisis dilakukan terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi dan prospek perkembangan bank secara komprehensif.

Profil risiko (*risk profile*) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank terhadap delapan risiko. Risiko yang wajib dinilai ialah, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko inheren yang melekat pada kegiatan bisnis bank dapat berpengaruh terhadap posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren ditentukan oleh faktor internal dan eksternal bank. Dalam menilai profil risiko perlu diperhatikan pula oleh bank cakupan penerapan manajemen risiko yang sesuai dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko.

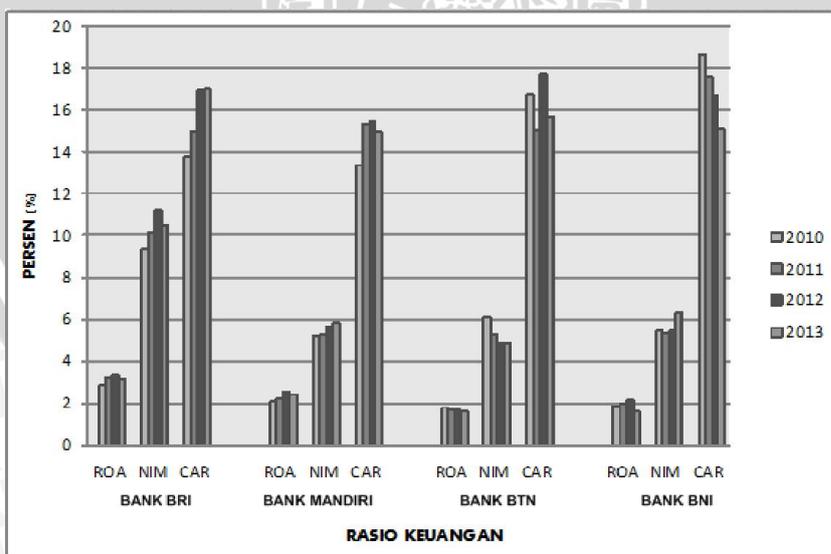
*Good corporate governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip dasar GCG ialah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Bank dalam GCG dituntut untuk transparan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai kondisi bank. Penilaian GCG dikategorikan dalam lima peringkat, dimana peringkat terkecil akan mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Rentabilitas (*earning*) merupakan penilaian yang meliputi kinerja, sumber, kesinambungan, dan manajemen rentabilitas. Kinerja rentabilitas yang sehat merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup bank, dengan tingkat rentabilitas yang baik menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja rentabilitas yakni *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM). Permodalan (*capital*) adalah faktor terakhir dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR. SE BI No 13/24/DPNP menjelaskan bahwa “penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan”. Permodalan bank dapat diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequency Ratio* (CAR).

Bank sebagai badan usaha milik negara (BUMN) ialah bank persero yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang RI Tahun 1945 ayat 2. Bunyi pasal 33 tersebut ialah, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Berdasarkan pasal 33 tersebut terbentuk badan usaha milik negara oleh pemerintah yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut. Bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ialah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Bank-bank tersebut ialah bank yang memiliki prestasi dibidang perbankan, sebagai bank yang mendominasi perbankan di Indonesia dan menguasai hajat hidup banyak orang, maka bank dituntut untuk terus menjaga kesehatannya. Pengukuran kesehatan bank terhadap empat bank milik pemerintah pusat begitu penting dilakukan, agar tetap dipercaya oleh kalangan pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan bisnisnya. Berikut adalah rasio keuangan bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI selama empat tahun terakhir yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber : Laporan Keuangan Bank Milik Pemerintah Pusat (Data Diolah, 2014)

**Gambar 1 Rasio Keuangan Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Gambar tersebut menunjukkan kinerja bank milik pemerintah pusat selama empat tahun, terhitung dari tahun 2010-2013. *Return On Assets* (ROA) tertinggi yang ditunjukkan pada Gambar 1 dicapai oleh Bank BRI pada tahun 2012 sebesar 3,39%, dan ROA terendah oleh Bank BNI pada tahun 2013 sebesar 1,61%. *Net Interest Margin* (NIM) tertinggi sebesar 11,20% oleh Bank BRI pada tahun 2012 dan NIM terendah pada tahun 2013 sebesar 4,86% oleh Bank BTN. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, sedangkan NIM yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank, CAR tertinggi pada gambar tersebut dicapai oleh Bank BNI pada tahun 2010 sebesar 18,6% dan CAR terendah oleh Bank Mandiri pada Tahun 2010 sebesar 13,36%.

Menjaga kesehatan bank penting dilakukan agar kepercayaan nasabah terus terjaga terhadap bank yang bersangkutan. Jika bank-bank yang menguasai sektor perbankan tidak sehat lagi, maka kegagalan tersebut dapat berakibat buruk terhadap perekonomian. Pengidentifikasian permasalahan terhadap kegiatan operasional bank juga harus dilakukan, agar bank mampu bertahan didunia perbankan dan mampu meningkatkan kinerjanya. Likuidasi atau bangkrutnya suatu bank yang besar dapat menyebabkan bangkrutnya bank yang lain akibat penarikan dana secara tiba-tiba, (Latumaerissa, 2012-144).

Dasar dalam penelitian ini ialah laporan keuangan yang dapat dianalisis dan dipublikasikan di BEI. Peneliti tertarik untuk menilai sejauh mana kondisi tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat dinilai dengan menggunakan metode

RBBR. Faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini yakni, faktor *Risk Profile* dengan menggunakan indikator pengukuran pada risiko kredit menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL), risiko pasar menggunakan rumus *Interest Rate Risk* (IRR), dan risiko likuiditas menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sedangkan risiko lainnya tidak dapat dianalisa dengan menggunakan data kuantitatif, faktor *Good Corporate Governance* (GCG), faktor *Earnings* dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) dan rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan faktor *Capital* dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan, maka peneliti tertarik mengajukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK BASED BANK RATING* (RBBR)”** (Studi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang terdaftar di BEI periode 2011-2013).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*) bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI dinilai dengan metode *Risk Based Bank Rating* selama periode 2011-2013?

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*) bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013.
2. Menganalisis tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI dinilai dengan metode *Risk Based Bank Rating* selama periode 2011-2013.

### D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai pengukuran tingkat kesehatan perbankan dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan dapat digunakan sebagai bahan untuk peneliti berikutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh bank dalam meningkatkan kinerjanya dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam mengukur tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Susunan dari penulisan ini terdiri dari lima BAB dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian mengenai bank secara umum, laporan keuangan, dan metode RBBR.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan data yang terdiri dari gambaran umum bank yang diteliti, menyajikan data analisis serta interpretasi data.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dan disertai saran peneliti atas kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis tingkat kesehatan bank sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, hasil penelitian dari sebagian peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanata (2012) dalam skripsinya Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Hasilnya menunjukkan bahwa PT. Bank Central Asia Tbk memiliki modal yang sangat kuat dilihat dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tahun 2011 CAR yang dicapai diatas 8% yaitu sebesar 16,15% dimana nasabah yang memiliki simpanan di bank BCA tidak perlu khawatir karena keamanannya dijamin oleh pihak bank. *Return on Assets* (ROA) PT. Bank Central Asia Tbk mencapai 3,39% di tahun 2011. *Net Interest Margin* (NIM ) pada PT. Bank Central Asia menunjukkan hasil di atas 2% di tahun 2011 yakni sebesar 4,41%.
2. Sa'diyah (2012) dalam skripsinya Penentuan Tingkat Kesehatan Bank Umum Dengan Metode *Risk-Based Bank Rating*. Hasilnya menunjukkan bahwa dari tiga puluh bank yang terdaftar di BEI tahun 2011, tiga bank diantaranya dikategorikan tidak sehat karena beberapa risiko yang mempengaruhi kinerja bank. Bank tersebut yakni PT Bank ICB Bumiputera Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, dan PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. Faktor GCG semua bank menunjukkan bank dalam keadaan sehat. Demikian pula dengan faktor

*capital* yang menunjukkan bahwa keseluruhan bank telah memenuhi syarat sebagai bank yang sehat. Berdasarkan rasio ROA diketahui bahwa terdapat tiga bank tidak sehat, dimana dua bank memiliki laba negatif atau rugi yaitu PT Bank ICB Bumiputera Tbk dan PT Bank Pundi Indonesia Tbk dan satu bank yang memiliki rasio di bawah 0,5% yaitu PT Bank QNB Kesawan Tbk. sedangkan dari rasio NIM menunjukkan rata-rata tren yang positif.

3. Widyaningrum (2014) dalam skripsinya Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Hasilnya menunjukkan bahwa penilaian dengan faktor *earning* menggunakan ROA terhadap dua puluh lima bank bank yang terdaftar di BEI dalam IHSG sub sektor perbankan tahun 2012, terdapat 5 bank yang termasuk dalam kriteria tidak sehat. Sedangkan penilaian *earning* dengan rasio NIM menunjukkan bahwa keseluruhan bank dapat dikategorikan sehat dengan rata-rata di atas 2%. Bank dengan NIM paling baik adalah Bank Pundi Indonesia dengan NIM sebesar 12,95%, sedangkan bank dengan NIM terkecil adalah Bank Victoria dengan hasil sebesar 2,36%. Demikian pula dengan hasil penelitian *capital adequacy ratio* (CAR) yang menunjukkan keseluruhan bank dalam keadaan sehat. Penilaian hasil ROA paling baik adalah Bank Rakyat Indonesia dengan hasil 4,33%, sedangkan bank yang masuk dalam kategori tidak sehat adalah Bank QNB Kesawan dengan nilai ROA -0,69%.

**Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Tahun	Penelitian Sekarang	
			Perbedaan	Persamaan
1	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC ( <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i> ).	2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank milik pemerintah pusat.</li> <li>2. Variabel pengukuran dalam penelitian ini adalah <i>risk profile</i> menggunakan NPL, IRR, dan NPL, sedangkan faktor GCG menggunakan hasil <i>self assessment</i> bank.</li> <li>3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2011-2013.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI).</li> <li>2. Variabel pengukuran untuk faktor <i>earning</i> menggunakan rasio ROA dan NIM, sedangkan untuk faktor <i>capital</i> menggunakan rasio CAR.</li> </ol>
2	Penentuan Tingkat Kesehatan Bank Umum Dengan Metode <i>Risk-Based Bank Rating</i> .	2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank milik pemerintah pusat.</li> <li>2. Variabel pengukuran dalam penelitian ini adalah <i>risk profile</i> menggunakan NPL, IRR, dan NPL, sedangkan faktor GCG menggunakan hasil <i>self assessment</i> bank.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI).</li> <li>2. Variabel pengukuran untuk faktor <i>earning</i> menggunakan rasio ROA dan NIM, sedangkan untuk faktor <i>capital</i> menggunakan rasio CAR.</li> </ol>

No.	Judul	Tahun	Penelitian Sekarang	
			Perbedaan	Persamaan
			3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2011-2013.	
3.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)	2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank milik pemerintah pusat.</li> <li>2. Variabel pengukuran dalam penelitian ini adalah <i>risk profile</i> menggunakan NPL, IRR, dan NPL, sedangkan faktor GCG menggunakan hasil <i>self assessment</i> bank.</li> <li>3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2011-2013.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI).</li> <li>2. Variabel pengukuran untuk faktor <i>earning</i> menggunakan rasio ROA dan NIM, sedangkan untuk faktor <i>capital</i> menggunakan rasio CAR.</li> </ol>

Sumber: Data diolah (2014)

## B. Bank

### 1. Pengertian Bank

Pada dasarnya bank dan perbankan merupakan dua hal yang berbeda, namun masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank dan perbankan adalah sama. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank, sedangkan bank merupakan lembaga keuangan. Bank dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan ialah “badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank secara sederhana menurut Kasmir (2008:2) “Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Definisi lain mengenai bank adalah sebagai berikut:

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada *surplus spending unit* dan menyalurkan kredit kepada *defisit spending unit*, (Hasibuan, 2004:2).

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber yang dikemukakan oleh Irmayanto, dkk (2009:53) yakni:

- a. Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efisien, dan menjauhkannya dengan harga yang bersaing (Peter S Rose, 1993).
- b. Bank adalah, “*departement store of fianance*”, yang merupakan organisasi jasa atau pelayan berbagai macam jasa keuangan. (Joseph F. Sinkey, 1986)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai bank, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang peran utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan menyediakan jasa lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 2. Jenis Bank

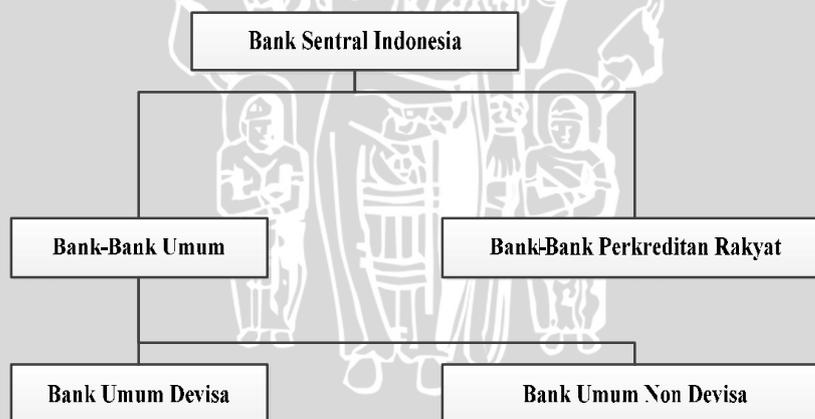
Perbedaan jenis perbankan terjadi karena luasnya kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa jenis bank yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun jenis bank ditinjau dari berbagai segi ialah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi fungsinya  
Berdasarkan undang-undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:
  - 1) Bank umum
  - 2) Bank pembangunan
  - 3) Bank tabungan
  - 4) Bank pasar
  - 5) Bank desa
  - 6) Lumbung desa
  - 7) Bank pegawai
  - 8) dan bank jenis lainnyaNamun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:
  - 1) Bank umum
  - 2) Bank perkreditan rakyat (BPR)
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya  
Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:
  - 1) Bank milik pemerintah
  - 2) Bank milik swasta nasional
  - 3) Bank milik asing
  - 4) Bank milik campuran
- c. Dilihat dari segi status  
Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk bank umum. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi status dibagi ke dalam dua macam yaitu:
  - 1) Bank devisa

- 2) Bank non devisa
- d. Dilihat dari segi cara menentukan harga  
Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:
  - 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
  - 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah, (Kasmir, 2008:18).

Terdapat tiga subsistem bank dalam sistem perbankan Indonesia yakni:

- a. bank sentral sebagai pembina dan pengawas sistem perbankan.
- b. bank umum.
- c. bank perkreditan rakyat.  
Sedangkan ditinjau dari sudut kerjanya, sistem perbankan di Indonesia dapat dibedakan atas:
  - a. bank konvensional, yaitu bank umum (dan BPR) yang memakai bunga sebagai dasar kegiatannya.
  - b. bank syariah, yaitu bank umum dan BPR yang kegiatannya didasarkan atas syariah, antara lain prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, (Darmawi, 2012:21).



(Sumber: Darmawi, 2012:21)

**Gambar 2 Bagan Struktur Perbankan Indonesia**

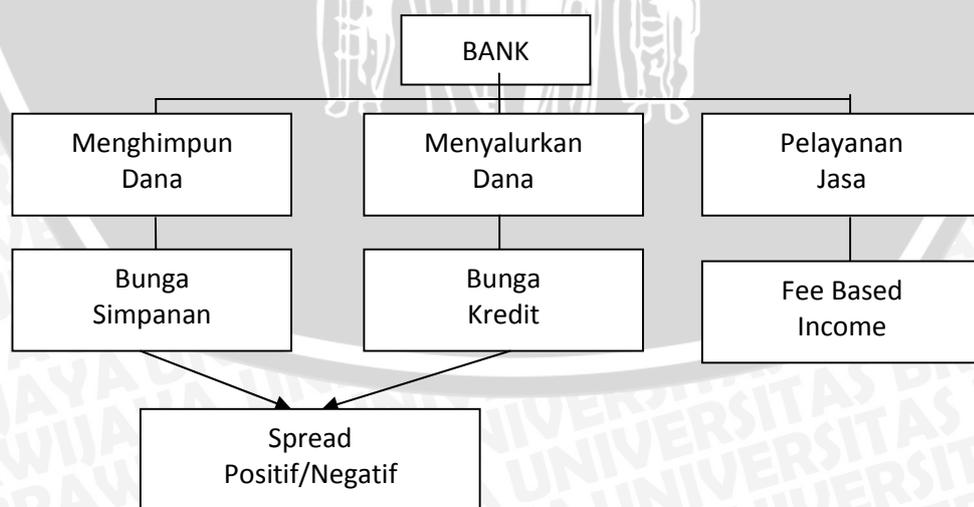
### 3. Kegiatan Bank

Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utama bank adalah

menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan bank yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum ialah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
  - 1) Simpanan giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
  - 2) Simpanan tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
  - 3) Simpanan deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti:
  - 1) Kredit investasi, kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
  - 2) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
  - 3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen-agen maupun pengecer.
  - 4) Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  - 5) Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
  - 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dikter atau pengacara.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
  - 1) *Transfer* (kiriman uang), merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
  - 2) *Kliring (Clearing)*, merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
  - 3) *Inkaso (Collection)*, merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
  - 4) *Safe Deposit Box*, merupakan jasa penyimpanan dokumen berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe deposit box* lebih dikenal dengan nama *safe loket*.
  - 5) *Bank Card*, merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (anjungan tunai mandiri) setiap hari.

- 6) *Bank Notes* (Valas), merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- 7) *Bank Garansi*, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- 8) *Bank Draft*, merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- 9) *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- 10) *Cek Wisata* (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan.
- 11) Menerima setoran-setoran seperti:
  - a) Pembayaran pajak
  - b) Pembayaran telepon
  - c) Pembayaran air
  - d) Pembayaran listrik
  - e) Pembayaran uang kuliah
- 12) Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
  - a) Gaji/pensiun/honorarium
  - b) Pembayaran deviden
  - c) Pembayaran kupon
  - d) Pembayaran bonus/hadiah
- 13) Bermain di pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
  - a) Penjamin emisi (*Underwriter*)
  - b) Penanggung (*Guarantor*)
  - c) Wali Amanat (*Trustee*)
  - d) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
  - e) Pedagang efek (*Dealer*)
  - f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
- 14) Dan jasa lainnya, (Kasmir, 2008:30).



Sumber: Ismail (2013:4)

**Gambar 3 Kegiatan Utama Bank**

Setiap bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memiliki cara yang berbeda, seperti antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Produk yang ditawarkan bank umum akan lebih lengkap dibandingkan dengan produk yang ditawarkan bank perkreditan rakyat, karena wilayah operasinya yang lebih sempit.

#### 4. Keuntungan Bank

Keuntungan selalu diharapkan dalam menjalankan sebuah usaha. Bank menekankan untuk meraih keuntungan agar dapat memberikan penghasilan setinggi mungkin kepada para pemegang saham dan selain itu memperoleh dana tambahan guna mendukung pertumbuhan jangka panjang, (Puspoprano, 2004:100). Berbagai cara akan dilakukan bank agar memperoleh keuntungan. Bank sebagai bisnis keuangan memiliki cara tersendiri untuk memperoleh keuntungan. “Keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah berdasarkan bunga yang telah ditentukan”, (Kasmir, 2012:39). Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena memiliki simpanan di bank, dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena memperoleh pinjaman bank. Kegiatan perbankan berdasarkan prinsip konvensional terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yakni,

Pertama adalah bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, seperti jasa giro, bunga tabungan serta bunga deposito dan harga ini bagi bank merupakan harga beli. Kedua adalah bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar

oleh nasabah peminjam kepada bank seperti bunga kredit dan harga ini bank merupakan harga jual, (Kasmir, 2012:39).

## 5. Sumber Dana Bank

Bank sebagai lembaga keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai usaha pokok menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank memerlukan sumber dana yang didapat dari menghimpun dana bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Pengertian dari sumber dana bank itu sendiri menurut Kasmir (2008:61) “adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya”. Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana, (Ismail, 2010:39). Kegiatan bank menghimpun dana ialah dalam bentuk simpanan yang akan menentukan pertumbuhan bank. Dana yang dihimpun akan dikelola oleh bank dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya pemberian pinjaman (kredit), dan pembelian surat berharga dalam pasar uang. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sumber dana dan penggunaan dana yakni,

- 1) Jenis penggunaan dana.
- 2) Apakah ada kesempatan untuk memperoleh dana dari pasar dana.
- 3) Filosofi manajemen bank yang bersangkutan.
- 4) Jenis sumber dana.
- 5) Hubungan biaya dana dan penghasilan.
- 6) Ramalan tingkat bunga.
- 7) Lamanya (*duration*) dana itu bisa dipakai, (Darmawi, 2012:42).

Penggolongan sumber dana bank ialah:

- a. Dana dari modal sendiri (ekuitas)

- 1) Modal yang disetor, yaitu dana yang disetor pertama kali oleh pemilik (pemegang saham) waktu pendirian tersebut. Dana modal ini biasanya tidak digunakan untuk operasional, tetapi digunakan untuk biaya promosi, peralatan dan aset tetap lainnya.
  - 2) Berbagai cadangan. Cadangan ini berasal dari penyisihan sebagian laba untuk mengantisipasi risiko. Istilah yang dipakai dalam laporan keuangan bank untuk cadangan ini, adalah penyisihan penghapusan, misalnya penyisihan penghapusan kredit.
  - 3) Laba yang ditahan (*retained earning*) merupakan sebagian laba yang disetujui rapat pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden.
  - 4) Agio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, dan selisih penilaian kembali aktiva tetap, merupakan sumber dana ekuitas.
- b. Dana yang berasal dari pinjaman
- 1) Pinjaman dari bank-bank lain, sering disebut sebagai *call money*, merupakan pinjaman harian antar bank dengan menggunakan instrumen pasar uang, misalnya promes. Pinjaman biasanya diminta untuk menutupi kebutuhan mendesak, seperti misalnya menutupi kekalahan kliring. Jangka waktu *call money* ini adalah jangka pendek, biasanya tidak lebih dari satu bulan.
  - 2) Pinjaman dari bank sentral, untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas, seperti kredit investasi pada sektor tertentu, dikenal sebagai Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
  - 3) Pinjaman dari lembaga finansial bukan bank, ada yang berupa pinjaman dengan akta kredit, tetapi ada pula berupa penjualan sekuritas finansial yang diterbitkan kepada lembaga tersebut, misalnya sertifikat deposito.
- c. Dana dari deposit nasabah
- 1) Rekening giro, adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM.
  - 2) Tabungan, merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar, karena jumlah penarikan dan penyeteroran nyaris stabil.
  - 3) Deposito berjangka, merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktunya (jatuh temponya) ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh temponya.
- d. Dana dari pasar finansial
- 1) Sertifikat deposito, adalah semacam instrumen finansial yang diterbitkan oleh sebuah bank dengan karakteristik atas unjuk yang di dalamnya tercantum jumlah dana, tingkat bunga, jangka waktu (jatuh tempo).
  - 2) Sekuritas aset bank, berarti mentransformasikan aset menjadi sekuritas, misalnya aset kredit yang diberikan.
  - 3) Pasar uang antar bank, merupakan salah satu sarana untuk memenuhi likuiditas bank, karena kalah kliring. Pada dasarnya adalah kegiatan

pinjam-meminjam antara suatu bank dengan bank-bank lain, (Darmawi, 2012:43).

## C. Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank dalam suatu waktu atau periode akan melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangannya.

Perusahaan perbankan adalah salah satu perusahaan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, sangat membutuhkan standardisasi dalam penyajian laporan keuangan, karena masyarakat sangat membutuhkan informasi kondisi bank di mana mereka menyimpan miliaran bahkan triliunan uangnya (Bastian dan Suhardjono, 2006:60).

Laporan keuangan dibentuk untuk memberikan informasi mengenai jumlah aktiva dan pasiva yang tergambar dalam neraca. Laporan laba rugi yang dikeluarkan perusahaan akan mencerminkan gambaran hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan peraturan Bank Sentral, “setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Sentral (Bank Indonesia) dan publik, setiap enam bulan, yang terdiri atas laporan inti dan laporan pelengkap” (Darmawi 2012:31).

Definisi lain mengenai laporan keuangan adalah “bentuk pencatatan keuangan secara sistematis dan metodologis tentang posisi keuangan maupun hasil operasi keuangan perusahaan pada suatu periode waktu tertentu” (Abdullah, 2005:106). Laporan keuangan “merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu” (Martono, 2005:51). Laporan keuangan juga diartikan sebagai “ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu

ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan” (Baridwan, 2010:17).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang sistematis mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah:

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan para pemakainya, (Sadeli, 2011:19).

“Laporan keuangan banyak membantu dan menceritakan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang telah terjadi (bernilai historis), di antaranya:

- 1) Mencerminkan sehat atau tidaknya suatu perusahaan,
- 2) Kondisi usaha sekarang,
- 3) Perkembangan usaha, (Supriyono, 2011:147).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan juga digunakan untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan.

## 3. Pihak yang Berkepentingan

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank akan bermanfaat untuk banyak pihak. Pihak internal dan eksternal mempunyai kepentingan dan tujuan

tersendiri terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank. Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah:

- a. Pemilik atau pemegang saham  
Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk melihat kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut.
- b. Pemerintah  
Bagi pemerintah, baik bank-bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan akan kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu.
- c. Manajemen  
Untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.
- d. Karyawan  
Untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya.
- e. Masyarakat luas  
Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan. dengan adanya laporan keuangan pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan, (Kasmir, 2012:282).

#### 4. Jenis Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan bank terdiri dari laporan inti dan laporan pelengkap, diantaranya adalah:

- a. Laporan inti terdiri atas:
  - 1) Neraca
  - 2) Daftar Perhitungan Laba Rugi
- b. Laporan pelengkap terdiri atas:
  - 1) Laporan komitmen dan kontijensi
  - 2) Laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum
  - 3) Laporan transaksi valuta asing dan derivatif
  - 4) Laporan kualitas aktiva produktif dan derivatif
  - 5) Perhitungan rasio keuangan
  - 6) Pengurus bank dan pemilik bank, (Darmawi, 2012:32).

## 1) Neraca/Laporan Posisi Keuangan

Neraca adalah “suatu daftar keuangan yang memuat ikhtisar tentang harta, utang, dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun” (Sadeli, 2011:19). Posisi keuangan dimaksudkan ialah posisi aktiva (harta), passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Neraca disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Neraca terdiri atas tiga bagian yakni aktiva, kewajiban, dan modal.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### a) Aktiva

Aktiva adalah “harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu” (Kasmir, 2014:29).

### b) Kewajiban

Kewajiban merupakan tagihan para kreditor kepada perusahaan. Definisi lain mengenai kewajiban yakni,

Pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu, (Baridwan, 2010:23).

### c) Modal

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) mendefinisikan modal sebagai “bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut”.

## 2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah “suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu” (Baridwan, 2010:29). Definisi lain mengenai laporan laba rugi yakni, “Laporan rugi laba adalah suatu daftar yang memuat ikhtisar tentang penghasilan, biaya serta hasil neto suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun” (Sadeli, 2011:24).

Tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan adalah mendapatkan laba. Laporan laba rugi disusun untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Hasil operasi perusahaan dilakukan dengan membandingkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan dikatakan memperoleh laba, dan jika sebaliknya, maka perusahaan menderita rugi. Penjelasan mengenai bagian dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

### a) Pendapatan

Pendapatan adalah “semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha” (Abdullah, 2005:114). Definisi lain dari pendapatan adalah,

Aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utanganya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha, (Baridwan, 2010:29)

### b) Biaya

Definisi dari biaya yang dimaksudkan dalam laporan laba rugi adalah “semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank” (Abdullah, 2005:116). Biaya juga dapat diartikan sebagai,

Aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya utang (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha, (Baridwan, 2010:29).

Pada dasarnya laporan keuangan bank disajikan dan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan untuk perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), serta didasarkan pada peraturan-peraturan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

#### **D. Kesehatan Bank**

Perbankan harus dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabahnya. Bank yang tidak sehat akan membahayakan banyak pihak, tidak hanya bank itu sendiri. Mengingat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait yakni, pemilik, manajemen, masyarakat (nasabah pengguna jasa), dan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina perbankan. Penilaian kesehatan bank penting dilakukan karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan. Masyarakat sebagai pemilik dana dapat mengambil dana yang dimilikinya setiap saat, dan bank sebagai pengelola harus mampu mengembalikannya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

“Kelangsungan usaha industri perbankan sangat ditentukan oleh nasabahnya, sementara loyalitas nasabah sangat ditentukan oleh aspek kepercayaan nasabah kepada bank pilihannya. Dengan demikian, unsur

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan kunci keberhasilan dan kelangsungan usaha bank” (Supriyanto, 2006:103).

Menilai kesehatan bank dapat dilakukan dari berbagai segi. Penilaian bertujuan untuk menentukan kondisi bank dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan kesehatan. Bank yang kesehatannya terus meningkat diharapkan tetap mempertahankan kesehatannya, dan bank yang kesehatannya terus mengalami penurunan harus memperbaiki kesehatannya dan mendapat pengarahan dari Bank Indonesia.

#### **E. Metode *Risk Based Bank Rating***

Kondisi kesehatan setiap bank yang diharuskan untuk tetap diawasi maka, Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank sebagai alat pengawasan perbankan. Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum diterbitkan pada tanggal 12 April 2004. Kinerja bank diukur melalui penilaian kuantitatif dengan menggunakan faktor CAMELS. Peraturan mengenai penilaian kesehatan bank tersebut diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 disebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi. Peraturan tersebut diterbitkan untuk menyempurnakan penilaian kesehatan bank dengan pendekatan risiko. Terdapat empat faktor

penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR. Faktor tersebut mencakup faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*).

### 1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank yang dilakukan terhadap delapan faktor risiko yakni:

#### a. Risiko kredit

Menurut Latumerissa (2012:143) risiko kredit adalah “Risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayar kepada bank”. Ketidاكلancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga secara langsung dapat menurunkan kinerja bank. Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban kreditnya disebut dengan *default*.

#### b. Risiko pasar

Risiko pasar menurut Latumerissa (2012:144) adalah “Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pasar, tingkat kurs valuta asing, tingkat inflasi, dan sebagainya”. Bank harus tetap mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar untuk menetapkan tingkat suku bunga simpanan kredit.

#### c. Risiko likuiditas

Menurut Abdullah (2006:280) risiko likuiditas adalah “Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu”. Ketidakpastian tersebut timbul apabila bank tidak dapat memperediksi jumlah

dana yang ditarik nasabah secara tiba-tiba. Penarikan dana yang cukup besar diluar perhitungan bank dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas.

d. Risiko operasional

Risiko operasional menurut Retnadi (2006:124) didefinisikan sebagai “risiko yang disebabkan antara lain oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank”.

e. Risiko hukum

“Risiko yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelamahan perikatan seperti tidak dipenuhinya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna” (Abdullah, 2006:280).

f. Risiko stratejik

“Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal” (Abdullah, 2006:280). Kelemahan dalam proses formulasi stratejik dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi menjadi sumber utama risiko stratejik terjadi.

g. Risiko kepatuhan

“Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku” (Abdullah, 2006:280). Kurangnya pemahaman atas kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis menjadi penyebab utama terjadinya risiko kepatuhan.

#### h. Risiko reputasi

“Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank” (Taswan, 2010:106).

Penelitian ini mengukur profil risiko dengan menggunakan tiga indikator yaitu pertama faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Kedua faktor risiko pasar dengan menggunakan rasio *Interest Rate Risk* (IRR), dan faktor risiko likuiditas menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Lima risiko lainnya yakni, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi tidak dapat diteliti dikarenakan data kuantitatif tidak diperoleh dari lima faktor tersebut.

#### a. Risiko kredit

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Meningkatnya risiko kredit dapat disebabkan karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Menilai risiko inheren atas risiko kredit, menggunakan indikator komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, pencadangan, dan faktor eksternal.

*Non Performing Loan* (NPL) dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi risiko kredit. Rasio NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari seluruh

keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank yang kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet dari kredit yang diberikan secara keseluruhan (Jumingan, 2011:245). Rumus yang digunakan untuk menghitung NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

Rasio NPL merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja portofolio kredit. NPL yang tinggi atau lebih dari 5% menurut Retnadi (2006:21), dapat dinyatakan bahwa bank tersebut merupakan bank yang terindikator memiliki kredit bermasalah.

Tabel 2 Predikat *Non Performing Loan* Bank

No.	Rasio	Predikat
1	0% < NPL < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPL < 5%	Baik
3	5% ≤ NPL < 8%	Cukup Baik
4	8% < NPL ≤ 11%	Kurang Baik
5	NPL > 11%	Tidak Baik

Sumber : SE BI 6/23/DPNP

b. Risiko pasar

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Menilai risiko inheren atas risiko pasar indikator yang digunakan adalah volume dan komposisi portofolio serta strategi dan kebijakan bisnis.



Cakupan posisi *banking book* (*Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB*) dan posisi *trading book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Penelitian ini menggunakan rasio Interest Rate Risk sebagai salah satu indikator risiko pasar. Rasio IRR digunakan untuk mengetahui tingkat suku bunga, nilai tukar yang beredar dan untuk mengukur sensitivitas aset dan liabilitas terhadap suku bunga. Rumus untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut:

$$\text{IRR} = \frac{\text{Rate Sensitive Aset}}{\text{Rate Sensiteve Liabilities}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

RSA adalah aktiva yang yang dapat berubah setelah tanggal jatuh tempo aktiva yang bersangkutan, tanggal jatuh tempo peninjauan bagi hasilnya (*repricing date*). RSL adalah pasiva yang imbal hasilnya dapat berubah setelah tanggal jatuh tempo pasiva yang bersangkutan, tanggal tertentu sesuai perjanjian, dan tanggal tertentu sesuai dengan keinginan bank. IRR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki risiko yang tinggi juga terhadap turunnya tingkat suku bunga, tetapi jika tingkat suku bunga naik, maka bank yang memiliki tingkat IRR yang tinggi akan sangat diuntungkan karena dengan naiknya tingkat suku bunga akan dapat menaikkan tingkat pendapatan bank tersebut.

c. Risiko likuiditas

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid, tanpa

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Indikator penilaian risiko inheren atas risiko likuiditas, adalah:

- 1) Komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif
- 2) Konsentrasi aset dan kewajiban
- 3) Kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan
- 4) Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Penilaian ini menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit. Rasio LDR mengukur perbandingan total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang diterima bank. LDR juga menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kembali penarikan dana oleh nasabah dengan mengandalkan kredit untuk mengetahui likuiditasnya. Semakin tinggi rasio LDR menunjukkan bahwa semakin rendah likuiditas bank karena terlalu besar jumlah dana masyarakat yang dalokasikan ke kredit. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio LDR adalah sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

**Tabel 3 Predikat *Loan to Deposit Ratio* Bank**

No.	Rasio	Predikat
1	50% < LDR ≤ 75%	Sangat Baik
2	75% < LDR ≤ 85%	Baik
3	85% < LDR ≤ 100%	Cukup Baik
4	100% < LDR ≤ 120%	Kurang Baik
5	LDR > 120%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP

## 2. *Good Corporate Governance (GCG)*

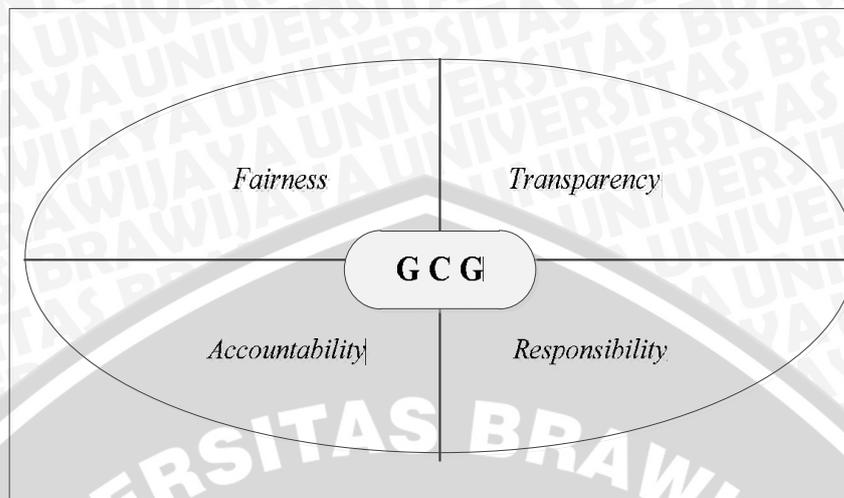
GCG merupakan faktor kedua dalam metode *Risk Based Bank Rating* yang menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bank. Penilaian GCG dilakukan terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian pelaksanaan GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank supaya proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Struktur tata kelola bank diantaranya adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Infrastruktur tata kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank dan merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, (SE 15/15/DPNP/2013).

Berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 bank diharuskan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi sebelas faktor penilaian pelaksanaan GCG yakni:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- 4) Penanganan benturan kepentingan.
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 6) Penerapan fungsi audit intern.
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern.
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
- 11) Rencana strategis bank.

Indikator yang mencakup di dalam aspek GCG adalah nilai dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness* yang dapat dijadikan sebagai indikator penilaian integritas seseorang ketika berkecimpung di dalam pengelolaan sebuah bank, (Wijaya dan Djoko, 2005:236)



Sumber : Arafat (2006, 12)

**Gambar 4 Prinsip-prinsip Dasar GCG**

- a. *Fairness*. Perlakukan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting, serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan pemegang saham oleh orang dalam (*insider trading*).
- b. *Disclosure* dan *Transparency*. Hak-hak pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- c. *Accountability*. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor.
- d. *Responsibility*. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan (Arafat, 2006:11).

### 3. Rentabilitas (*Earning*)

Merupakan penilaian yang didasarkan pada rentabilitas bank dengan melihat kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas menggunakan parameter diantaranya adalah:

a. *Return on Asset (ROA)*

Rasio ROA mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ROA, maka semakin baik kinerja bank (Taswan, 2010:167).

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

**Tabel 4 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA**

No.	Rasio ROA	Predikat
1.	$2 \% < ROA$	Sangat Sehat
2.	$1,25 \% < ROA \leq 2 \%$	Sehat
3.	$0,5 \% < ROA \leq 1,25 \%$	Cukup Sehat
4.	$0 \% < ROA \leq 0,5 \%$	Kurang Sehat
5.	$ROA \leq 0 \%$	Tidak Sehat

Sumber: Data diolah (Kodifikasi penilaian tingkat kesehatan bank, 2014)

b. *Net Interest Margin (NIM)*

Rasio NIM mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin besar rasio NIM, maka semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga (Taswan, 2010:167).

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Earning Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

**Tabel 5 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NIM**

No.	Rasio NIM	Predikat
1.	$3\% < \text{NIM}$	Sangat Sehat
2.	$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$	Sehat
3.	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	Cukup Sehat
4.	$1\% < \text{NIM} \leq 1,5\%$	Kurang Sehat
5.	$\text{NIM} \leq 1\%$	Tidak Sehat

Sumber: Data diolah (Kodifikasi penilaian tingkat kesehatan bank, 2014)

**Tabel 6 Matriks Peringkat Faktor Rentabilitas**

No	Peringkat	Definisi
1.	1	Rentabilitas <u>sangat memadai</u> , laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodaln Bank.
2.	2	Rentabilitas <u>memadai</u> , laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.
3.	3	Rentabilitas <u>cukup memadai</u> , laba memenuhi target, namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank.
4.	4	Rentabilitas <u>tidak memadai</u> , laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut di masa datang sehingga kurang dapat mendukung pertumbuhan permodalan bank dan kelangsungan usaha Bank.
5.	5	Rentabilitas <u>sangat tidak memadai</u> , Laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha Bank.

Sumber : Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

#### 4. Permodalan (*Capital*)

Permodalan merupakan penilaian yang didasarkan pada modal yang dimiliki oleh bank. “Penyusunan peringkat sebuah bank atas dasar aset maupun modal yang dimiliki merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran seberapa besar kepercayaan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan bank tersebut” (Retnadi, 2006:32). Modal memiliki fungsi untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan dalam kepastian kelanjutan operasi bank walaupun pada saat bank mengalami kerugian. Modal yang diperhitungkan dalam memenuhi regulasi permodalan terdiri dari:

a. Modal Inti (Tier I)

Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. modal inti adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Modal inti juga terdiri dari modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Cadangan umum juga termasuk modal inti, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak, dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham (Taswan, 2010:225).

Modal inti diantaranya adalah:

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Misalnya bank yang berbentuk koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- 3) Modal sumbangan, adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual.
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank,
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 7) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak, (Judisseno, 2005:131).

b. Modal Pelengkap (Tier II)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Secara rinci modal pelengkap terdiri dari:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
- 2) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk dengan cara membenahi laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
- 3) Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal. Modal pinjaman sebelumnya disebut modal kuasi. Dalam perhitungan CAR, modal pinjaman termasuk komponen modal pelengkap.
- 4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan Bank Indonesia dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank dilikuidasi.

c. Modal Pelengkap Tambahan (Tier III)

- 1) Bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan Kebutuhan Penyertaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara individual dan atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
- 2) Modal pelengkap tambahan dalam perhitungan KPM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar.
- 3) Pos-pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi jangka pendek.
- 4) Modal pelengkap tambahan untuk memperhitungkan risiko pasar.
- 5) Modal pelengkap yang tidak digunakan dapat ditambahn untuk modal pelengkap tambahan.
- 6) Pinjaman subordinasi sebgaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal inti, dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan (Taswan, 2010:226).

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM). Adapun rumus untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank umum adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

**Tabel 7 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan CAR**

No.	Rasio CAR	Predikat
1.	12 % < CAR	Sangat Sehat
2.	9 % < CAR ≤ 12 %	Sehat
3.	8 % < CAR ≤ 9 %	Cukup Sehat
4.	6 % < CAR ≤ 8 %	Kurang Sehat
5.	CAR ≤ 6 %	Tidak Sehat

Sumber: Data diolah (Kodifikasi penilaian tingkat kesehatan bank, 2014)

**Tabel 8 Matriks Peringkat Faktor Permodalan**

No.	Peringkat	Definisi
1.	1	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang <u>sangat memadai</u> relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha dari Bank.
2.	2	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang <u>memadai</u> relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha dari Bank.
3.	3	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang <u>cukup memadai</u> relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha dari Bank.
4.	4	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang <u>kurang memadai</u> relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha dari Bank.
5.	5	Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang <u>tidak memadai</u> relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha dari Bank.

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

Penilaian faktor permodalan yang didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum maka, ditetapkan penyediaan modal minimum paling rendah sebesar 8% dari ATMR.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah “suatu metode meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” (Darmawan, 2013:37). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran yang sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian kuantitatif adalah “suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui” (Darmawan, 2013:37). “Penelitian kuantitatif erat hubungannya dengan analisis yang menggunakan laporan keuangan, karena seluruhnya terkait dengan data-data kuantitatif (dengan angka atau bilangan)” (Supriyono, 2011:203).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian terhadap suatu objek untuk membuat deskripsi dan gambaran sistematis mengenai fakta-fakta pada objek yang diteliti, dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI dijadikan sebagai lokasi penelitian karena merupakan tempat yang menyediakan informasi data keuangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Data diperoleh dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya yang bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ataupun secara langsung melalui website BEI yakni ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting yang ditentukan sebelum peneliti melakukan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah:

1. Kondisi profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*) bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013 dengan menggunakan:

- a. Faktor Profil Risiko (*Risk Profile*)

Pengukuran pada risiko kredit menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL), risiko pasar menggunakan rumus *Interest Rate Risk* (IRR), dan risiko likuiditas menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sedangkan risiko lainnya yakni, risiko operasional, risiko hukum, risiko

strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi tidak dapat dianalisa dengan menggunakan data kuantitatif.

b. Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, analisis yang digunakan adalah *self assessment* pada laporan pelaksanaan GCG perusahaan.

c. Faktor *Earning* (Rentabilitas)

*Earning* merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM).

d. Faktor *Capital* (Permodalan)

*Capital* merupakan metode penilaian terhadap berdasarkan aspek permodalan yang dimiliki bank, analisis yang digunakan dalam penilaian ialah *Capital Adequency Ratio* (CAR).

2. Tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat dinilai dengan metode *Risk Based Bank Rating* selama periode 2011-2013.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Agung, 2012:32).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank milik pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Bank tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk., PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Agung, 2012:32). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu, “teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel” (Agung, 2012:42). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yakni sebanyak empat bank.

**Tabel 9 Daftar Sampel Penelitian**

NO.	Kode	Nama Perusahaan
1	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
4	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Data diolah, 2014)

#### **E. Sumber Data**

Subyek darimana data diperoleh disebut dengan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder “merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan” (Ikhsan, 2008:149). Sumber data diperoleh dari berbagai laporan keuangan yang dipublikasikan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BNI berupa Laporan Keuangan bank pada akhir

tahun 2011-2013, Laporan tahunan (*Annual Report*), dan *International Capital Market Directory* (ICMD) 2013 di Galeri Investasi BEI Universitas Brawijaya. Data mengenai bank milik pemerintah pusat juga dapat diperoleh dari website resmi bank-bank tersebut.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah “cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya” Darmawan, 2013:159). “Data dokumenter merupakan jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, penjualan, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program” (Ikhsan, 2008:137), yang termasuk dalam dokumen yakni “dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya” (Agung, 2012:66). Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan dan profil perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari *website* resmi BEI.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses yang dilalui peneliti untuk menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Analisis data digunakan untuk membatasi data yang akan digunakan dalam penelitian agar data dapat tersusun rapi dan mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis kondisi kondisi profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*) bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

- a. Analisis *Risk Profile* (Profil Risiko)

- 1) Risiko Kredit

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

- 2) Risiko Pasar

$$IRR = \frac{\text{Rate Sensitive Aset}}{\text{Rate Sensitive Liabilities}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

- 3) Risiko Likuiditas

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

- b. Analisis *Good Corporate Governance* (GCG)

Menganalisis laporan pelaksanaan GCG perusahaan. Berdasarkan atas aspek penialain yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

- 4) Penanganan benturan kepentingan.
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 6) Penerapan fungsi audit intern.
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern.
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
- 11) Rencana strategis Bank.

c. Analisis *Earning* (Rentabilitas)

- 1) *Return on Assets* (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

- 2) *Net Interest Margin* (NIM)

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Earning Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

d. Analisis *Capital* (Permodalan/Modal)

- 1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran PBI No. 13/1/PBI/2011

2. Menentukan tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat dengan cara membandingkan hasil perhitungan analisis rasio-rasio tersebut dengan metode *Risk Based Bank Rating* selama periode 2011-2013.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Bank Republik Indonesia (BRI)

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan *ticker* “BBRI”. Kini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI. Pemegang Saham mayoritas BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham mencapai 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. Dengan dukungan pengalaman dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 9 tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua dalam hal aset di antara industri perbankan Indonesia.

Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk *consumer banking* dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Dengan basis jumlah nasabah yang besar tercermin dari jumlah rekening yang lebih dari 48 juta rekening simpanan, BRI terus mengembangkan layanan *e-banking* yang dapat diakses masyarakat melalui internet, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), maupun melalui layanan *e-channel* lainnya seperti *Automatic Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM),

*Electronic Data Capture* (EDC), dan *Kiosk* dengan total jaringan *e-channel* ini telah mencapai 104.570 unit.

## 2. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Bank Mandiri” atau “Bank”) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian dimaksud telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta diumumkan pada Tambahan No. 6859 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (“Bapindo”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Bank Peserta Penggabungan”). Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999.

## 3. Bank Tabungan Negara (BTN)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau Bank BTN didirikan pada 1897 dengan nama *Posts Paar Bank*. Pada 1950, namanya berubah menjadi Bank



Tabungan Pos, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada 1963. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Sebagai Bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Bank BTN berkeinginan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah idaman. Keinginan ini ditunjukkan dengan konsistensi selama lebih dari enam dekade, dalam menyediakan beragam produk. Sebagai Bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Bank BTN juga sukses mempertahankan posisi sebagai satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset serta penyaluran kredit dan layanan di bidang perumahan, terutama melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik KPR Bersubsidi untuk segmen menengah ke bawah maupun KPR Non Subsidi untuk segmen menengah ke atas.

#### **4. Bank Nasional Indonesia (BNI)**

Sebagai bank pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, BNI yang berdiri pada tahun 1946 mengawali sejarahnya dengan menjalankan fungsi bank sentral. Baru pada tahun 1955, BNI meninggalkan fungsinya sebagai bank sentral dan beroperasi sebagai bank komersial. BNI merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain

proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing.

Menawarkan beragam produk dan layanan jasa keuangan, BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaan, yakni Bank BNI Syariah, BNI *Multi Finance*, BNI *Securities*, BNI *Life Insurance*, dan BNI *Remittance*. Di akhir tahun 2013, jumlah aset yang dimiliki BNI tercatat sebesar Rp386,7 triliun dan jumlah karyawan sebanyak 26.100 orang. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh Indonesia melalui ke-1.693 outlet domestik dan di luar negeri melalui cabang-cabang di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura dan Osaka. Jaringan ATM BNI saat ini tercatat sebanyak 11.163 unit ATM milik sendiri. Layanan BNI juga tersedia melalui 42.000 EDC, *Internet Banking*, dan *SMS Banking*.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Faktor Profil Risiko**

#### **a. Risiko kredit**

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. penilai risiko kredit menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL merupakan perbandingan dari

kredit bermasalah dibagi dengan total kredit. Komponen-komponen yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung NPL adalah:

**Tabel 10 Non Performing Loan Bank Milik Pemerintah Pusat**

Nama Bank	Tahun	Kredit Bermasalah (1)	Total Kredit (2)	NPL $\frac{(1)}{(2)} \times 100\%$
Bank BRI	2011	5.010.108	269.454.726	1,86%
	2012	5.059.432	336.081.042	1,51%
	2013	5.504.271	419.144.730	1,31%
Bank Mandiri	2011	1.591.667	298.988.258	0,53%
	2012	1.757.547	370.570.356	0,47%
	2013	2.673.207	450.634.798	0,59%
Bank BTN	2011	1.563.347	62.619.586	2,50%
	2012	2.978.179	80.430.049	3,70%
	2013	3.537.074	99.330.214	3,56%
Bank BNI	2011	2.562.264	163.533.423	1,57%
	2012	5.636.814	200.742.305	2,81%
	2013	5.421.043	250.637.843	2,16%

Sumber: Data diolah (2014)

b. Risiko Pasar

Risiko pasar disebut juga dengan *Sensitivity to Market Risk*. Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki oleh bank. Penelitian ini menggunakan *Interest Rate Risk* (IRR) sebagai indikator untuk mengukur risiko pasar. IRR merupakan hasil dari pembagian *Rate Sensitive Aset* (RSA) dengan *Rate Sensitive Liabilities* (RSL). Komponen-



komponen yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut:

**Tabel 11 Interest Rate Risk Bank Milik Pemerintah Pusat**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Rate Sensitive Aset (1)</b>	<b>Rate Sensitive Liabilities (2)</b>	<b>IRR <math>\frac{(1)}{(2)} \times 100\%</math></b>
Bank BRI	2011	440.581.186	403.181.281	109,28%
	2012	522.305.743	468.619.877	111,46%
	2013	589.329.593	520.737.199	113,17%
Bank Mandiri	2011	435.270.377	407.762.943	106,75%
	2012	509.637.173	466.195.573	109,32%
	2013	606.992.213	540.004.430	112,41%
Bank BTN	2011	78.600.773	73.896.674	106,37%
	2012	100.369.969	95.248.722	105,38%
	2013	118.630.137	112.392.622	105,55%
Bank BNI	2011	253.504.067	251.783.729	100,68%
	2012	284.367.074	279.049.157	101,91%
	2013	330.140.226	326.261.206	101,19%

Sumber: Data diolah (2014)

c. Risiko Likuiditas

Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas salah satunya adalah menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Risiko likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi liabilitas finansial secara tepat waktu, dan memelihara taingkat likuiditas yang memadai dan optimal.



**Tabel 12 Loan to Deposit Ratio Bank Milik Pemerintah Pusat**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Kredit (1)</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (2)</b>	<b>LDR <math>\frac{(1)}{(2)} \times 100\%</math></b>
Bank BRI	2011	269.454.726	337.559.207	79,82%
	2012	336.081.042	376.898.760	89,17%
	2013	419.144.730	410.179.866	102,19%
Bank Mandiri	2011	298.988.258	325.430.013	91,87%
	2012	370.570.356	394.749.940	93,87%
	2013	450.634.798	454.310.401	99,19%
Bank BTN	2011	62.619.586	35.771.455	175,05%
	2012	80.430.049	44.541.680	180,57%
	2013	99.330.214	51.136.707	194,24%
Bank BNI	2011	163.533.423	190.787.503	85,71%
	2012	200.742.305	257.311.801	78,02%
	2013	250.637.843	291.555.798	85,97%

Sumber: Data diolah (2014)

## 2. Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

### a. Bank BRI

#### 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember 2011 adalah enam orang. Komisaris Independen BRI berjumlah tiga orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 26 kali selama tahun 2011. Pelaksanaan program kerja selama tahun 2011 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut:

- a) Persetujuan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BRI Tahun 2011.
- b) Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis BRI 2011-2013 .
- c) Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BRI Tahun 2012.
- d) Persetujuan atas Rencana Bisnis BRI 2012-2014.
- e) Tambahan Penjelasan Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis BRI Semester I Tahun 2010.

f) Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis BRI Semester II Tahun 2010

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember 2012 adalah delapan orang. Komisaris Independen BRI berjumlah tiga orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Selama tahun pelaporan 2012, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 43 kali dengan pelaksanaan program kerja selama tahun 2012 menghasilkan beberapa persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Persetujuan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BRI Tahun 2012.
- b) Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2012-2014.
- c) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri Direksi BRI.
- d) Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank BRI Semester I Tahun 2012.
- e) Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013, dan lain-lain.

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember 2013 adalah delapan orang. Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan program kerja selama tahun 2013 menghasilkan beberapa hal berikut antara lain, (1) Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2014, (2) Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2014-2017 PT. BRI (Persero), Tbk., (3) Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2013, dan lain-lain.

## **2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Anggota Direksi BRI berjumlah sebelas orang yang secara mayoritas telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank lebih dari lima tahun. Seluruh anggota Direksi BRI berdomisili di Indonesia dan seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*). Direksi BRI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

- a) Umum, (1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Bank, (2) Direksi bertanggung jawab mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

- b) Khusus, (1) Penetapan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, (2) Memastikan pelaksanaan keputusan yang dibuat pada RUPS, (3) Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya.

Jumlah anggota Direksi BRI ditahun 2012 sebanyak sebelas orang. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. Selama tahun 2012 Direksi BRI telah melaksanakan rapat sebanyak 46 kali dan menghasilkan beberapa hal, diantaranya adalah:

- a) Evaluasi kinerja Kanwil seluruh Indonesia terkait pengembangan bisnis UMKM.
- b) Penilaian kinerja kantor cabang tahun 2012.
- c) Putusan kredit debitur bisnis komersil, dan lain sebagainya.

Anggota Direksi BRI tahun 2013 berjumlah sebelas orang yang secara mayoritas telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank lebih dari lima tahun. Materi rapat direksi untuk tahun 2013 yang telah dilaksanakan beberapa diantaranya adalah, persiapan RUPS 2013, persyaratan kredit medium dan korporasi, Kinerja Triwulan I BRI tahun 2013, pertemuan direksi dengan BI, dan lain sebagainya.

### 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### Komite dibawah Dewan Komisaris:

- a) Komite Audit. Selama tahun 2011 Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Committee Audit Charter*). Selama tahun 2012, dalam menyelenggarakan pertemuan dengan unit kerja, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terutama berkaitan dengan pengendalian intern dan manajemen risiko Perseroan. Komite Audit telah melaksanakan program kerjanya selama tahun 2013 sehubungan dengan kegiatan internal dan eksternal.
- b) Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Tanggal 03 Agustus 2011, Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan kebijakan remunerasi. Agenda Rapat KNR Pada awal tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan dan tindak lanjut dari Rencana Kerja dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disusun di akhir tahun 2011, agar tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Selama tahun 2013, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan, diantaranya mencakup, (1) Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2013, (2) Bersama-sama dengan Komite

Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2013, (3) Melakukan *review* dan kajian atas Remunerasi Direksi dan Komisaris.

- c) Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR). Selama tahun 2011, KPMR telah melakukan rapat, baik internal KPMR maupun bersama-sama dengan Divisi atau Unit Kerja yang terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko. Selama tahun 2012, KPMR telah melakukan rapat, baik internal KPMR maupun bersama-sama dengan Divisi atau Unit Kerja yang terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko. Selama tahun 2013, Komite Pengawasan Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut diantaranya, (1) Menyusun rencana dan program kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko, (2) Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2012, (3) Melakukan *review* dalam rangka pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

**Komite dibawah Direksi:**

- a) Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee* (RMC). Agenda RMC sepanjang tahun 2011 mencakup, (1) Pembahasan Tindak

Lanjut RMC sebelumnya, (2) Profil Risiko, (3) Pembahasan *Risk Issue* dalam profil 8 jenis risiko, (4) Pemantauan Risiko, (5) Analisa Permodalan, (6) Implementasi BASEL dan Manajemen Risiko, (7) Pendidikan dan Sosialisasi Manajemen Risiko, (8) Rekomendasi dan Putusan. Frekuensi Rapat dan Pelaksanaan RMC dan Sub-RMC untuk tahun 2012 RMC diselenggarakan sebanyak tiga belas kali. Tingkat kehadiran dalam setiap pertemuan RMC telah memenuhi ketentuan kuorum yakni dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota tetap, termasuk 3 Direktur yang salah satunya Direktur Kepatuhan. Beberapa agenda yang telah dilaksanakan RMC di tahun 2013 adalah, (1) Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan I-2013, (2) Pembahasan *issue* (CASA, *classified loan*, *employee awareness* terhadap fraud), (3) Analisa Permodalan dan *stress test*, (4) Rekomendasi dan Putusan RMC.

- b) Komite Aset dan Liabilitas (*Assets and Liabilities Committee/ALCO*). *Asset-Liability Committee* (ALCO) adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam mengelola Aset dan Liability BRI secara terpadu, menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman, menentukan kebijakan mismatch, netopen position dan risiko suku bunga. Frekuensi Rapat ALCO Selama tahun 2012 ALCO telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 12 kali. Rapat biasanya dilakukan pada minggu ke empat setiap bulan. Agenda rutin rapat ALCO adalah Evaluasi Kinerja *Asset & Liability*, *Market Review*, Analisis Perkembangan Saham BRI, Analisis Perkembangan *Fee Based Income*, Presentasi Kinerja Kanwil, Penyampaian Rekomendasi *Asset & Liability Management*, Putusan Rapat ALCO. Agenda rutin setiap rapat

ALCO untuk tahun 2013 antara lain, (1) Presentasi *Asset & Liabilities Management*, (2) *Market Review*, (3) Perkembangan Harga Saham BRI, dan (4) Rekomendasi.

c) Komite Kebijakan Kredit (KKP). Komite yang membantu Direksi BRI dalam merumuskan kebijakan perkreditan dan memberikan saran-saran perbaikan terkait kebijakan perkreditan. Realisasi Program Kerja KKP Sepanjang tahun 2011, realisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi Kredit. Terkait pelaksanaan rapat KKP dengan agenda pembahasan revisi kebijakan umum perkreditan BRI, telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi BRI No. S.140-DIR/ADK/12/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum Perkreditan BRI revisi ke-6. Sepanjang tahun 2013, tidak terdapat agenda rapat KKP dikarenakan tidak ada perubahan dalam kebijakan perkreditan

d) Komite Kredit. Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi. Rapat Komite Kredit dilakukan apabila diperlukan putusan kredit baru maupun perpanjangan kredit. Untuk putusan Komite Kredit BRI dilakukan dengan asas majority. Tahun 2012 Komite Kredit BRI telah memberikan 238 putusan kredit. Agenda pertemuan Komite Kredit tahun 2013 adalah:

1. Memberikan putusan kredit dengan besaran tertentu sesuai dengan limit kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Komite.

2. Mendapatkan pemecahan permasalahan lainnya yang memerlukan putusan oleh KKP.
- e) Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi (*Information System and Technology Steering Committee/ITSC*). ITSC merupakan komite yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi tentang kebijakan, pengembangan, dan implementasi teknologi dan sistem informasi BRI. Selama tahun 2011 sampai dengan 2013 Program kerja ITSC adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan terhadap materi yang diagendakan dalam pertemuan komite. Setiap rapat ITSC telah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan IT BRI dan pembahasan masalah sesuai agenda masing-masing rapat.
  - f) Komite Pengarah *Project Management Office (PMO) Steering Committee* PMO. PMO *Steering Committee* mempunyai peran dalam memberikan arahan strategis dalam pengelolaan proyek. Selama tahun 2012 setiap rapat ITSC telah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan IT BRI dan pembahasan masalah sesuai agenda masing-masing rapat. Rapat tersebut Direksi memberikan pengarahan mengenai strategi khususnya terkait pengembangan *e-channel* tertentu yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih. Dalam menjalankan fungsinya, PMO *Steering Committee* melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan bertanggungjawab kepada Direksi BRI. Agenda kerja PMO untuk tahun 2013 lalu adalah, (1) Laporan Perkembangan Proyek 2013, (2) Usulan Proyek Tahun 2013, (3) Permohonan Putusan PMOSC Meeting.

- g) Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, obyektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia. Selama tahun 2012, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat bidang kebijakan sebanyak 9 kali dan bidang operasional sebanyak 13 kali dengan persentase kehadiran anggota komite 100%. Agenda rapat yang dibahas berkaitan dengan bidang kebijakan SDM seperti topik, (1) ketentuan insentif jangka pendek tahun 2012, (2) perubahan peraturan dana pensiun BRI, (3) Kebijakan umum manajemen SDM, dan lain sebagainya. Selama tahun 2013 tidak terdapat kegiatan maupun program kerja Komite. Selama tahun 2013, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat bidang kebijakan sebanyak lima kali dan bidang operasional sebanyak delapan kali dengan persentase kehadiran anggota komite 100%.
- h) Komite Evaluasi Jabatan. Komite Evaluasi Jabatan adalah suatu komite yang bertugas melakukan *review* dan merekomendasikan Golongan Jabatan yang diusulkan oleh Tim Evaluasi Jabatan. Tahun 2012, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2012 Komite Evaluasi Jabatan melaksanakan satu kali rapat dengan agenda berupa presentasi hasil Evaluasi Jabatan oleh Tim Evaluasi Jabatan yang telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Jabatan pada tanggal 6 – 8 Juni 2012. Selama tahun 2013, Komite Evaluasi Jabatan telah melaksanakan dua kali rapat dengan tingkat kehadiran sebesar 100%, dengan agenda pelaporan hasil Tim Evaluasi Jabatan bersama konsultan dan revisi atas pertemuan sebelumnya.

#### 4) Penanganan Benturan Kepentingan

Selama tahun 2011 Direktur Kepatuhan beserta jajaran Divisi Kepatuhan telah melakukan pengujian prinsip kehati-hatian terhadap rencana putusan dan rencana kebijakan Direksi baik di bidang perkreditan maupun non perkreditan. Ketentuan mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut telah diatur secara internal dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. S. 104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selama tahun 2012 dan 2013, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank, sebagaimana didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang “Benturan Kepentingan”.

#### 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pengembangan Fungsi Kepatuhan diarahkan untuk dapat berperan sebagai management tools yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan bisnis dan operasional bank yang *prudent* (memenuhi prinsip kehati-hatian), sehat dan transparan. Terkait dengan perannya tersebut, maka di tahun 2011 diperlukan strategi untuk mensinergikan antara fungsi kepatuhan Bank dengan fungsi bisnis Bank, yang dituangkan dalam 3 pilar, yakni:

- a) Penerapan Prinsip Kehati-hatian.
- b) Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

- c) Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No. 13/2/PBI/2012 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BRI dalam hal ini Direktur Kepatuhan pada tahun 2012 menyampaikan pelaksanaan tugasnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13 Penyampaian Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan**

Bulanan	disampaikan oleh Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tindakan Komisaris dan Audit Intern
Semesteran	disampaikan oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dengan tindakan Komisaris

Sumber: *Annual Report* (Data diolah, 2014)

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan BRI sebanyak 4 (empat) kali. Seluruh pekerja BRI bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Pada tahun 2013 sebagai lanjutan program di akhir tahun 2012 telah dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh unit kerja BRI yang bertujuan untuk memperkuat Budaya Kepatuhan di BRI. Selain itu, bagi pembekalan dan internalisasi kepatuhan untuk program pengembangan staff BRI dilakukan melalui metode *in class training*.

**6) Penerapan Fungsi Audit Intern**

Unit kerja yang diprioritaskan untuk diaudit (regular audit) pada tahun 2011 sejumlah 3.310 unit kerja atau 60% dari total unit kerja BRI. Sampai dengan



akhir tahun 2011, Audit Intern BRI telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada 4.007 unit kerja atau mencapai 121,06% dari target penugasan audit dan telah melaksanakan penugasan audit sejumlah 413 kegiatan serta fraud audit sejumlah 17 kegiatan. Secara periodik Audit Intern melaksanakan kegiatan onitoring terhadap perkembangan tindak lanjut perbaikan pengendalian intern yang telah dilakukan oleh auditee untuk selanjutnya diberikan opini "Memadai" atau "Tidak Memadai" atas tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan auditee.

Uraian pelaksanaan tugas audit Untuk tahun 2012, BRI memprioritaskan pelaksanaan audit terhadap 3.463 unit kerja atau 62% dari total Sampai dengan 31 Desember 2012, Audit Intern BRI telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada 6.442 unit kerja atau mencapai 186,02% dari target penugasan audit dan telah melaksanakan penugasan audit khusus sebanyak 2.092 kegiatan serta fraud audit sejumlah 12 kegiatan. Tahun 2013, BRI memprioritaskan pelaksanaan audit terhadap 3.463 unit kerja atau 62% dari total unit kerja BRI. Audit Intern BRI telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada 3.867 unit kerja atau mencapai 111,67% dari target penugasan audit dan telah melaksanakan penugasan audit khusus (*special audit*) sejumlah 813 kegiatan serta fraud audit sejumlah 6 kegiatan.

#### **7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Pengawasan terhadap BRI, selain dilaksanakan oleh auditor internal BRI juga dilaksanakan oleh auditor eksternal diantaranya oleh Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tahun 2011 BRI telah menunjuk KAP yang terdaftar di Bank Indonesia, Bapepam-LK dan Departemen Keuangan yakni KAP Purwantono, Suherman dan Surja (*Ersnt and Young*). KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit di tahun 2011 dan *management letter* kepada Bank dengan tepat waktu.

Khusus untuk KAP, Dewan Komisaris BRI sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh RUPS Tahunan BRI tahun 2012 pada tanggal 28 Maret 2012, telah menunjuk KAP Purwantono, Suherman dan Surja - *Ernst and Young* (PSS-EY), salah satu dari 4 (empat) KAP berskala internasional (*The Big Four*) untuk melakukan audit atas laporan Keuangan BRI tahun buku 2012. Sesuai keputusan RUPS tertanggal 28 Februari 2013, BRI berdasarkan surat Dewan Komisaris No B.101-KOM/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penetapan KAP General Audit Laporan Keuangan BRI telah menunjuk KAP Purwantono, Suherman dan Surja-*Ernst and Young* (PSS-EY), untuk melakukan audit atas laporan Keuangan BRI tahun buku 2013.

#### **8) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Tahun 2011 Direksi BRI telah menetapkan Filosofi Risiko BRI sebagai dasar dari strategi penerapan manajemen risiko BRI untuk pengembangan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi. Filosofi tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu, (1) integritas, (2) profesionalisme, (3) prinsip kehati-hatian, dan (4) peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Pengelolaan risiko tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum dan juga sesuai dengan ketentuan Basel III. Penerapan Manajemen Risiko tahun 2013 meliputi:

- a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c) Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian Internal Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) serta Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR).

**9) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposures*)**

BRI menerapkan prinsip "*four-eyes principle*". Berikut jumlah total debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi 31 Desember 2011:

**Tabel 14 Penyediaan Dana Bank BRI Tahun 2011**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Nominal (dalam Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	809.930
2.	Kepada Debitur Inti	
	a. Individual	31.584.971
	b. Group	32.993.894

Sumber: Annual Report (Data diolah, 2014)

Posisi Desember 2012 adalah 16,15% (perbandingan penyediaan dana untuk Top 25 debitur (inti) dengan total pinjaman) dan 0,66% (perbandingan penyediaan dana untuk pihak terkait dengan total pinjaman). Total pinjaman kepada Top 25

debitur (inti) sebesar Rp54,65 miliar, total pinjaman kepada pihak terkait sebesar Rp2,23 miliar dan total pinjaman posisi Desember 2012 adalah sebesar Rp338,45 miliar.

Penyediaan dana dengan besaran minimal Rp1 triliun dan atau berdasarkan pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi, maka putusan penyediaan dana tersebut harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan besaran tersebut berlaku baik untuk debitur tunggal, grup, inti plasma maupun debitur BUMN atau pemerintah. Posisi Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) 31 Desember 2013:

**Tabel 15 Penyediaan Dana Bank BRI Tahun 2013**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Nominal (dalam Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	2.240.337
2.	Kepada Debitur Inti	
	a. Individual	42.315.576
	b. Group	70.583.992

Sumber: *Annual Report* (Data diolah, 2014)

#### 10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

BRI telah menyampaikan seluruh informasi keuangan dan non keuangan setiap tahunnya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di *website* BRI, BI dan BUMN *online* dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## 11) Rencana Strategis Bank

Rencana strategis BRI untuk tahun 2011 bertema “Manajemen Risiko yang Handal”. Perencanaan Perusahaan dibagi dalam perencanaan jangka pendek satu tahun yang dituangkan dalam anggaran tahunan, perencanaan jangka menengah tiga tahunan yang dituangkan dalam *Business Plan* serta perencanaan jangka panjang lima tahunan yang dituangkan dalam *Corporate Plan*. Tema tahunan rencana strategis BRI untuk tahun 2012 adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Rencana pengembangan ke depan yang dituangkan pada tahun 2012 adalah untuk lebih efektif dalam pengimplementasikan *Whistleblowing system* (WBS-BRI), dilakukan beberapa rencana pengembangan antara lain:

- a) Sosialisasi baik internal maupun eksternal lebih ditingkatkan dengan penyampaian informasi keberadaan WBS di setiap unit kerja operasional dan juga melalui media massa.
- b) Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan sistem pelaporan WBS-BRI.

Tahun 2013 tema tahunan yang menjadi sasaran adalah “Menjadi Bank terbaik di Indonesia dengan Praktik-Praktik Good Corporate Governance (GCG)”. Fokus bisnis yang secara konsisten dikembangkan adalah segmen UMKM dengan menerapkan strategi *selective growth* melalui ekspansi bisnis berbasis strategi *market penetration*, *market development* dan *product development* untuk meningkatkan *fee based income* dan meraih pertumbuhan terbaik di segmen UMKM.

**b. Bank Mandiri****1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.**

Anggota Dewan Komisaris berjumlah tujuh orang dimana empat diantaranya merupakan Komisaris Independen. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi.
- b) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS dan atau RUPS Luar Biasa.
- c) Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.

Sejak penutupan RUPS tanggal 2 April 2013, anggota Dewan Komisaris berjumlah delapan orang dimana empat diantaranya merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan Program Kerja Dewan Komisaris selama tahun 2013 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan atas implementasi kebijakan strategis bank (*corporate plan*) 2010-2014.
- b) Persetujuan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bank Mandiri Tahun 2013.
- c) Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2013-2015.



- d) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Mandiri Semester II Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013.

## 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Anggota Direksi berjumlah sebelas orang, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya:

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- b) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat
- c) Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan pasar dengan mendorong business unit memasarkan produk dan jasa dengan lebih dinamis dan kompetitif, dengan pengkajian yang komprehensif dari unit *risk*.

## 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

### Komite dibawah Dewan Komisaris

- a) Komite Audit. Selama tahun 2012 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan – *Pricewaterhouse Coopers* (KAP TWR -PwC) yang

membahas mengenai Perkembangan Hasil Audit laporan Keuangan Bank Mandiri per 31 Desember 2011.

2. Melakukan pertemuan dengan *Procurement & Fixed Asset Group* membahas mengenai Pelaksanaan *Purchasing Efficiency and Effectiveness Enhancement Project* (PEEEP).
3. Melakukan pertemuan dengan *Accounting Group* untuk membahas mengenai perkembangan Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2012.

Selama tahun 2013 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain, (1) Melakukan pembahasan dan menyetujui perkembangan NPL *Consumer Loans dan Consumer Card*, (2) Melakukan pembahasan dan menyetujui Hasil *Collection*, (3) Melakukan pembahasan Temuan-temuan Signifikan Triwulan IV/2012, (4) Melakukan pembahasan Kasus Fraud Triwulan IV/2012, dan (5) Melakukan pembahasan dan menyetujui Perkembangan mengenai Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Lap. Keu. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. tahun buku 2013.

- b) Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan antara lain, melakukan evaluasi kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, pembahasan atas kajian *salary survey*, dan pembahasan rekomendasi anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri. Selama tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan antara lain sebagai berikut, *Talent Pool*, pelaksanaan *Fit & Proper* Calon Komisaris dan Direksi Bank Mandiri, penilaian kinerja

Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., pembahasan tindak lanjut RUPS tahun 2013 tentang rekomendasi, uji kelayakan dan kepatutan di BI, dan paket Remunerasi *Profesional Executive*.

- c) Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance*. Selama tahun 2012 Komite Pemantau Risiko dan GCG telah mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang dianggap relevan dalam masalah risiko yang dibahas, diantaranya, melakukan pembahasan mengenai perkembangan likuiditas Bank Mandiri dan posisi trading, melakukan pembahasan mengenai *Risk Profile* Bank Mandiri dan konsolidasi dengan perusahaan anak berdasarkan *Risk Based Bank Rating*, dan melakukan pembahasan mengenai progress report SBU.

Selama tahun 2013 Komite Pemantau Risiko dan GCG telah mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang dianggap relevan dalam masalah risiko yang dibahas, diantaranya:

1. Hal-hal atau temuan penting selama Q4 2013
2. Risk Profile BM dan konsolidasi dengan perusahaan anak Q4 2013
3. Posisi Likuiditas (USD & IDR) dan proyeksi 12 bulan kedepan

#### **Komite dibawah Direksi**

- a) *Risk and Capital Committee* (RCC), RCC adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian sesuai bidang tugas masing-masing sub komite. *Risk & Capital Committee* (RCC) terdiri atas empat sub komite yaitu:

1. *Risk Management Committee (RMC)*. RCC-RMC Adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas dan merekomendasikan perubahan kebijakan management Risiko dan melakukan perubahan bersifat strategis dalam ruang lingkup Risk Management Pada tahun 2013 (periode Januari 2013 – 6 Mei 2013) RCC-RMC telah melakukan pembahasan hal-hal sebagai berikut, melakukan review Limit VaR tahun 2013, melakukan review Limit Delta Option 2013, dan melakukan review KMRBM tahun 2013.
  2. *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*. RCC-ALCO adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan, strategi dan batasan-batasan pengelolaan assets and liabilities
  3. *Capital and Investment Committee (CIC)*. RCC-CIC adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan membahas dan merekomendasikan kebijakan dan strategi serta batasan-batasan pengelolaan perusahaan anak.
  4. *Operational Risk Committee (ORC)*. RCC-ORC adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menyusun, membahas dan merekomendasikan kebijakan operasional Bank Mandiri, kebijakan transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi Nasabah.
- b) *Retail & Support Executive Committee (RSEC)*, adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi produk dan pengembangan atau aktifitas dalam bidang retail meliputi Micro and Retail Banking, Consumer Finance and Bussiness Banking serta

menetapkan standarisasi dan strategi terkait ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, general services and real estate yang bersifat bankwide. Pada tahun 2012 RSEC telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan Produk atau Aktivitas Baru (PAB).
2. Memberikan persetujuan dan arahan atas usulan Penutupan Mandiri *Travelers Cheque* (MTC).
3. Menyampaikan arahan atas Pengembangan Bisnis Kredit KLN Dili dan Laporan Efektivitas Iklan Triwulan I Tahun 2012.

c) *Wholesale Executive Committee* (WEC). WEC adalah sub komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi menetapkan strategi produk dan pengembangan atau aktifitas dalam bidang wholesale yang meliputi *Corporate Banking, Comercial Banking, Treasury, Financial Instituondan Special Asset Management*. Pada tahun 2012, *wholesale executive committee* telah menetapkan berbagai hal termasuk, (1) Menyetujui Manual Produk *Distributor Financing*, (2) Menyetujui laporan PAB Mandiri e-FX ke Bank Indonesia, (3) Menyetujui Manual Produk Mandiri *Confirmed LC/SBLC/SKBDN*, (4) Menyetujui Manual Produk Mandiri *Forfaiting*, (5) Menyetujui Manual Produk Mandiri Giro, dan (6) Menyetujui Manual Produk Mandiri *Cash Management*. Pada tahun 2013 (periode Jan – 27 Mei 2013), *Wholesale Executive Committee* telah menetapkan berbagai hal termasuk, konversi SE ke MP *Product Immediate Cash*, konversi SE ke MP *Product e-Biz Card*, PAB mandiri *e-tax*, konversi SE ke MP *Product Shipping*

*Guarantee*, konversi SE ke MP *Product UPAS*, dan manual produk *Receivables Financing*.

d) *Human Capital Policy Committee (HCPC)*. Pada tahun 2012 *human capital policy committee* telah melakukan hal-hal sebagai berikut, melakukan pembahasan terkait Fasilitas Kesehatan Pegawai Aktif, melakukan pembahasan Standar Prosedur Penggunaan Jasa Alih Daya, melakukan pembahasan Remunerasi Perusahaan Anak, dan melakukan pembahasan Kebijakan Tunjangan Lokasi. *Human Capital Policy Committee* adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/171/2013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *human capital* Perseroan.

e) *Information Technology Committee*. Pada tahun 2012 *IT committee* telah melakukan hal-hal sebagai berikut, (1) Review Anggaran Inisiatif IT 2012, (2) Review Pelaksanaan proyek *e-Money online*, (3) Persetujuan atas Usulan Anggaran Inisiatif Strategis IT Baru 2012 terkait peningkatan kapasitas infrastruktur IT, (4) Persetujuan atas Anggaran Inisiatif IT 2013. *Information Technology Committee* adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/172/2013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan ISP, *IT strategic project* dan strategi pengamanan IT;

f) *Credit Committee*

Setiap pemberian kredit di *segment wholesale* harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eye*

*principle* serta proses check and balance antara Bisnis Unit sebagai unit Inisiator dengan *Risk Management* selaku Unit Mitigasi Risiko. Dalam komite tersebut *Legal Group* dan *Compliance Group* juga harus selalu hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang objektif dan bebas tekanan.

g) *Business Committee*

*Business Committee* adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/174/2013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektifitas marketing communication dalam bidang *wholesale* dan *retail banking*.

h) *Capital & Subsidiaries Committee*

*Capital & Subsidiaries Committee* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan perusahaan anak, rekomendasi penyertaan modal dan divestasi serta remunerasi dan penetapan pengurus perusahaan anak

4) **Penanganan benturan kepentingan.**

Selama tahun 2011 hingga 2013, bank tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

## 5) Penerapan fungsi kepatuhan.

Komitmen Bank Mandiri dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penegakan prinsip kehati-hatian tersebut adalah bahwa seluruh jajaran Bank Mandiri mulai dari *Top Management* sampai dengan tingkat yang paling bawah, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di bidangnya masing-masing. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dilaksanakan dengan baik antara lain tercermin dalam (1) *Prudential Banking*, (2) *Good Corporate Governance*, (3) Risiko Kepatuhan, (4) Peningkatan Kompetensi *Compliance Officer*.

Seiring dengan perkembangan usaha Bank Mandiri yang semakin meningkat, maka eksposur risiko yang dihadapi juga akan semakin meningkat. *Compliance Group* dan *Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)* sebagai satuan kerja kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan senantiasa berupaya untuk menjaga, mengurangi dan memperkecil potensi risiko kegiatan usaha yang mungkin akan terjadi. Mengelola risiko kepatuhan Bank Mandiri telah melakukan langkah-langkah antara lain Merevisi Standar Pedoman Kepatuhan (SPKp), Membuat Petunjuk Teknis Kepatuhan (PTKp) *Compliance Risk Assessment (CRA)* serta membuat *Compliance Risk Assessment*. Sejalan dengan hal tersebut, Bank menetapkan Prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut :

- a) Bank selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (*mandatory*).

- b) Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Bank (*starts from the top*).
- c) Seluruh jajaran Bank bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

Sepanjang tahun 2011 hingga 2013 seluruh kebijakan yang diputuskan oleh Manajemen telah sesuai atau tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### **6) Penerapan fungsi audit intern.**

*Internal Audit* (IA) merupakan satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal merupakan *third line of defense* yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi bank. IA membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan *efektivitas internal control, risk management, dan governance process*. Dalam menjalankan fungsinya IA telah melaksanakan aliansi atas fungsi *assurance* yang ada di seluruh organisasi bank, termasuk perusahaan anak. Fokus Bank Mandiri secara keseluruhan seperti mendorong pencapaian bisnis, *service*, efisiensi biaya, penerapan azas kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan penerapan *good corporate governance*.

Rencana dan strategi jangka panjang Direktorat Internal Audit (DIA) 2010-2014 telah disusun selaras dengan fokus strategi Bank Mandiri tahun 2010–2014 dan setiap tahun terus dilakukan evaluasi serta penyempurnaan dalam rangka

meningkatkan efektivitas peran dan fungsi DIA. Strategi jangka panjang DIA tersebut telah ditetapkan dalam lima fokus strategi yaitu *Risk mapping*, *Continuous Auditing*, *Integrated/Combined Assurance*, *Enhancement RBA* dan *Internal Audit Capability Model*.

Sebagai respon atas strategi dan risiko bisnis yang dihadapi Bank Mandiri, perubahan lingkungan bisnis, hasil *Enterprise Risk Assessment* 2013 serta ekspektasi manajemen (masukan dari direktorat), Internal Audit telah menetapkan prioritas risiko yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan audit 2013. Hal ini sejalan dengan pendekatan *risk based audit* yang diterapkan oleh Internal Audit, yaitu untuk memastikan efektivitas control, pengelolaan risiko dan *governance* atas risiko yang dinilai tinggi. Enam risiko yang menjadi fokus utama audit tahun 2013 (top 6 risk) adalah : *Information Technology*, *Competitor*, *Default*, *Fraud*, *Reputation* dan *Human Resources*. Internal audit juga melakukan audit untuk tiga risiko lainnya yaitu *interest rate risk*, *compliance risk* dan *strategic risk*.

#### **7) Penerapan fungsi audit ekstern**

Pengawasan oleh eksternal auditor dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik. Internal Audit bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan efektivitas atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihakdiarahkan sesuai dengan peran IA dalam mengawal tercapainya Visi Bank

Mandiri melalui tiga fokus strategi utama di bidang *wholesale transaction, retail payment & deposit* dan *retail finance*.

Hasil Temuan Audit Hasil audit umum dapat dikelompokkan menjadi lima permasalahan pokok, yaitu Bidang Perkreditan, Kantor Pusat, Teknologi Informasi, Jaringan Distribusi (Cabang, KP Pembina Sistem dan Produk), Afiliasi (Perusahaan Anak & atau terafiliasi). Penetapan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2011 hingga tahun 2013.

**8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.**

Bank Mandiri menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang diantaranya adalah:

- a) Bank melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Terdapat penetapan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
- c) Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- d) Terdapat prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan.
- e) Bank melakukan kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank yang dapat ditingkatkan

frekuensi/intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko

- f) Satuan kerja audit intern melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.

Tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern di Bank Mandiri dilaksanakan menyeluruh di segala lini (*3 layer of defense*) dan di seluruh tingkatan, sebagai berikut:

- a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- b) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
- c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Secara eksternal, evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh auditor eksternal maupun auditor Bank Indonesia. Secara khusus di tahun 2013, Bank Mandiri menugaskan konsultan eksternal bertaraf internasional untuk melakukan *review* terhadap implementasi Basel II dan *Enterprise Risk Management* (ERM) di Bank Mandiri.

- 9) **Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar selama tahun 2011 hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 16 Penyediaan Dana Bank Mandiri Tahun 2011-2013**

<b>Tahun 2011</b>		
<b>Penyediaan Dana</b>	<b>Debitur</b>	<b>Nominal (Jutaan Rupiah)</b>
Kepada Pihak Terkait	14	3.147.877
Kepada Debitur Inti		
a. Individu	2	10.741.370
b. Group	23	57.844.195
<b>Tahun 2012</b>		
<b>Penyediaan Dana</b>	<b>Debitur</b>	<b>Nominal (Jutaan Rupiah)</b>
Kepada Pihak Terkait	13	4.061.623
Kepada Debitur Inti		
c. Individu	2	12.138.158
d. Group	23	70.516.289
<b>Tahun 2013</b>		
<b>Penyediaan Dana</b>	<b>Debitur</b>	<b>Nominal (Miliar Rupiah)</b>
Kepada Pihak Terkait	445	6.168
Kepada Debitur Inti		
a. Individu	3	14.900
b. Group	22	107.635

Sumber: *Annual Report* (Data diolah, 2014)

**10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.**

Bank Mandiri memfasilitasi akses informasi dan data perusahaan kepada publik melalui Mandiri *Call Center* 62-21 5299 7777, 1400, *website* perusahaan: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id), *website Investor Relations*: [ir.bankmandiri.co.id](http://ir.bankmandiri.co.id), *email*: [ir@bankmandiri.co.id](mailto:ir@bankmandiri.co.id), media masa, *mailing list*, buletin pertemuan dengan analis secara berkala, dan atau melalui kantor cabang Bank Mandiri. Bank Mandiri telah menyampaikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di *website* Bank Mandiri, Bank Indonesia,

Bursa Efek Indonesia dan Portal Kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

#### **11) Rencana strategis Bank.**

Menghadapi berbagai tantangan kedepan yang semakin kompleks dan untuk dapat terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada seluruh Nasabah, Bank Mandiri memantapkan langkah melanjutkan proses Transformasi. Untuk melakukan proses transformasi lanjutan atau transformasi tahap kedua (2010-2014) tersebut, Bank Mandiri melakukan revitalisasi atas visinya. Visi jangka panjang Bank Mandiri di 2014 adalah *"To be Indonesia's most admired and progressive financial institution"*. Rumusan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Menjadi lembaga keuangan di Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif"

#### **c. Bank BTN**

##### **1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.**

Komposisi Dewan Komisaris dari 1 Januari 2011 sampai dengan 18 Mei 2011 berjumlah lima orang anggota dengan tiga diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti lebih dari 50% dari Komisaris yang ada. Komposisi Dewan Komisaris dari 19 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, terdiri dari enam anggota. Sepanjang tahun 2011, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 57 kali. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan bank oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan

Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, dalam rangka melaksanakan kepentingan bank dan atau sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis.

Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 51 kali dengan tingkat kehadiran. Komposisi Dewan Komisaris per 27 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 berjumlah enam orang anggota. Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 36 kali.

## **2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.**

Jumlah anggota Direksi Bank BTN adalah enam orang di tahun 2011. Pembagian bidang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu kepada “Pedoman Umum GCG”. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Sepanjang tahun 2012, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 105 kali, membahas berbagai persoalan dan atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi diantaranya, (1) Produk KPR subsidi dan KPR non subsidi, (2) Pemberian KPR dengan jangka waktu sampai dengan 25 tahun, (3) Peningkatan standar layanan nasabah, (4) Pengembangan bisnis bancassurance, (5) Pengembangan SDM di bidang manajemen risiko.

Sepanjang tahun 2013, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 138 kali, persoalan atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi diantaranya, (1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014, Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014-2016 serta Rencana Jangka

Panjang (RJP) 2013-2017, (2) Hasil assessment tingkat kesehatan bank dan profil risiko tahun 2012 dan 2013, dan sebagainya.

### 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

#### Komite dibawah dewan komisaris

- a) Komite Audit, Fungsi Utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan reviewsistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit, baik internal maupun eksternal serta mereview implementasi GCG. Komite Audit, Bank BTN terdiri dari lima orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan dibantu empat anggota Komite Audit lainnya.
- b) Komite Pemantau Risiko, pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko pada periode 2011, di antaranya adalah pemantauan atas pengendalian internal penyaluran kredit, pemantauan atas review Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PMKR) oleh Manajemen, dan pemantauan atas penghimpunan dana giro, tabungan dan deposito. Komite Pemantau Risiko, sepanjang tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak enam kali. Rapat Komite Pemantau Risiko adalah pertemuan untuk membahas laporan profil risiko dengan Direksi, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi terkait. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko pada periode Januari–Desember 2013, diantaranya adalah, membahas profil risiko posisi Desember 2012,

membahas risiko kepatuhan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, dan membahas kenaikan NPL.

- c) Komite Remunerasi dan Nominasi, sepanjang tahun 2011, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang mencakup beberapa hal, sebagai berikut, (1) Menyusun program kerja tahun 2011, yang meliputi penyusunan rekomendasi kebijakankebijakan yang terkait dengan remunerasi, nominasi dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, (2) Terkait kebijakan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai, pada tahun 2010.

Tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang mencakup beberapa hal, diantaranya terkait kebijakan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2012, dengan melakukan dan/atau memantau beberapa tahapan proses, sedangkan ditahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang mencakup beberapa hal, sebagai berikut, (1) Menyusun draft perubahan Piagam Komite, (2) Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2013.



### Komite dibawah Direktur

- a) Komite Manajemen Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut, Perbaikan dan penyempurnaan materi kebijakan manajemen risiko kredit dengan pendekatan yang lebih praktis/empirik, melakukan penambahan materi dalam PKMR berdasarkan praktik manajemen risiko bank yaitu, *stres testing* dan *review* metodologi penyusunan laporan profil risiko, dan perbaikan lain-lain yang ditujukan untuk memperbaiki standar dan sistematika
- b) Komite *Aset and Liability*, telah mengadakan rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut, (1) Menetapkan kebijakan dan strategi transaksi *Treasury*, dalam bentuk penerbitan Obligasi dan Sekuritisasi KPR, (2) Melakukan *review* dan penyesuaian terhadap suku bunga produk Dana dan Kredit, Nisbah produk pendanaan Syariah serta margindan bagi hasil pembiayaan Syariah, dan (3) Menetapkan langkah-langkah strategis bagi peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga, khususnya dana ritel dan optimalisasi pertumbuhan kredit.
- c) Komite Produk, sepanjang tahun 2011 hingga 2013, Komite Produk secara formal tidak melakukan Rapat Komite Produk dalam melakukan pengembangan produk, namun tugas dan fungsi Komite Produk telah digantikan dengan tahapan kegiatan pengembangan produk.
- d) Komite Personalia. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat yang telah diadakan menghasilkan berbagai keputusan, yang intinya, sebagai berikut:

1. Memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai kenaikan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2011 serta kebijakan pembayaran Jasa Produksi 2010.
  2. Menetapkan strategi dan kebijakan mengenai rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis bank.
  3. Memutuskan penilaian kinerja pejabat eksekutif, memutuskan pembagian jasa produksi 2011, dan menetapkan pegawai *pro hire* menjadi pegawai tetap
- e) Komite Pengarah Teknologi Informasi, telah mengadakan rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut, *Project Charter* 2013 & Metode Prioritisasi Inisiatif TI, *Capacity Core System* 2013-2017, dan memutuskan penilaian kinerja pejabat eksekutif.
- 4) Penanganan benturan kepentingan.**

Penanganan Benturan Kepentingan Bank BTN adalah sebagai berikut:

- a) Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:
  1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
  2. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai bank harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.

- b) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai bank dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain,
- c) Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
- d) Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Selama tahun 2011 hingga 2013, bank tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

#### **5) Penerapan fungsi kepatuhan.**

Dalam rangka memastikan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank BTN dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah Bank BTN telah melakukan langkah-langkah:

- a) Sosialisasi ketentuan eksternal yang baru diterbitkan oleh Regulator kepada unit kerja terkait, khususnya regulasi yang berkaitan dengan aktivitas dan produk perbankan baik Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah
- b) Memberikan kajian aspek kepatuhan terhadap draft peraturan internal yang akan diterbitkan bank, serta produk dan aktivitas baru yang akan diselenggarakan oleh bank.

- c) *Monitoring* terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas lain yang berwenang.
- d) *Review* pemeriksaan terhadap kesiapan operasional relokasi jaringan kantor (*outlet*) maupun pembukaan kantor baru melalui *compliance check list*.

Laporan Direktur Kepatuhan mengacu kepada ketentuan BI tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya, antara lain:

- a) Menyusun Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis bank guna mendorong dan atau memelihara Budaya Kepatuhan.
- b) Memastikan kesesuaian kebijakan, Sistem dan Prosedur Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memantau dan Mengelola Risiko Kepatuhan.
- d) Memantau dan Menjaga kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2012, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kepatuhan operasional dan bisnis Kantor Cabang.
- f) Melaksanakan aktivitas kepatuhan lainnya, yaitu Penerbitan Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*, Pengarahan Direktur Kepatuhan dan Direktur *Financial, Treasury, Logistic & Network* kepada Kantor Cabang serta koordinasi unit kontrol Bank BTN).

- g) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap perjanjian dan komitmen dengan pihak eksternal (Bank Indonesia dan lembaga otoritas lain yang berwenang)

**6) Penerapan fungsi audit intern.**

Sesuai dengan program kerja tahun 2011, sepanjang tahun buku 2011 pada periode 2011, *Internal Audit Division* (IAD) dalam melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan efektifitas bank yang memadai, yang mencakup lima komponen utama pengendalian yang satu sama lain saling berkaitan yaitu, Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition & Assesment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*).

Sepanjang tahun buku 2011 hingga 2013, telah dilakukan audit dengan *resume* kegiatan audit dapat disajikan melalui tabel, sebagai berikut:

**Tabel 17 Jumlah Temuan Audit Intern Bank BTN**

Jenis Audit	Jumlah Temuan		
	2011	2012	2013
General Audit – Kantor Cabang	1.555	1.743	1.589
General Audit – Kantor Cabang Syariah	494	491	336
General Audit – Kantor Pusat	174	161	127
Audit Teknologi Sistem Informasi	249	183	256

Sumber: *Annual Report* (Data diolah, 2014)

### 7) Penerapan fungsi audit ekstern.

Purwanto, Suherman & Surja - Ernst & Young telah melaksanakan audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Bank BTN (Persero) Tbk Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan telah menyampaikan management letter kepada Bank Indonesia secara tepat waktu di mana hasil audit dan management letter yang disampaikan telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan. Purwanto, Suherman & Surja - Ernst & Young sebagai Auditor yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dan Laporan PKBL Bank BTN ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Jasa General Audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Bank BTN (Persero) Tbk.

### 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Implementasi baru praktik Manajemen Risiko Bank BTN pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:

- a) Penilaian Profil Risiko yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dalam operasional bank.
- b) Bank BTN telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating*)

Pada periode 2012, *Internal Audit Division* (IAD) dalam melakukan pengujian dan evaluasi guna meningkatkan dan menyempurnakan efektifitas SPIN bank yang memadai, yang mencakup lima komponen utama pengendalian yang satu sama lain saling berkaitan. Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam

pertemuan pertemuan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite-Komite, IAD dan beberapa divisi terkait dapat dikatakan bahwa Bank BTN telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2013, sebagai berikut:

- a) Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran di Bank BTN.
- b) Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tahun 2013.
- c) Mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berupa RMS (*Risk Management Solution*)
- 9) **Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).**

Sepanjang tahun 2011 hingga 2013, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), dapat disampaikan, sebagai berikut Kepada Pihak Terkait.

**Tabel 18 Penyediaan Dana Bank BTN Tahun 2011-2013**

<b>Tahun 2011</b>		
<b>Penyediaan Dana</b>	<b>Debitur</b>	<b>Nominal (Jutaan Rupiah)</b>
Kepada Pihak Terkait	125	18.965
Kepada Debitur Inti		
a. Individu	-	-
b. Group	50	2.805.656
<b>Tahun 2012</b>		
Kepada pihak terkait	-	-
Kepada debitur inti		
a. Individu	41	2.341.739
b. Group	9	978.687

Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
<b>Tahun 2013</b>		
Kepada pihak terkait	50	3.975.758
Kepada debitur inti		
a. Individu	42	2.928.320
b. Group	8	1.047.438

Sumber: *Annual Report* (Data diolah, 2014)

#### 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholder's* untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui *website* ([www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)). Informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Center (021) 265 33555 atau *email* [admin@btn.co.id](mailto:admin@btn.co.id). Bagi investor dapat langsung menghubungi *Corporate Secretary* atau *Investor Relations* Perusahaan dengan mengirim email ke [investor\\_relations@btn.co.id](mailto:investor_relations@btn.co.id) atau telepon ke (62-21) 638 70142. Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan *Electronic Reporting* kepada Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

#### 11) Rencana strategis Bank.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi bank serta Rencana korporasi (*corporate plan*) bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Prospek bisnis di atas maka secara garis besar, pada tahun 2012, Direksi Bank BTN telah berupaya untuk menyusun dan meletakkan Kerangka Transformasi Jangka Panjang 2013-2017 yang diharapkan

dapat diimplementasikan melalui 4 pilar transformasi jangka panjang yaitu, (1) Pertumbuhan bisnis, (2) Membangun aliansi strategis, (3) Memperkuat organisasi dan budaya berbasis kinerja (4) Optimalisasi IT. Rencana Jangka Panjang Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional saat ini serta untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global dan nasional ke depan, dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014 – 2016, Bank BTN menitikberatkan pada transformasi bisnis, budaya kerja, dan infrastruktur yang didukung oleh implementasi GCG untuk pencapaian pertumbuhan bisnis yang berkualitas.

#### **d. Bank BNI**

##### **1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.**

Jumlah, komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Komisaris pertanggal 31 Desember 2011, 2012, dan 2013 adalah tujuh orang, dimana empat orang diantaranya adalah Komisaris Independen. Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah melakukan 47 kali rapat, termasuk diantaranya dua belas kali rapat gabungan dengan seluruh Direksi. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, pelaksanaan tugas tersebut meliputi:

- a) Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- b) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB.

- c) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya, serta lain sebagainya.

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan 46 kali rapat, termasuk diantaranya sebelas kali rapat gabungan dengan seluruh Direksi. Hal-hal berikut merupakan fokus pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2012:

- a) Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian rencana bisnis bank.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pencapaian rencana kerja setiap direktur sektor dan melakukan *review* atas kebijakan, strategi dan program kerja direktur sektor.
- c) Melakukan pengawasan dan pemantauan tingkat kesehatan bank serta mendorong Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam

Realisasi Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 46 kali yang meliputi rapat internal Dewan Komisaris serta rapat-rapat Dewan Komisaris yang dilakukan dengan mengundang seluruh anggota Direksi atau Direktur sektor terkait.

## 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Tahun 2011 Direksi telah menata kembali organisasi Direksi dan *Chief Business Risk Officer* melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KP/325/DIR/R tanggal 19 Oktober 2011 tentang Penataan Organisasi Direksi BNI, dengan pembagian bidang tugas yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan usaha BNI, Direktur bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang pengawasan intern, perencanaan strategis serta komunikasi perusahaan dan kesekretariatan. Pelaksanaan Rapat Direksi (Radisi) Radisi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Selama tahun 2011, Direksi telah menyelenggarakan Radisi sebanyak 61 kali yang membahas 129 agenda.

Jumlah anggota Direksi BNI per tanggal 31 Desember 2012 adalah 10 orang dan semuanya berdomisili di Indonesia. Selama tahun 2012, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 48 kali yang membahas 96 agenda. Jumlah anggota Direksi BNI per tanggal 31 Desember 2013 adalah sepuluh orang dan semuanya berdomisili di Indonesia. Selama tahun 2013, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 50 kali.

Pada tahun 2013, BNI telah melakukan penilaian kinerja bagi Direksi berdasarkan parameter kinerja kolegal dan kinerja individual/sektoral. Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Sistem penilaian kinerja bagi Direksi disusun oleh Direksi, dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. Sistem dimaksud akan terus disempurnakan sejalan dengan

perkembangan organisasi BNI. Hasil penilaian kinerja Direksi akan menjadi salah satu dasar pemberian remunerasi kepada masing-masing Direksi.

### 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

#### Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

##### a) Komite Audit. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 2011

Di tahun 2011 Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan termasuk laporan akhir tahun.
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan obyektivitas.
3. Membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai Pelaksanaan Tugas Komite Audit selama tahun 2011.

Selama tahun 2012 Komite Audit telah mengadakan 38, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite di tahun 2012 dan 2013 Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang ditentukan.

##### b) Komite Pemantau Risiko (KPR). Pelaksanaan realisasi rencana kerja komite tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 secara keseluruhan telah mencapai target/rencana yang telah ditetapkan, kecuali rencana evaluasi strategi kebijakan pengembangan budaya risiko melalui komunikasi yang baik antara manajemen dengan pegawai masih perlu ditindaklanjuti kembali sebagai program rencana Komite tahun 2012. Selama tahun 2012 KPR telah mengadakan 30 kali, KPR memiliki rencana kerja yang meliputi:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko triwulan dan tahun 2012 dengan input dari laporan Direksi.
2. Melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko.
3. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko BNI atas dasar laporan profil risiko dan *monitoring*.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPR dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2013 meliputi:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko triwulan IV tahun 2012 dan 2013 dengan input dari laporan Direksi.
  2. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko BNI.
  3. Melakukan monitoring portofolio kredit BNI secara periodik (triwulanan).
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi. Program kerja tahun 2011 serta Realisasinya Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2011 Komite Remunerasi dan Nominasi telah merealisasikan rencana kerja yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi tahun 2010.
  2. Menyempurnakan database kandidat Direksi dan atau Dewan Komisaris.
  3. Melakukan review Remunerasi Direksi dan Dewan.

Pelaksanaan realisasi Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2012 dan 2013 secara keseluruhan telah mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan.

### Komite dibawah Direksi

- a) Komite Risiko dan Kapital (KRK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/258/DIR/R tanggal 3 Agustus 2011 perihal Penataan dan Penyempurnaan. Komite Risiko dan Kapital. Selama tahun 2012, KRK bidang manajemen risiko telah mengadakan tujuh kali rapat dengan materi pembahasan sebagai berikut, (1) *review* metodologi profil risiko, (2) penilaian profil risiko BNI posisi Desember 2011, (3) *internal risk report* Januari 2012, dan (4) limit risiko konsentrasi.
- b) Komite Sumber Daya Manusia, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011 perihal Perubahan Komite Sumber Daya Manusia. Di sepanjang tahun 2012, Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai (TPMTP) telah mengadakan delapan kali rapat TPMTP untuk mengusulkan kandidat-kandidat yang akan mengisi posisi tenaga pimpinan di kantor besar, wilayah, cabang, sentra-sentra, baik yang bersifat mutasi/rotasi dan atau promosi. Selama tahun 2012, Tim Pertimbangan Sanksi Administratif (TPSA) telah melaksanakan sepuluh kali rapat TPSA untuk memberikan pertimbangan sanksi administratif terhadap kasus-kasus, baik kasus kredit maupun non kredit.
- c) Komite Manajemen Teknologi, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/201/DIR/R tanggal 14 Juni 2011 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi. Selama kurun waktu tahun 2012, Komite Manajemen Teknologi telah mengadakan dua kali rapat dengan materi pembahasan sebagai berikut:

1. Laporan hasil IT *assessment* atas sistem dan organisasi TI BNI.
  2. Update rencana pengembangan *Trade Finance*.
  3. Sinergi TI dengan Perusahaan anak
- d) Komite *Performance Management*, merupakan wadah pengelolaan *performance management* di BNI dengan tujuan utama memastikan keselarasan *strategic planning* dan emfasilitasi proses *target setting*. Komite *Performance Management* dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/029/DIR/R tanggal 8 Pebruari 2011 perihal Perubahan Komite Anggaran & Rencana Kerja (KAR) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selama kurun waktu tahun 2012, Komite *Performance Management* telah mengadakan dua kali rapat yaitu pada tanggal 1 dan 3 Oktober 2012 dengan materi pembahasan sebagai berikut:
1. Kebijakan Umum Direksi tahun 2013.
  2. *Setting Target* 2013.
- e) Komite Produk, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R tanggal 20 September 2012 perihal *Product Committee* (PRC) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sehubungan dengan pembentukan komite pada September 2012, maka direncanakan rapat akan dilaksanakan pada awal tahun 2013.
- f) Komite Anti Fraud, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/508/DIR/R tanggal 9 November 2012 perihal Pembentukan Komite Anti Fraud (KAF). KAF telah melaksanakan rapat perdana pada tanggal 29 November 2012 yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan *tools Know Your Employee* (KYE).
  2. Memberikan materi pelatihan atau sosialisasi baik melalui *in-class training* maupun *e-learning* yang komprehensif mengenai risiko, SAF dan GCG.
  3. Penandatanganan Komitmen Anti Fraud oleh segenap pegawai.
- g) Komite Manajemen Kinerja, merupakan wadah pengelolaan kebijakan pemantauan anggaran dan memperlancar proses manajemen kinerja di BNI untuk memastikan keselarasan *strategic planning*, memfasilitasi proses target setting dan penilaian kinerja. Komite Manajemen Kinerja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/466/DIR/R tanggal 5 Oktober 2012 perihal Perubahan *Performance Management Committee* (PMC) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan perubahan susunan keanggotaan berdasarkan Memo REN/2/509 tanggal 26 Juli 2013.
- h) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/168/DIR/R tanggal 26 April 2013 perihal Penataan Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang Beranggotakan Komite Prosedur Perkreditan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/169/DIR/R tanggal 26 April 2013 perihal Penataan Komite Prosedur Perkreditan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

#### 4) Penanganan benturan kepentingan.

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan Bank BNI dimuat dalam Credit Policy Committee (CPC), Buku Kode Etik BNI, Buku Budaya



Kerja 'Prinsip 46', Anggaran Dasar BNI dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) BNI/SOP BNI. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan BNI diharapkan dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BNI. Selama tiga tahun yakni, tahun 2011, 2012, dan 2013 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan BNI.

#### **5) Penerapan fungsi kepatuhan.**

Hubungan kerja Divisi Kepatuhan dengan unit organisasi lainnya adalah sebagai partner yang independen, baik dalam proses rancangan kebijakan maupun review kepatuhan terhadap aktivitas operasional lainnya. Perkembangan Kepatuhan 2011 Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan fungsi kepatuhan BNI pada tahun 2011 mengalami perubahan atau perkembangan dari yang sebelumnya metode pelaksanaan review terhadap kegiatan usaha atau aktivitas operasional Bank hanya bersifat kuratif (*expost*) menjadi reventif (*ex-ante*) dan kuratif (*ex-post*). Profil Risiko Kepatuhan BNI pada posisi 31 Desember 2013 menunjukkan bahwa kemungkinan kerugian BNI dari risiko kepatuhan inheren secara komposit

tergolong rendah dengan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan memadai.

**6) Penerapan fungsi audit intern.**

Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Hasil Audit Intern Tahun 2011

a) Ruang lingkup dan jenis audit atau konsultasi ruang lingkup kegiatan SPI mencakup pelaksanaan assurance dan konsultasi terhadap seluruh kegiatan BNI pada semua tingkatan manajemen BNI.

b) Metodologi Audit dan Konsultasi.

c) Realisasi Pelaksanaan Audit

Realisasi audit dan konsultasi sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 164 auditee (115, 49%). Realisasi Pelaksanaan Audit Berdasarkan Rencana Audit Tahunan (RAT) tahun 2012, target pelaksanaan audit dan konsultasi sebanyak 156 auditee dari total 314 auditee BNI, diluar audit pendalaman. Realisasi audit dan konsultasi sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 171 auditee (109,62%). Realisasi audit pada tahun 2013 mencapai 147 auditee (118%). Selama tahun 2013 SPI telah berhasil melaksanakan program kerja dan strategi, yaitu:

a) Mengimplementasikan metodologi audit sesuai perkembangan business model BNI.

b) Melaksanakan audit dengan pendekatan aktivitas atau produk terhadap bisnis korporasi, bisnis komersial dan usaha kecil, konsumen dan ritel, secara *end to end* pada *delivery channel* (cabang, sentra kredit) dan kantor wilayah serta divisi.

**7) Penerapan fungsi audit ekstern.**

Pelaksanaan audit Laporan Keuangan BNI Tahun Buku 2011, BNI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (PSS), yang mana KAP tersebut telah terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan akuntan publik tersebut tidak lebih dari lima tahun buku berturut-turut. Pemegang Saham memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penetapan KAP dimaksud.

Dewan Komisaris telah mereview dan menetapkan KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan (*Pricewaterhouse Coopers*) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan juga untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

**8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.**

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan manajemen risiko telah diatur dalam kebijakan umum manajemen risiko. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan Rapat Direksi Dewan Komisaris (Radikom) yang membahas beberapa hal terkait manajemen risiko, antara lain:

1. Evaluasi rencana kerja manajemen risiko (*Business Plan*).
  2. Memberikan rekomendasi atas usulan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
  3. Evaluasi penilaian *Operational Risk Self Assessment* (ORSA)
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).**

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menetapkan limit kredit atau penyediaan dana kepada individu maupun *group* debitur serta perusahaan atau pihak yang terkait dengan bank, serta memiliki kebijakan yang mengatur limit kredit per sektor industri. Manajemen memberikan perhatian terhadap pemberian kredit dalam jumlah besar antara lain yang menyangkut penyediaan dana kepada debitur melalui batas maksimum pemberian kredit (internal BNI dengan *house limit*), *loan exposure limit* dan *country exposure limit*. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK atas penyediaan dana kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait baik secara individual maupun *group* debitur.

- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.**

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan mengenai transparansi informasi Bank telah dapat diketahui

nasabah melalui sarana-sarana seperti *website* BNI, brosur atau *leaflet*, iklan *Above The Line* (ATL) dan *Below The Line* (BTL), *staterpack* maupun pengumuman yang dipasang atau disebar di kantor-kantor Cabang BNI.

### 11) Rencana strategis Bank.

1. Perusahaan menyusun rencana strategis bank untuk periode 5 tahun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) serta rencana strategis bank untuk periode 1 tahun yang disebut Rencana Bisnis Bank.
2. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun setiap tahun telah disusun dengan realistis, komprehensif, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) serta mempertimbangkan perubahan internal dan eksternal.
3. Rencana Korporasi dan Bisnis telah disusun secara periodik dengan jadwal pelaksanaan serta mekanisme penyusunan yang telah dibakukan dalam Buku Pedoman Perusahaan.
4. Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) kepada Pemegang Saham Pengendali melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta kepada segenap jenjang organisasi melalui forum-forum.
5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia.
6. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pemantauan dengan melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*).

Rencana Strategis Bank Kebijakan Bank di tahun 2013 adalah fokus pada upaya-upaya untuk melanjutkan pertumbuhan keuangan secara berkelanjutan sesuai dengan tahapan rencana jangka panjang. Pertumbuhan keuangan tersebut dicapai melalui kelanjutan program kerja tahun-tahun sebelumnya, yang dimulai dengan mempertajam fokus pada segmen Perbankan Bisnis dan Perbankan Konsumer dan Ritel dilanjutkan dengan membentuk sinergi antar kedua segmen tersebut dan pada akhirnya memperkokoh sinergi tersebut untuk menghasilkan keuntungan dan juga kualitas aset yang baik serta pendapatan non bunga yang meningkat dari transaksi nasabah yang berulang-ulang.

### 3. Faktor Rentabilitas (*earning*)

#### a. *Return On Asset* (ROA)

ROA adalah rasio laba terhadap rata-rata total aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Rasio ROA dihitung dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Semakin besar nilai dari rasio ROA menunjukkan kinerja suatu bank yang semakin baik. Komponen perhitungan ROA yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak dan rata-rata total aset selama tahun 2011 hingga tahun 2013, yakni:

**Tabel 19 *Return On Asset* Bank Milik Pemerintah Pusat**

Nama Bank	Tahun	Laba Sebelum Pajak (1)	Rata-rata Total Aset (2)	ROA $\frac{(1)}{(2)} \times 100\%$
Bank BRI	2011	15.296.501	469.899.284	3,26%
	2012	18.681.350	551.336.790	3,39%
	2013	19.916.654	626.182.926	3,18%

Nama Bank	Tahun	Laba Sebelum Pajak (1)	Rata-rata Total Aset (2)	ROA $\frac{(1)}{(2)} \times 100\%$
Bank Mandiri	2011	12.479.456	551.891.704	2,26%
	2012	16.256.581	635.618.708	2,56%
	2013	17.996.086	733.099.762	2,45%
Bank BTN	2011	1.026.201	89.121.459	1,71%
	2012	1.357.839	111.748.593	1,67%
	2013	1.443.057	131.169.730	1,63%
Bank BNI	2011	5.991.144	299.058.161	2,00%
	2012	7.202.604	333.303.506	2,16%
	2013	6.243.854	386.654.815	1,61%

Sumber: ICMD 2013 (Data diolah, 2014)

b. *Net Interest Margin* (NIM)

NIM adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Penelitian ini menilai aktiva produktif dengan menggunakan total aset yang diperoleh dari laporan keuangan bank, data yang terbatas menyebabkan peneliti belum dapat memisahkan dengan jelas aktiva produktif bank yang dapat menghasilkan bunga. Komponen perhitungan NIM yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 20** *Net Interest Margin* Bank Milik Pemerintah Pusat

Nama Bank	Tahun	Pendapatan Bunga Bersih (1)	Rata-rata Total Aktiva Produktif (2)	NIM $\frac{(1)}{(2)} \times 100\%$
Bank BRI	2011	34.427.076	339.157.587	10,15%
	2012	36.483.766	325.787.731	11,20%
	2013	44.106.271	421.543.671	10,46%
Bank Mandiri	2011	21.775.982	411.975.577	5,29%

Nama Bank	Tahun	Pendapatan Bunga Bersih (1)	Rata-rata Total Aktiva Produktif (2)	NIM $\frac{(1)}{(2)} \times 100\%$
Bank Mandiri	2012	27.530.592	484.906.787	5,68%
	2013	32.776.626	562.329.473	5,83%
Bank BTN	2011	3.574.809	67.543.003	5,29%
	2012	4.400.715	90.308.494	4,87%
	2013	5.277.599	108.567.598	4,86%
Bank BNI	2011	12.544.140	233.818.993	5,36%
	2012	14.597.852	265.509.993	5,50%
	2013	19.058.281	299.757.560	6,36%

Sumber: Data diolah (2014)

#### 4. Faktor Permodalan (*capital*)

Tingkat kesehatan bank dinilai dengan faktor permodalan berdasarkan modal yang dimiliki oleh bank. Modal yang dimiliki suatu bank memiliki fungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Sehubungan dengan modal yang harus dimiliki bank, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank Nomor 15/12/PBI/2013. Berdasarkan peraturan tersebut bank diwajibkan menyediakan modal minimum paling rendah sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Tingkat kesehatan permodalan suatu bank dapat diukur dengan menggunakan rasio *capital adequacy ratio* (CAR). CAR merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR. CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki suatu bank dan pemenuhan ketentuan KPM. Komponen perhitungan CAR pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 21 Capital Adequency Ratio Bank Milik Pemerintah Pusat**

Nama Bank	Tahun	Total Modal	ATMR	CAR
		(1)	(2)	$\frac{(1)}{(2)} \times 100\%$
Bank BRI	2011	41.815.988	279.602.642	14,96 %
	2012	55.133.677	325.352.028	16,95 %
	2013	69.472.036	408.858.393	16,99 %
Bank Mandiri	2011	53.325.871	352.519.994	15,34 %
	2012	61.947.504	400.189.948	15,48 %
	2013	73.345.421	491.276.170	14,93 %
Bank BTN	2011	6.968.366	46.373.034	15,03 %
	2012	9.433.162	53.321.389	17,69 %
	2013	10.353.005	66.261.700	15,62 %
Bank BNI	2011	32.691.914	185.403.030	17,63 %
	2012	40.806.866	246.884.510	16,53 %
	2013	44.910.260	300.940.811	15,1 %

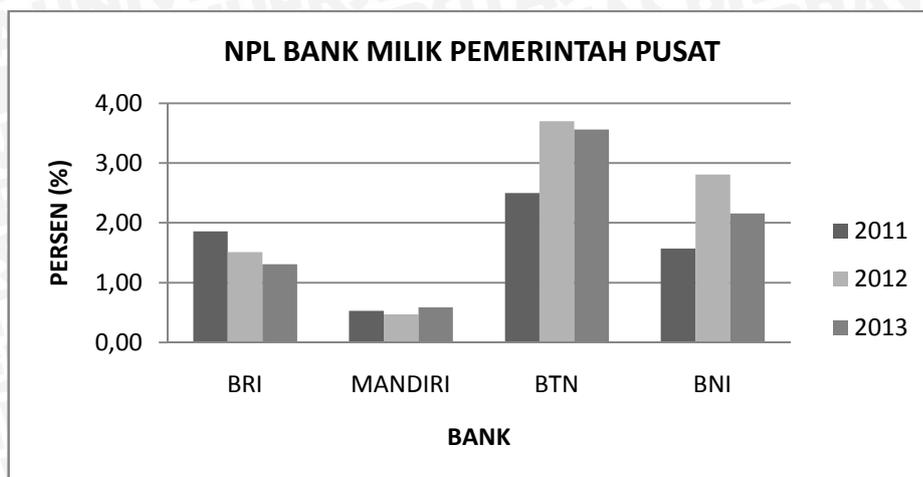
Sumber: Data diolah (Laporan Keuangan Akhir Periode, 2014)

**C. Analisis dan Interpretasi Data**

**1. Kondisi Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earning*) dan Permodalan (*capital*) Bank**

**a. Faktor Profil Risiko**

**1) Risiko Kredit**



Sumber: Data diolah (2014)

**Gambar 5 NPL Bank Milik Pemerintah Pusat**

Gambar 5 menunjukkan bahwa NPL Bank BRI mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Penurunan NPL di tahun 2012 mencapai 18,82% dan kembali menurun sebanyak 13,25% dengan nilai NPL 1,31% di tahun 2013. Kredit bermasalah bank BRI menurun menjadi 22.577.032 (jutaan rupiah) dengan total kredit 336.081.042 (dalam jutaan rupiah) ditahun 2012. Pada tahun 2013 kredit bermasalah meningkat sebesar 15,46% menjadi 26.068.587 (jutaan rupiah) dan total kredit meningkat sebesar 24,7% menjadi 419.144.730 (jutaan rupiah).

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa secara keseluruhan NPL Bank Mandiri dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berada di bawah 5%. NPL tersebut menggambarkan bahwa Bank Mandiri mampu mengelola kredit bermasalah dari total kredit yang telah diberikan. NPL Bank Mandiri mengalami fluktuatif, dimana ditahun 2012 NPL bank menurun sebesar 11,32% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,47%, sedangkan di tahun 2013 NPL Bank Mandiri kembali meningkat sebesar 25,53% menjadi 0,59%. Hal tersebut dikarenakan kredit

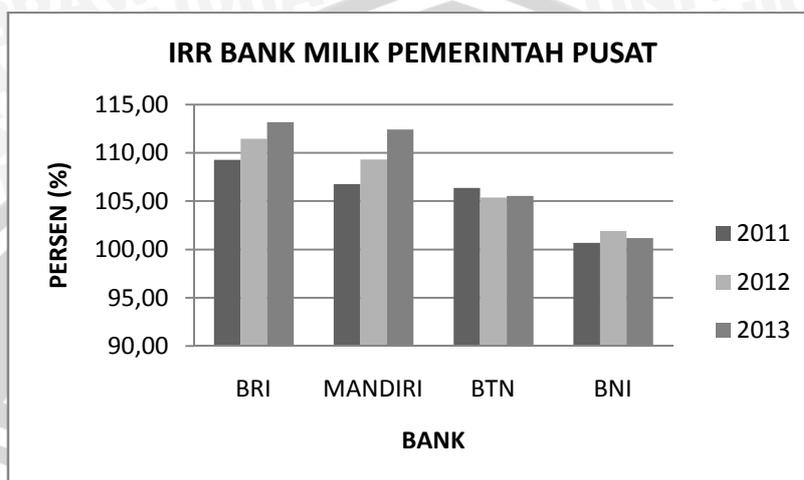
bermasalah Bank Mandiri pada tahun 2013 meningkat sebesar 25,52% menjadi 15.605.166 (jutaan rupiah).

Gambar 5 menunjukkan bahwa Bank BTN selama tahun 2011 hingga tahun 2013 memiliki nilai NPL yang juga berada di bawah 5%, namun lebih tinggi dibandingkan dengan rasio NPL bank milik pemerintah pusat lainnya. Kredit macet Bank BTN di tahun 2011 sebesar 1.189.699 (jutaan rupiah) yang kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 1.900.688 (jutaan rupiah) dan ditahun berikutnya sebesar 2.728.591 (jutaan rupiah). NPL Bank BTN di tahun 2012 sebesar 3,7%, disebabkan oleh besarnya peningkatan kredit bermasalah yang tidak didukung dengan peningkatan total kredit yang diberikan Bank BTN. Kredit bermasalah bank meningkat sebesar 90,50% ditahun 2012 dan total kredit yang diberikan hanya meningkat sebesar 28,44%. Tahun 2013 NPL Bank BTN menurun menjadi 3,56%, kredit bermasalah di tahun 2013 meningkat sebesar 18,77% yang diimbangi dengan peningkatan pemberian total kredit oleh bank sebesar 23,49%.

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa NPL Bank BNI mengalami fluktuatif, ditahun 2012 NPL bank mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan ditahun 2013 NPL kembali menurun. Peningkatan NPL di tahun 2012 sebesar 78,98% menjadi 2,81%. Peningkatan NPL ditahun 2012 disebabkan karena tingginya total kredit bermasalah bank yang semula sebesar 7.841.398 (jutaan rupiah) menjadi 12.550.500 (jutaan rupiah). Total kredit bermasalah mengalami penurunan sebesar 3,83% dan peningkatan total kredit yang diberikan Bank BNI sebesar 24,86% pada tahun 2013. Peningkatan total kredit yang diberikan bank di

tahun 2013 membuat nilai rasio NPL bank BNI menurun dan lebih terkendali dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 2) Risiko Pasar



Sumber: Data diolah (2014)

**Gambar 6 IRR Bank Milik Pemerintah Pusat**

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa IRR Bank BRI mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2013 IRR bank lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2011. Peningkatan IRR ditahun 2012 mencapai 1,99% dan di tahun 2013 sebesar 1,53%. Rasio IRR yang tinggi menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki risiko yang cukup besar terhadap turunnya tingkat suku bunga. Peningkatan IRR yang terus-menerus perlu diperhatikan oleh pihak manajemen bank agar dapat diketahui besarnya potensi keuntungan ataupun kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan tingkat bunga pada Bank BRI.

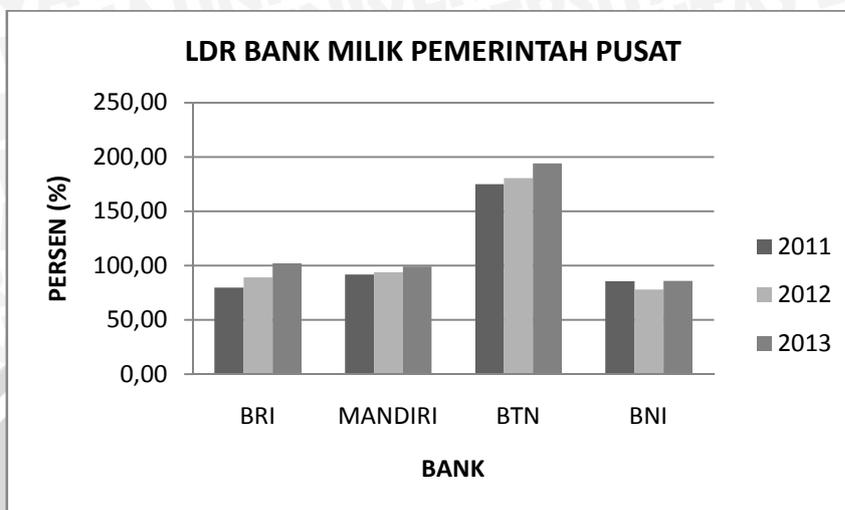
Peningkatan IRR Bank mandiri dari tahun 2011 hingga tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 6. Peningkatan *rate sensitive aset* (RSA) yang tidak diimbangi dengan peningkatan *rate sensitive liabilities* (RSL) membuat IRR Bank

terus meningkat. Peningkatan RSA di tahun 2012 sebesar 17,09% dan 19,10% di tahun 2013. RSL juga meningkat mencapai 14,33% pada tahun 2012 dan 15,83% ditahun berikutnya. Peningkatan IRR Bank Mandiri menunjukkan bahwa, Bank Mandiri memiliki risiko terhadap turunnya tingkat bunga bank, perubahan tingkat bunga Bank Mandiri perlu diperhatikan untuk mengetahui kemungkinan potensi kerugian yang timbul akibat perubahan tingkat bunga.

IRR Bank BTN mengalami fluktuatif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2012 IRR bank menurun sebesar 0,93% menjadi 105,38%, yang kemudian kembali meningkat ditahun berikutnya menjadi 105,55%. Gambar 6 menunjukkan bahwa RSA Bank BTN dari tahun 2011 hingga 2013 terus mengalami peningkatan. Peningkatan RSA yang tidak diimbangi dengan peningkatan RSL dapat menyebabkan tingkat IRR Bank BTN tinggi, sedangkan peningkatan RSA yang diimbangi dengan peningkatan RSL yang lebih besar dapat menurunkan rasio IRR Bank BTN. IRR Bank BTN yang tinggi dapat menguntungkan bank jika tingkat suku bunga naik dikarenakan dapat menaikkan tingkat pendapatan bank.

IRR Bank BTN selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuatif. RSA terus mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar 12,17% dan 16,09% ditahun berikutnya, sedangkan RSL juga mengalami peningkatan berturut-turut dari tahun 2012 dan 2013 sebesar 10,83% dan 16,91%. Peningkatan tersebut menghasilkan nilai IRR yang meningkat di tahun 2012 menjadi sebesar 101,91% dan menurun di tahun 2013 menjadi 101,19%.

### 3) Risiko Likuiditas



Sumber: Data diolah (2014)

**Gambar 7 LDR Bank Milik Pemerintah Pusat**

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa rasio LDR Bank BRI terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh adanya peningkatan dana pihak ketiga bank. Peningkatan dana pihak ketiga mencapai 11,65% ditahun 2012 dan 8,83% di tahun berikutnya, dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2013. LDR bank yang semakin meningkat menunjukkan bahwa semakin rendahnya likuiditas bank karena jumlah dana dari masyarakat yang disalurkan ke kredit terlalu besar.

LDR Bank Mandiri selama tiga tahun terhitung dari tahun 2011 hingga 2013 terus mengalami peningkatan. Peningkatan total kredit Bank Mandiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan dana pihak ketiga bank, sehingga menghasilkan LDR Bank Mandiri yang tinggi dari hasil perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga. LDR Bank Mandiri ditahun 2012 meningkat sebesar 2,18% dan meningkat kembali sebesar 5,67% ditahun berikutnya. LDR

Bank Mandiri yang masih tergolong tinggi menggambarkan bahwa bank masih harus memperbaiki pengelolaan dana pihak ketiga yang disalurkan ke kredit, agar rasio LDR dapat terus terkendali.

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa LDR Bank BTN dari tahun 2011 sampai dengan 2013 juga mengalami peningkatan. Peningkatan di LDR ditahun 2012 disebabkan karena meningkatnya dana pihak ketiga yang berasal dari tabungan, tabungan ditahun 2011 sebesar 14.740.375 (jutaan rupiah) meningkat sebesar 45,69% menjadi 21.474.509 (jutaan rupiah). LDR Bank BTN meningkat sebesar 3,15% di tahun 2012 dan kemudian meningkat kembali 7,58% ditahun berikutnya. Secara keseluruhan LDR Bank BTN tergolong sangat tinggi.

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa LDR Bank BNI mengalami fluktuatif. Tahun 2012 LDR bank mengalami penurunan sebesar 8,97% menjadi 78,02%, kemudian meningkat kembali sebesar 10,19% dari tahun sebelumnya. Peningkatan LDR disebabkan oleh peningkatan total kredit yang diimbangi dengan dana pihak ketiga yang diberikan. Peningkatan total kredit ditahun 2013 mencapai 24,86% dari tahun sebelumnya dan dana pihak ketiga yang meningkat sebesar 13,31%.

#### **b. Good Corporate Governance**

##### **1) Bank BRI**

###### **a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 yang mengatur sebuah bank harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% dari

jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen telah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap bank yang bersangkutan. Selama tahun 2011 sampai dengan 2013 jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan ketentuan dan berjalan efektif dan efisien serta tidak pernah melanggar peraturan apapun. Secara keseluruhan selama tahun 2011 hingga tahun 2013 tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak berbeda jauh, sesuai dengan ketentuan yang ada.

b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Secara umum Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank BRI untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Bank BRI. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau keputusan RUPS. Tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak memiliki perbedaan, direksi tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama. Tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta berjalan sangat efektif dan efisien serta tidak pernah melanggar peraturan.

c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Komite pada Bank BRI terdiri dari sebelas komite yang terbagi menjadi komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan komite-komite dibawah Direksi. Komite dibawah Dewan Komisaris terdiri dari komite audit, komite nominasi dan

remunerasi, dan komite pengawasan manajemen risiko. Komite dibawah Direksi diantaranya adalah, komite manajemen risiko, komite aset dan liabilitas, komite kebijakan kredit, komite kredit, komite pengarah teknologi dan sistem informasi, komite pengarah *project management office*, komite kebijakan sumber daya manusia, dan komite evaluasi jabatan. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 komposisi dan pelaksanaan tugas komite-komite telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta telah berjalan efektif dan efisien. Realisasi program kerja setiap komite dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan ada yang mengalami peningkatan maupun mengalami penurunan.

d) Penanganan Benturan Kepentingan.

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pada Bank BRI tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan Bank BRI. Bank BRI telah memiliki kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. Benturan kepentingan di Bank BRI telah ditangani dengan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank BRI.

e) Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank BRI selama tahun 2011 hingga tahun 2013 tergolong baik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan berjalan efektif. Pedoman, sistem dan prosedur fungsi kepatuhan Bank BRI tersedia lengkap. Penerapan fungsi kepatuhan bank dari tahun ke tahun berbeda-beda untuk menyempurnakan pedoman, sistem dan prosedur fungsi kepatuhan.

f) Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank BRI berjalan sangat efektif. Pelaksanaan fungsi audit intern berjalan sesuai pedoman intern dan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB). Kegiatan audit intern dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terdiri dari kegiatan regular audit, audit khusus, dan fraud audit. Pada tahun 2012 pelaksanaan audit intern mengalami peningkatan, namun menurun ditahun berikutnya. Peningkatan dan penurunan pelaksanaan fungsi audit terlihat dari realisasi penugasan audit yang telah dilaksanakan setiap tahunnya.

g) Penerapan fungsi audit ekstern

Bank telah melakukan pemilihan KAP dengan memperhatikan semua ketentuan dan aturan yang berlaku. Akuntan Publik serta KAP yang dipilih Bank BRI telah melakukan tugasnya secara profesional dan independen dan menyampaikan laporannya sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan. Secara berturut-turut selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Bank BRI telah menunjuk KAP yang sama yakni, KAP Purwanto, Suherman dan Surja-*Ersnt and Young* (PSS-EY) yang merupakan salah satu dari empat KAP berskala internasional (*The Big Four*) untuk melakukan audit atas laporan keuangan BRI selam tiga periode.

h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 memiliki penerapan fungsi yang berbeda-beda. Filosofi risiko yang diterapkan sebagai dasar dari strategi penerapan manajemen

risiko Bank BRI yang terdiri dari, integritas, profesionalisme, prinsip kehati-hatian dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Selama tahun 2011 hingga 2013 identifikasi dan pengendalian seluruh risiko Bank BRI efektif untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi bank.

- i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).

Penyediaan dana kepada pihak terkait Bank BRI telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan sangat lengkap, pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen. Total pinjaman BRI kepada pihak terkait dan kepada debitur besar mengalami perubahan disetiap tahunnya. Tahun 2011 total pinjaman sebesar 65.388.795 (jutaan rupiah), sedangkan pada tahun 2012 total pinjaman sebesar 338,45 (miliar rupiah), dan ditahun 2013 mencapai 115.139.905 (jutaan rupiah). Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak pernah terjadi pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Bank BRI telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada stakeholders dan mudah diakses secara

online pada *website* Bank BRI. Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) selama tiga periode telah disampaikan sesuai dengan ketentuan. Sistem Informasi Manajemen terkait sistem pelaporan internal Bank BRI mampu menyediakan informasi yang diperlukan bagi yang berkepentingan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen.

k) Rencana strategis Bank

Penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis Bank BRI dari tahun 2011 hingga tahun 2013 disusun sesuai dengan visi, misi serta rencana korporasi. Rencana strategis yang diimplementasikan setiap tahunnya disesuaikan dengan tema tahunan yang setiap tahun berbeda-beda. Tahun 2011 rencana strategis yang diterapkan Bank BRI bertema “Manajemen Risiko yang Handal”, yang kemudian dibuat beberapa program dan strategi abik dibidang bisnis maupun pendukung yang telah disusun bank BRI untuk mencapai sasaran kinerja bank. tahun 2012 tema tahunan yang dipilih adalah “Menjadi Bank terbaik di Indonesia dengan Praktik-Praktik *Good Corporate Governance* (GCG)”, sedangkan ditahun 2013 tema tahunan yang menjadi sasaran adalah “Bank dengan Pertumbuhan Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah Terbaik di Indonesia”. Tahun 2013 fokus bisnis Bank BRI adalah pengembangan UMKM untuk meningkatkan *fee based income* dan meraih pertumbuhan terbaik di segmen UMKM.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas didukung dengan hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilaksanakan Bank BRI. Hasil *self assessment* Bank BRI menunjukkan bahwa selama tahun 2011

sampai dengan tahun 2013 Bank BRI mendapatkan peringkat satu yang dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG Bank BRI secara umum sangat baik.

## 2) Bank Mandiri

### a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank Mandiri. Tahun 2011 dan 2012 Anggota Dewan Komisaris bank Mandiri berjumlah tujuh orang dimana empat diantaranya merupakan Komisaris Independen, yang kemudian berganti ditahun 2013 berjumlah delapan orang yang empat diantaranya merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan seluruh anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

### b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Selama tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi Bank Mandiri telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Direksi Bank Mandiri berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan seluruh anggota Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite Bank Mandiri sangat sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite ditahun 2011 hingga 2013 telah berjalan sangat efektif. Komite Bank Mandiri yang berada dibawah Dewan Komisaris terdiri dari tiga komite yakni, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko dan GCG. Komite dibawah Direksi Bank Mandiri yakni, *risk and capital committee* (RCC), *retail and support executive committee* (RSEC), *wholesale executive committee* (WEC), *human capital policy committee* (HCPC), dan bertambah di tahun 2012 yakni, *information technology committee*, dan *credit committee*. Tahun 2013 terdapat penggantian komite sehingga dibentuklah *business committee* dan *capital and subsidiaries committee*. Keputusan rapat Komite merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

d) Penanganan benturan kepentingan

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan. Seluruh benturan kepentingan selama tahun 2011 hingga 2013 telah diungkap dalam setiap keputusan dan diadministrasikan serta terdokumentasi dengan baik, terbukti dengan bank tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

e) Penerapan fungsi kepatuhan

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2013 berjalan efektif dan telah tersedianya pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi secara lengkap, dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen yang diterapkan Bank Mandiri dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penegakan prinsip kehati-hatian dengan membuat seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di bidang masing-masing.

f) Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Mandiri selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan dalam SPFAIB telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif. Rencana dan strategi jangka panjang Direktorat Internal Audit (DIA) 2010-2014 telah disusun selaras dengan fokus strategi Bank Mandiri tahun 2010–2014 dan setiap tahun terus dilakukan evaluasi serta penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efektivitas peran dan fungsi DIA. Strategi jangka panjang DIA tersebut telah ditetapkan dalam lima fokus strategi yaitu *risk mapping*, *continuous auditing*, *integrated/combined assurance*, *enhancement rba* dan *internal audit capability model*. Kelima fokus strategi tersebut terus dikembangkan secara berkesinambungan.

g) Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta kualitas dan cakupan hasil audit telah sangat baik. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik atau KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal tersebut tersermin dengan penetapan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2011 hingga tahun 2013.

h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank Mandiri serta aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern di Bank Mandiri dilaksanakan menyeluruh di segala lini (*3 layer of defense*) dan di seluruh tingkatan yakni, (1) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, (2) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, dan (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank

i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Bank Mandiri telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Total pinjaman Bank Mandiri kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 total pinjaman sebesar 71.733.442 (jutaan rupiah) sedangkan pada tahun 2012 total pinjaman sebesar 86.716.070 (jutaan rupiah) dan pada tahun 2013 total pinjaman sebesar 128.703 (miliar rupiah).

- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan dari tahun 2011 hingga 2013 secara transparan kepada publik melalui *homepage* Bank Mandiri, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan portal kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, dan disampaikan secara tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku.

- k) Rencana strategis bank

Rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis bank (*business plan*) disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal maupun internal, prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank Mandiri disesuaikan dengan proses transformasi yang dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Melalui transformasi tersebut Bank Mandiri melakukan

revitalisasi visinya yakni, menjadi lembaga keuangan di Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas didukung dengan hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilaksanakan Bank Mandiri. Hasil *self assessment* Bank Mandiri menunjukkan bahwa selama tahun 2011 Bank Mandiri mendapatkan peringkat satu yang mengkategorikan penerpan GCG Bank Mandiri secara umum sangat baik, ditahun 2012 penerapan GCG Bank Mandiri secara umum baik, dan tahun 2013 Bank Mandiri kembali mendapat peringkat satu sehingga kategori penerapan GCG Bank Mandiri tergolong sangat baik kembali.

### **3) Bank BTN**

#### **a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank BTN. Secara keseluruhan Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan bank oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, anggaran dasar dan ketentuan RUPS dalam rangka melaksanakan kepentingan bank dan atau sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Bank BTN. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi Bank BTN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Direksi bertugas dan bertanggung-jawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan agar *value driver* berfungsi maksimal sehingga profitabilitas operasional naik dan memberikan hasil akhir berupa peningkatan nilai perusahaan secara berkesinambungan. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, Direksi Bank BTN bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi sepanjang tahun adalah sama.

c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite Bank BTN tahun 2011 hingga tahun 2013 telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Bank BTN membagi komite menjadi dua yakni, komite dibawah Dewan Komisaris dan komite dibawah Direksi. Komite dibawah Dewan Komisaris terdiri dari, komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Komite dibawah Direktur yakni, komite manajemen risiko, komite *aset and liability*, komite produk, komite personalia, dan komite pengarah teknologi informasi.

d) Penanganan benturan kepentingan

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Bank BTN telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat

merugikan Bank melalui kebijakan internal bank. Sepanjang tahun tersebut Bank BTN tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

e) Penerapan fungsi kepatuhan

Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan Bank BTN selama tahun 2011 hingga 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik. Kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank BTN sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah Bank BTN. Secara keseluruhan tugas Direktur Kepatuhan sepanjang tahun 2011 hingga 2013 adalah sama.

f) Penerapan fungsi audit intern

Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. Jumlah temuan Audit intern selama tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami perbedaan. Jumlah temuan pada jenis audit, general audit kantor cabang, general audit kantor cabang syariah, general audit kantor pusat, dan audit teknologi sistem informasi ditahun 2011 berjumlah 2.474 meningkat 4,20% ditahun 2012 menjadi sebesar 2.578, kemudian menurun 10,47% dari tahun sebelumnya menjadi 2.308 ditahun 2013..

g) Penerapan fungsi audit ekstern

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Bank BTN telah melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Purwanto, Suherman & Surja - *Ernst & Young* sebagai Auditor yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dan Laporan PKBL Bank BTN ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Jasa General Audit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Bank BTN (Persero) Tbk.

h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank BTN telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank BTN. Implementasi praktik manajemen risiko Bank BTN pada tahun 2011 adalah, pertama penilaian Profil Risiko yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dalam operasional bank. Kedua Bank BTN telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating*).

i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)

Bank BTN selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, pengambilan keputusan dilakukan secara independen.

Total pinjaman Bank Mandiri kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 total pinjaman sebesar 2.824.621 (jutaan rupiah) sedangkan pada tahun 2012 total pinjaman sebesar 3.320.426

(jutaan rupiah) dan pada tahun 2013 total pinjaman sebesar 7.951.516 (jutaan rupiah).

- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Informasi finansial dan perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui *website* Bank BTN. Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan *Electronic Reporting* kepada Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

- k) Rencana strategis bank

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta. Bank BTN menitikberatkan pada transformasi bisnis, budaya kerja, dan infrastruktur yang didukung oleh implementasi GCG untuk pencapaian pertumbuhan bisnis yang berkualitas. Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas didukung dengan hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilaksanakan Bank BTN. Hasil *self assessment* Bank BTN menunjukkan bahwa selama tahun 2011 dan 2012 Bank BTN mendapatkan peringkat satu yang mengategorikan penerapan GCG Bank BTN secara umum sangat baik, ditahun 2013 peringkat

penerapan GCG Bank BTN mengalami penurunan menjadi peringkat tiga, sehingga penerapan GCG Bank BTN secara umum dikategorikan cukup baik.

#### 4) Bank BNI

##### a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Selama tahun 2011 samapai dengan tahun 2013 jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris berjumlah tujuh orang termasuk jumlah Komisaris Independen sebanyak empat orang atau ekuivalen dengan 57,14% dari jumlah anggota Dewan Komisaris sehingga memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tiga periode tidak memiliki banyak perbedaan.

##### b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi Bank BNI telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana jumlah Direksi sebanyak sepuluh orang. Direksi mempunyai integritas, berpengalaman paling kurang lima tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank atau institusi keuangan. Direktur bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang pengawasan intern, perencanaan strategis serta komunikasi perusahaan dan kesekretariatan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2011 hingga tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berjalan efektif dan efisien.

c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Komite Bank BNI terdiri dari dua bagian, pertama yakni komite dibawah Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko (KPR), dan komite remunerasi dan nominasi. Kedua yakni komite dibawah Direksi yang terdiri dari delapan komite sampai akhir tahun 2013, ditahun 2011 terbentuk komite risiko dan kapital (KRK), komite sumber daya manusia, komite manajemen teknologi, dan komite *performance management*. Tahun 2012 terbentuk komite baru dibawah Direksi yakni komite produk dan anti fraud, dan komite manajemen kerja serta komite kebijakan perkreditan dibentuk ditahun 2013. Komposisi pelaksanaan tugas komite dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Realisasi program kerja komite dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami perubahan, terdapat komite yang mengalami peningkatan dalam pelaksanaan program kerja dan ada pula yang mengalami penurunan.

d) Penanganan benturan kepentingan

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif antara lain sebagaimana dimuat dalam *Credit Policy Committee (CPC)*, Buku Kode Etik BNI, Buku Budaya Kerja 'Prinsip 46', Anggaran Dasar BNI dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) BNI/SOP BNI. Terbukti dengan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan Bank BNI.

e) Penerapan fungsi kepatuhan

Kepatuhan Bank BNI tergolong baik. Beberapa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat beberapa ketidakpatuhan yang terjadi karena keterlambatan penyampaian laporan. Penerapan fungsi kepatuhan setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami perbedaan, hal tersebut ditujukan agar seluruh aktifitas yang dilakukan Bank BNI sesuai dengan ketentuan yang ada.

f) Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank BNI dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah berjalan efektif yang dilaksanakan dengan pembentukan fungsi satuan kerja audit intern sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dengan nama Satuan Pengawasan Intern dimana audit dilakukan dengan pendekatan *Risk Based Audit*. Jenis penugasan yang telah dilaksanakan audit intern terdiri dari audit rutin non IT (*Information Technology*), audit rutin IT, audit investigatif, audit *surprise*, dan jasa konsultasi.

g) Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik atau KAP sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. Penerapan fungsi audit ekstern Bank BNI selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tercermin dalam pemilihan KAP yang memperhatikan aturan yang berlaku. Pada tahun 2011 Bank BNI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman &

Surja (PSS), dan ditahun 2012 serta tahun 2013 Bank BNI menunjuk KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan (*Pricewaterhouse Coopers*) untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan tahunan program kemitraan dan bina lingkungan.

h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Setiap tahunnya selama tahun 2011 hingga tahun 2013 untuk melaksanakan untuk menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern Dewan Komisaris secara berkala melakukan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (RADIKOM) yang membahas mengenai manajemen risiko. Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank antara lain dengan membangun dan mengembangkan perangkat risiko operasional (PERISKOP) untuk pemantauan risiko operasional di segenap unit.

i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Bank BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menetapkan limit kredit atau penyediaan dana kepada individu maupun group debitur serta perusahaan atau pihak yang terkait dengan bank, serta memiliki kebijakan yang mengatur limit kredit per sektor industri. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Bank BNI tidak melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK atas penyediaan dana kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait baik individual maupun group debitur.



- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Bank BNI selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Penerapan mengenai transparansi informasi Bank BNI telah dapat diketahui nasabah melalui sarana-sarana seperti *website* BNI, brosur atau *leaflet*, iklan *Above The Line* (ATL) dan *Below The Line* (BTL), *staterpack* maupun pengumuman yang dipasang atau disebar di kantor-kantor Cabang BNI.

- k) Rencana strategis bank

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rencana jangka pendek Bank BNI (rencana bisnis bank/*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank BNI serta rencana jangka panjang (rencana korporasi/*corporate plan*). Tahun 2013 Bank BNI berfokus pada upaya-upaya untuk melanjutkan perumbuhan keuangan secara berkelanjutan sesuai dengan tahapan rencana kerja jangka panjang.

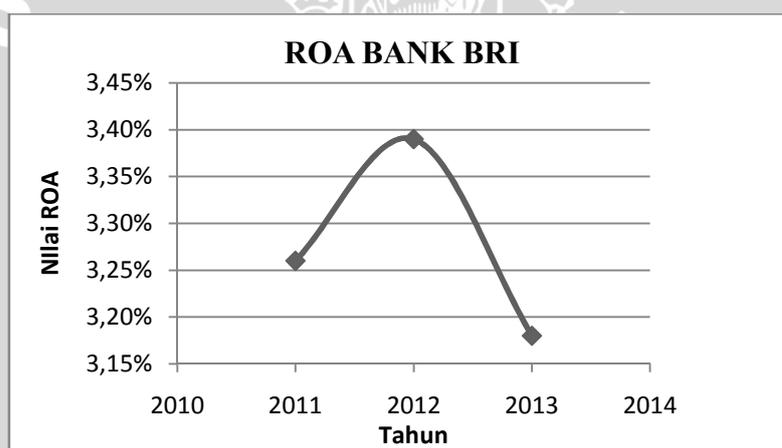
Hasil analisis yang telah diuraikan diatas didukung dengan hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilaksanakan Bank BNI. Hasil *self assessment* Bank BNI menunjukkan bahwa selama tahun 2011 dan 2012 Bank BNI mendapatkan peringkat satu yang mengkategorikan penerapan GCG Bank BNI secara umum sangat baik, ditahun 2013 Bank BNI mendapatkan peringkat dua yang mengkategorikan penerapan GCG Bank BNI secara umum baik.

### c. Faktor Rentabilitas (*earning*)

#### 1) Return On Asset (ROA)

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan dengan cara mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki. Besarnya nilai ROA dipengaruhi oleh laba yang dihasilkan, semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efektifnya suatu bank. Adapun hasil dari perhitungan ROA bank milik pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

##### a) Hasil Perhitungan ROA Bank BRI



Sumber: ICMD 2013 (Data diolah, 2014)

**Gambar 8 Return On Asset Bank BRI Tahun 2011-2013**

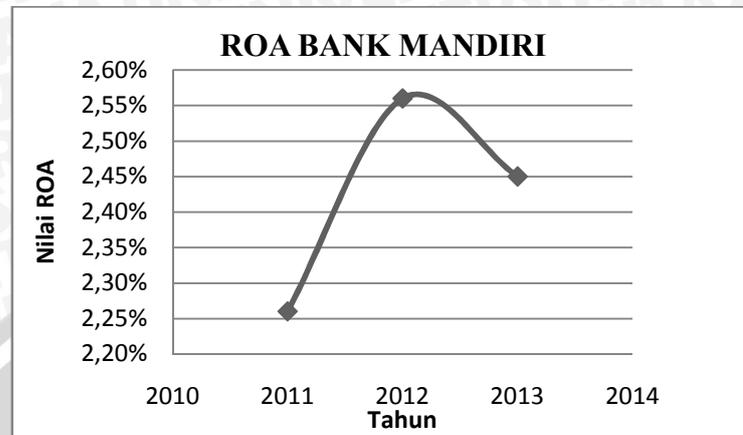
Meningkatnya komposisi kredit mikro, serta meningkatnya kontribusi *fee based income* dan meningkatnya *leverage*, menyebabkan ROA Bank BRI mengalami peningkatan. ROA Bank BRI meningkat menjadi 3,26% pada posisi Desember 2011 dari 2,86% pada posisi tahun sebelumnya. Tahun 2011 Bank BRI mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp 15,09 triliun, meningkat 31,52% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 11,47 triliun. Meningkatnya

profitabilitas tersebut berdampak pada tingkat pengembalian atas aktiva (ROA) yang menjadi sebesar 3,26%. Total pendapatan bung, investasi dan syariah ditahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 7,95% menjadi 48.164.348 (jutaan rupiah, selain itu pendapatan operasional bank sebesar 3.217.666 atau meningkat 17,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

ROA Bank BRI kembali meningkat 3,98% di tahun 2012, menjadi sebesar 3,39% sebagai akibat naiknya pendapatan, terkendalnya beban dan biaya operasional yang pada akhirnya meningkatkan laba bersih dengan laju pertumbuhan lebih besar dari laju pertumbuhan aset, dan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pendapatan operasional Bank BRI meningkat ditahun 2012 sebesar 45,25% menjadi 8.389.732 (jutaan rupiah), sedangkan beban operasional meningkat 14,08% atau sebesar 19.491.032 (jutaan rupiah).

Tahun 2013 Bank BRI memperoleh ROA yang mencapai 3,18%. Namun apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, rasio ROA tersebut mengalami sedikit penurunan dimana pada periode sebelumnya ROA mencapai 3,39%. Pertumbuhan aset di tahun 2013 menjadi 546.855.504 (jutaan rupiah) tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba di tahun yang sama. Penurunan ROA sebagai akibat adanya penurunan pendapatan operasional bank yang tidak diimbangi dengan kenaikan yang terjadi pada beban operasional bank. Pendapatan operasional Bank BRI menurun ditahun 2013 menjadi 8.348.459 (jutaan rupiah) dan beban operasional bank meningkat sebesar 14,83% atau sebesar 22.380.778 (jutaan rupiah).

b) Hasil Perhitungan ROA Bank Mandiri



Sumber: ICMD 2013 (Data diolah, 2014)

**Gambar 9 Return On Asset Bank Mandiri Tahun 2011-2013**

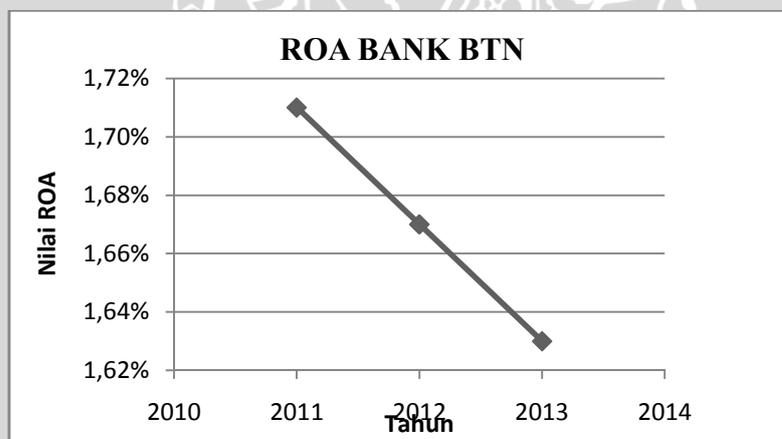
Gambar 9 menunjukkan Bank Mandiri berhasil memperoleh ROA sebesar 2,26%. Laba sebelum pajak untuk tahun 2011 mencapai Rp 16,51 triliun, sedangkan laba setelah pajak mencapai Rp 12,69 triliun. Pelampauan laba tersebut terutama disebabkan karena pencapaian *fee based income* yang baik. Per 31 desember 2011, total aktiva mencapai Rp 551,89 triliun atau naik 22,71%. Dibandingkan dengan posisi per 31 desember 2010 sebesar Rp 449,77 triliun, tumbuh 14,01%.

Bank Mandiri berhasil mencatat ROA 2,56% pada tahun 2012, laba sebelum pajak untuk tahun 2012 mencapai Rp 16,04 triliun atau meningkat sebesar 26,39% dari tahun 2011. Pelampauan laba tersebut terutama disebabkan karena peningkatan *fee based income*. Per 31 Desember 2012, total aset mencapai Rp 635,62 triliun atau tumbuh sebesar 15,17%, jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2011. Peningkatan kinerja keuangan tersebut dikarenakan

peningkatan pendapatan Bank Mandiri yang diimbangi dengan peningkatan total aset bank.

ROA Bank Mandiri menurun pada tahun 2013 menjadi 2,45%. Pertumbuhan aset di tahun 2013 menjadi Rp 733,09 triliun tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba di tahun yang sama. Penurunan ROA sebagai akibat pertumbuhan laba bersih tidak sebesar tahun sebelumnya. Pertumbuhan Laba bersih tahun 2013 hanya sebesar 17,39% menjadi Rp 18,83 triliun. Laba sebelum pajak untuk tahun 2013 mencapai Rp 24,06 Triliun atau meningkat sebesar 17,35% dari tahun 2012. Pelampauan laba tersebut terutama disebabkan karena pencapaian *fee-based income* yang mencapai Rp14,50 triliun.

c) Hasil Perhitungan ROA Bank BTN



Sumber: ICMD 2013 (Data diolah, 2014)

**Gambar 10 Return On Asset Bank BTN Tahun 2011-2013**

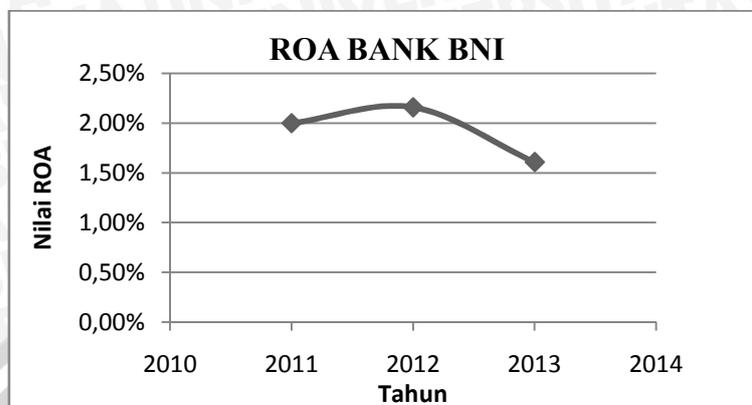
ROA Bank BTN sebesar 1,71% di tahun 2011. Bank BTN berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 1,1 triliun di 2011, meningkat 22% dari tahun 2010. Per 31 Desember 2011 Bank BTN berhasil meraih peningkatan aset hingga 30,31% menjadi Rp 89,12 triliun, dari Rp68,39 triliun pada tahun sebelumnya. ROA Bank

BTN menurun dari 1,83% di tahun 2010 menjadi 1,71% tahun 2011. Jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil Bank BTN ditahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 16,27% atau sebesar Rp 7.56 triliun. Bank BTN juga melakukan sejumlah diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan *fee based income*, meningkatkan marjin dan mengurangi risiko konsentrasi kredit, serta meningkatkan komposisi kredit perumahan dan kredit non perumahan. Aset Bank BTN pun terus meningkat hingga Rp 89,12 triliun, naik 30,31% dari tahun lalu, hanya saja peningkatan aset tidak diimbangi dengan peningkatan laba bersih, sehingga berpengaruh pada ROA Bank BTN.

Rasio ROA menurun dari 1,71% pada tahun 2011 menjadi 1,67% pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan aset yang signifikan selama tahun 2012 sebesar 25,39% sementara perolehan laba bersih hanya mencapai peningkatan sebesar 21,42%. Peningkatan pendapatan operasional bank hanya sebesar 11,61% atau sebesar Rp 0,58 triliun. Total aset per 31 Desember Bank BTN sebesar Rp 111,75 triliun, sedangkan laba bersih di akhir tahun sebesar Rp 1,37 triliun.

Rasio ROA kembali menurun dari 1,67% pada tahun 2012 menjadi 1,63% pada tahun 2013. Sama dengan tahun sebelumnya, penurunan ROA disebabkan karena peningkatan aset yang tidak seimbang dengan peningkatan laba Bank BTN. Total aset per 31 desember Bank BTN tahun 2013 sebesar Rp 131,17 triliun atau meningkat sebesar 17,38%, peningkatan tersebut antara lain ditunjang oleh peningkatan kredit yang diberikan bank sebesar 23,49% atau sebesar Rp 99,33 triliun. Laba bersih meningkat 14,59% menjadi Rp 1,57 triliun.

d) Hasil Perhitungan ROA Bank BNI



Sumber: ICMD 2013 (Data diolah, 2014)

**Gambar 11 Return On Asset Bank BNI Tahun 2011-2013**

Tahun 2011 rasio laba terhadap aset meningkat menjadi 2,00%, hal ini didorong oleh peningkatan laba yang signifikan yaitu sebesar 41,7%. Total aset bank meningkat sebesar 20,31% atau sebesar Rp 299,06 triliun ditahun 2011. Laba operasional bank juga meningkat ditahun 2011 menjadi Rp 7,24 triliun atau setara dengan 31,47% dari tahun sebelumnya.

Tahun 2012, ROA Bank BNI meningkat pada angka 2,16%. Total aset Bank BNI meningkat sebesar 11,45% menjadi sebesar Rp 333,30 triliun. Dari sisi profitabilitas, strategi bisnis yang diterapkan mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp7,05 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 21,34% dari perolehan laba bersih periode sebelumnya. Pendapatan operasional bank meningkat menjadi Rp 8,44 triliun atau setara dengan 11,11% dari tahun sebelumnya.

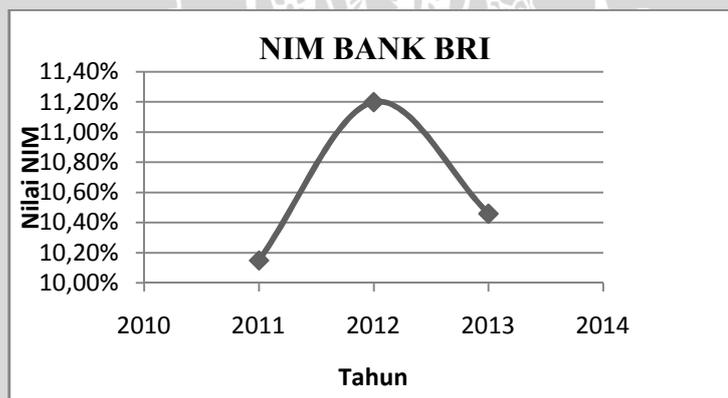
ROA Bank BNI mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya menjadi 1,61%. Aset bank meningkat ditahun 2013 sebesar 16,01% menjadi Rp 386,65 triliun. Perolehan laba bersih pada tahun 2013 mencapai Rp 9,06 triliun

dan mengalami pertumbuhan sebesar 28,51% dari perolehan laba bersih periode sebelumnya. Pertumbuhan laba di tahun 2013 tidak sebanding dengan pertumbuhan aset, sehingga ROA mengalami penurunan.

## 2) *Net Interest Margin* (NIM)

NIM adalah salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kinerja suatu bank. Penelitian ini menunjukkan nilai NIM yang diperoleh dari hasil perhitungan pendapatan bunga bersih dibagi dengan total aktiva produktif yang dinilai dari total aset. Hasil perhitungan tersebut untuk masing-masing bank milik pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

### a. Hasil Perhitungan NIM Bank BRI



Sumber: Data diolah (2014)

**Gambar 12 *Net Interest Margin* Bank BRI Tahun 2011-2013**

*Net Interest Margin* (NIM) tahun 2011 sebesar 10,15%. Sepanjang tahun 2011 pertumbuhan kredit Bank BRI disebabkan karena manajemen Bank BRI hanya fokus pada pembenahan kualitas kredit dan selektif dalam menyalurkan kredit. Selama tahun 2011, total kredit BRI tumbuh sebesar 15,66%, dari Rp 232,97 triliun di tahun 2010 menjadi Rp 269,45 triliun di tahun 2011. Membaiknya kualitas kredit disertai dengan komposisi portofolio kredit yang

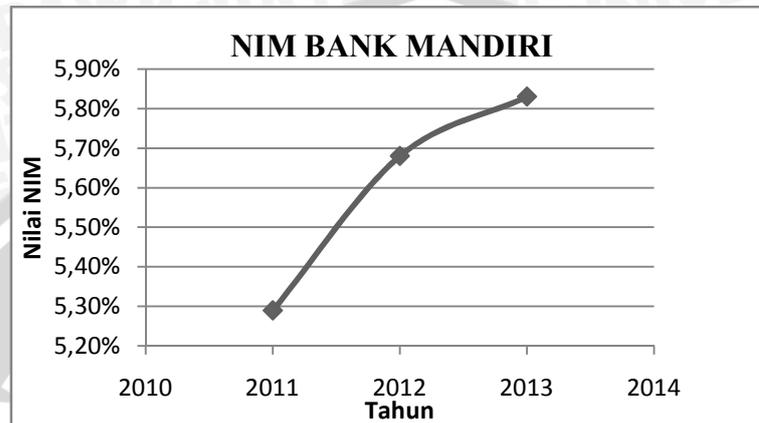
tetap didominasi oleh kredit mikro, menyebabkan pendapatan bunga selama tahun 2011 tetap tumbuh sebesar 7,96% dari Rp 44,62 triliun di tahun 2010 menjadi Rp 48,16 triliun di tahun 2011.

Bank BRI memperoleh marjin pendapatan bunga bersih sebesar 11,20% di tahun 2012. Peningkatan rasio NIM mencapai 10,34% dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut dikarenakan pada tahun 2012 Bank BRI menerapkan strategi bisnis yang fokus pada peningkatan kualitas kredit dan selektif dalam penyaluran kredit. Dengan penerapan strategi tersebut, pertumbuhan kredit BRI di tahun 2012 dapat tumbuh. Selama tahun 2012, total kredit BRI tumbuh 24,72% dari Rp 269,45 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 336,08 triliun di tahun 2012. Terjaganya kualitas kredit disertai dengan komposisi portofolio kredit yang tetap didominasi oleh Kredit Mikro, menyebabkan pendapatan bunga selama tahun 2012 tumbuh sebesar 3,00% dari Rp 48,16 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 49,61 triliun di tahun 2012. Dari total pendapatan bunga tersebut, sebesar Rp 42,67 triliun, 86,02% merupakan kontribusi dari pendapatan bunga pinjaman.

Tahun 2013 Bank BRI mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp 21,35 triliun, tumbuh 14,29% dari perolehan laba bersih tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersih Bank BRI di tahun 2013 mencapai Rp 44,11 triliun naik dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 36,48 triliun. NIM Bank BRI untuk tahun 2013 sebesar 10,46%. Pertumbuhan rasio keuangan pokok konsolidasi tahun 2013, seperti pertumbuhan total aset sebesar 13,6% dari posisi Desember 2012, kredit yang disalurkan tumbuh 24,7%, dan pendapatan bunga bersih sebesar

20.9%. Pencapaian tersebut berkat dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, teknologi informasi, dan perluasan jaringan kantor perseroan.

b. Hasil Perhitungan NIM Bank Mandiri



Sumber: Data diolah (2014)

**Gambar 13 Net Interest Margin Bank Mandiri Tahun 2011-2013**

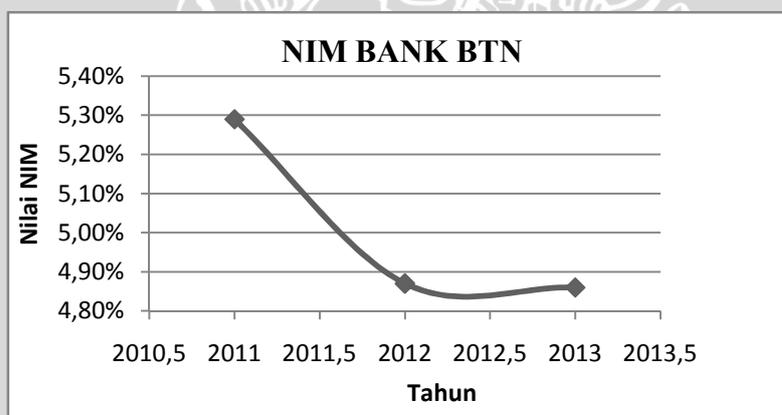
Gambar 13 menunjukkan Bank Mandiri memperoleh marjin pendapatan bunga bersih sebesar 5,29% di tahun 2011. Pendapatan bunga bersih Bank Mandiri di tahun 2011 mencapai Rp 21,78 triliun naik dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 19,52 triliun. Pendapatan bunga syariah dan premi bersih meningkat sebesar 17,5% dari Rp 20,07 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 23,59 triliun pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan membaiknya kolektabilitas kredit dan bertumbuhnya kredit sehingga mengakibatkan peningkatan bunga syariah dan premi bersih.

NIM pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari 5,29% pada tahun sebelumnya menjadi 5,68%, disebabkan oleh penurunan biaya dana, peningkatan aset, serta perbaikan kualitas kredit. Pada tahun 2012 pertumbuhan kredit sebesar 23,94%, yaitu dari Rp 298,99 triliun pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 370,58

triliun pada tahun 2012. Dengan pencapaian tersebut, pendapatan bunga bersih dari segmen ini mencapai sebesar Rp 27,53 triliun.

Tahun 2013 NIM mencapai 5,83% meningkat dibandingkan tahun 2012. Jaringan distribusi mengalami peningkatan, jumlah kantor cabang sepanjang tahun 2013 bertambah sebanyak 240 unit menjadi 2.050 kantor cabang. Pendapatan bunga bersih dan premi bersih di tahun 2013 sebesar Rp 35,40 triliun meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 29,69 triliun. Peningkatan tersebut disumbang oleh naiknya pendapatan bunga seiring pertumbuhan kredit ritel. Hal tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan NIM dari 5,68% pada tahun 2012 menjadi 5,83% pada tahun 2013.

c. Hasil Perhitungan NIM Bank BTN



Sumber: Data diolah (Laporan 2014)

**Gambar 14 Net Interest Margin Bank BTN Tahun 2011-2013**

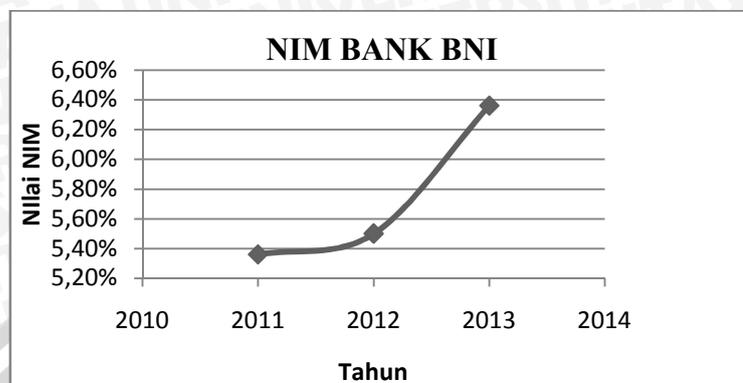
Selama tahun 2011, jumlah aktiva meningkat secara signifikan dari Rp 68,39 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 89,12 triliun pada tahun 2011. Tahun 2011 NIM Bank BTN sebesar 5,29%. Bank BTN menerapkan strategi untuk mempertahankan tingkat bunga agar tetap sama dengan tingkat bunga tahun sebelumnya. Bank memperoleh pendapatan bunga berdasarkan saldo porto folio

KPR dan portofolio non KPR. Pinjaman KPR terdiri dari pinjaman KPR Bersubsidi dan pinjaman KPR non subsidi.

NIM pada tahun 2012 sebesar 4,87%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 5,29%. Bank BTN berhasil meningkatkan total aset sebesar 25,39% yaitu dari Rp 89,12 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 111,75 triliun di tahun 2012. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 28,44% dari Rp 62,62 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 80,43 triliun tahun 2012 dan peningkatan pada obligasi pemerintah sebesar 4,92%, dari tahun sebelumnya Rp 7,12 triliun menjadi Rp 7,47 triliun. Pendapatan bunga bersih juga mengalami peningkatan sebesar 24,81%, dari Rp 3,79 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 4,73 triliun di tahun 2012.

Selama tahun 2013, jumlah aset meningkat secara signifikan 17% dari Rp 111,75 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp131,17 miliar pada tahun 2013. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan portofolio fasilitas kredit yang diberikan sebesar 24% lebih tinggi pada tahun 2013. Pada periode 2013, Bank BTN mengalami penurunan NIM menjadi 4,86% di 2013. Penurunan NIM dikarenakan adanya peningkatan pendapatan bunga bersih yang tidak seimbang dengan peningkatan rata-rata total aktiva produktif ditahun 2013.

d. Hasil Perhitungan NIM Bank BNI



Sumber: Data diolah (2014)

**Gambar 15 Net Interest Margin Bank BNI Tahun 2011-2013**

Profitabilitas Bank BNI pada posisi rasio NIM yang ditunjukkan Gambar 15 mencapai 5,36% di tahun 2011. Hal ini tercapai karena kemampuan BNI mengelola aset produktifnya lebih baik, diimbangi dengan kemampuan mengelola sisi liabilitas secara efisien dan efektif. Pendapatan Bunga Bersih BNI berhasil meningkatkan pendapatan bunga bersih sebesar 12,36% dari Rp 11,7 triliun di 2010 menjadi Rp 13,2 triliun di tahun 2011. Peningkatan pendapatan bunga di tahun 2011 diiringi pula dengan peningkatan beban bunga sebesar 5,6%, yaitu dari Rp 7,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 7,5 triliun di tahun 2011. Peningkatan beban bunga tersebut sejalan dengan peningkatan simpanan nasabah yang meningkat sebesar Rp 36,9 triliun, atau 19,0% di tahun 2011.

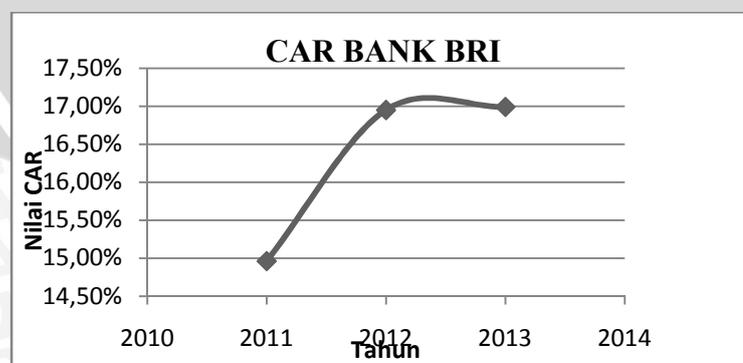
NIM pada tahun 2012 sebesar 5,50% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 5,36%. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank BNI dalam menjaga profitabilitasnya di tengah kondisi bisnis yang penuh tantangan. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah bersih meningkat 17,1%, dari Rp 13,2 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 15,5 triliun di tahun 2012. Hal ini didukung dengan

pertumbuhan pendapatan bunga dan pendapatan syariah sebesar 9,7% serta diikuti penurunan beban bunga dan beban syariah sebesar 3,3%.

NIM pada tahun 2013 meningkat sebesar 15,64% menjadi 6,36%. Bank BNI berhasil meningkatkan total aset sebesar 16,0% yaitu dari Rp 333,3 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 386,7 triliun di tahun 2013. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 24,9% dari Rp 200,7 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 250,6 triliun tahun 2013, peningkatan efek-efek sebesar 22,1% dari Rp 9,8 triliun tahun 2012 menjadi Rp 12,0 triliun tahun 2013 dan peningkatan pada obligasi pemerintah sebesar 7,4% atau Rp 2,2 triliun dari tahun sebelumnya Rp 38,6 triliun menjadi Rp 41,4 triliun. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah bersih meningkat 23,3%, dari Rp 15,5 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 19,1 triliun di tahun 2013. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan bunga dan pendapatan syariah yang jauh lebih tinggi sebesar 16,5% dibandingkan kenaikan beban bunga dan beban syariah yang hanya naik 2,0%.

#### b. Analisis Faktor Permodalan (*Capital*)

##### 1) Hasil Perhitungan CAR Bank BRI

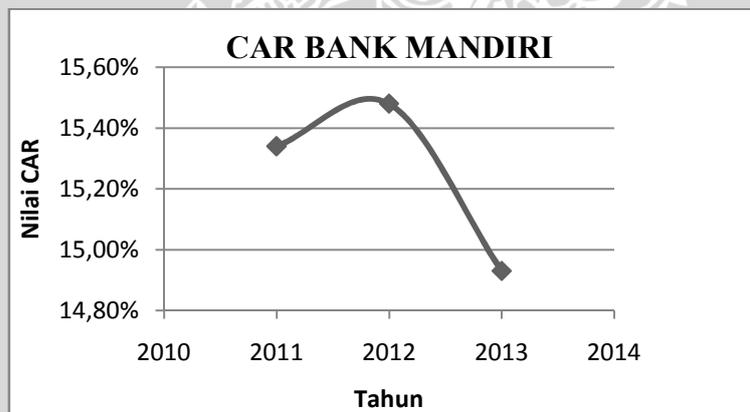


Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode (Data diolah, 2014)

**Gambar 16** *Capital Adequacy Ratio* Bank BRI Tahun 2011-2013

CAR Bank BRI tiga tahun terakhir masih berada di atas CAR minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Di tahun 2011 Bank BRI memperoleh rasio CAR sebesar 14,96%, dimana modal inti mendominasi dari keseluruhan total modal sebesar 91,39%. Komposisi permodalan Bank BRI didominasi oleh modal inti yang mayoritas berasal dari laba Bank BRI. Tahun 2012 CAR BRI meningkat 13,30% menjadi 16,95% peningkatan ini disebabkan karena kebijakan manajemen Bank BRI dalam mengelola modal dan cermat dalam menyalurkan kredit. Manajemen Bank BRI masih terus menjaga tingkat permodalan bank hingga mencapai CAR sebesar 16,99% di tahun 2013.

2) Hasil Perhitungan CAR Bank Mandiri



Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode (Data diolah, 2014)

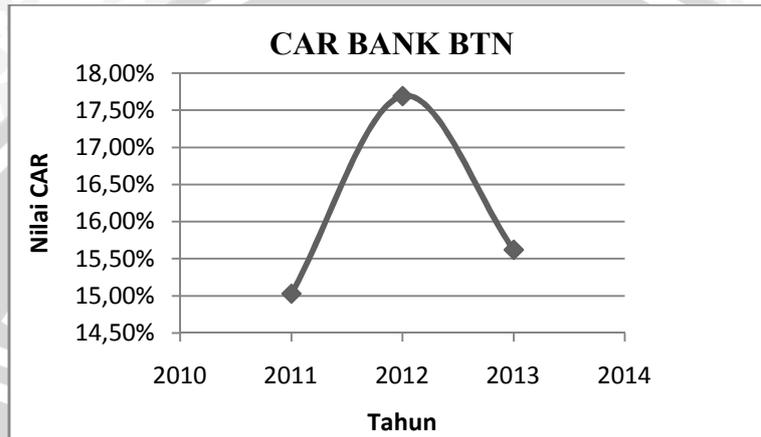
**Gambar 17 Capital Adequacy Ratio Bank Mandiri Tahun 2011-2013**

CAR Bank Mandiri pada tahun 2011 hingga 2013 mengalami fluktuatif. Tahun 2011 CAR Bank Mandiri sebesar 15,13% yang meningkat di tahun 2012 menjadi 15,48%, dan turun di tahun berikutnya menjadi sebesar 14,93%, namun demikian CAR Bank Mandiri masih berada di atas ketentuan Bank Indonesia. Pengelolaan permodalan Bank Mandiri meliputi kebijakan sumber modal dan



alokasi modal secara efisien. Penurunan CAR juga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak manajemen bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko.

3) Hasil Perhitungan CAR Bank BTN

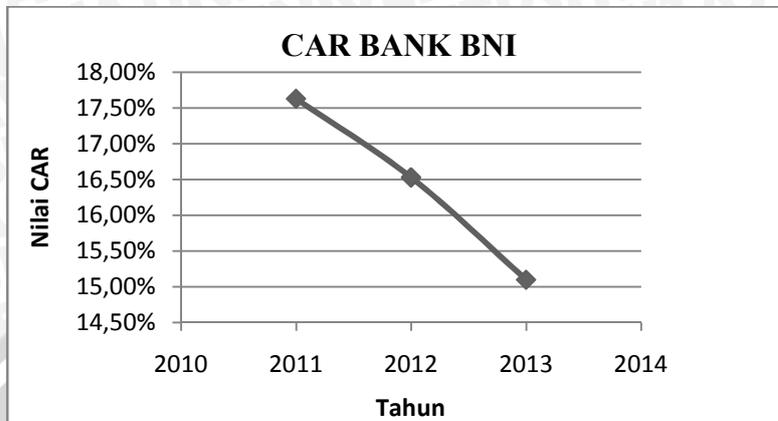


Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode (Data diolah, 2014)

**Gambar 18 Capital Adequacy Ratio Bank BTN Tahun 2011-2013**

Berdasarkan Gambar 18 menunjukkan tahun 2013 CAR Bank BTN sebesar 15,03% yang kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 17,69%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Bank BTN memiliki kemampuan untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional di atas rasio kecukupan modal minimum Bank Indonesia. Tahun 2013 CAR Bank BTN menurun menjadi 15,62%. Penurunan disebabkan karena peningkatan ATMR pada tahun 2013 sebesar 24,27%, sedangkan peningkatan modal inti tidak dapat mengimbangi peningkatan ATMR yang ada yaitu hanya sebesar 9,30%.

4) Hasil Perhitungan CAR Bank BNI



Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode (Data diolah, 2014)

**Gambar 19 Capital Adequacy Ratio Bank BNI Tahun 2011-2013**

CAR Bank BNI yang dipaparkan pada Gambar 19 menunjukkan bahwa CAR Bank BNI mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Tahun 2011 nilai CAR yang dihasilkan adalah sebesar 17,63% yang menurun menjadi 16,53% di tahun 2012. Penurunan tersebut kembali terjadi di tahun 2013, dimana nilai CAR Bank BNI menjadi 15,10%. Penurunan nilai CAR yang dimiliki Bank BNI dikarenakan peningkatan total modal yang dimiliki bank tidak diimbangi dengan penurunan aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

**2. Tingkat Kesehatan Bank Milik Pemerintah Pusat Tahun 2011-2013**

a. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Non Performing Loan*

**Tabel 22 Predikat Bank Berdasarkan Rasio NPL**

Nama Bank	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>					
	2011	Predikat	2012	Predikat	2013	Predikat
BRI	1,86%	Sangat Baik	1,51%	Sangat Baik	1,31%	Sangat Baik
Mandiri	0,53%	Sangat Baik	0,47%	Sangat Baik	0,59%	Sangat Baik
BTN	2,50%	Baik	3,70%	Baik	3,56%	Baik
BNI	1,57%	Sangat Baik	2,81%	Baik	2,16%	Baik

Sumber: Data diolah (2014)

Tabel 22 menunjukkan tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat selama tahun 2011 hingga 2013 berdasarkan rasio NPL. Hasil perhitungan NPL menunjukkan bahwa Bank BTN selama tiga tahun memiliki predikat NPL baik disebabkan karena hasil NPL Bank BTN di atas 2%, Bank BRI selama tahun 2011 hingga 2013 mendapat predikat NPL sangat baik. NPL tertinggi dimiliki oleh Bank Mandiri di tahun 2012 sebesar 0,47%, sedangkan NPL terendah dimiliki oleh Bank BTN dengan nilai NPL sebesar 3,7% di tahun 2012. Secara keseluruhan NPL empat bank milik pemerintah pusat menunjukkan predikat sangat baik dengan rata-rata NPL dibawah 5%. Bank pemerintah diharapkan lebih selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit untuk mengurangi risiko kredit macet.

b. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Loan to Deposit Ratio*

**Tabel 23 Predikat Bank Berdasarkan Rasio LDR**

Nama Bank	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>					
	2011	Predikat	2012	Predikat	2013	Predikat
BRI	79,82%	Baik	89,17%	Cukup Baik	102,19%	Kurang Baik
Mandiri	91,87%	Cukup Baik	93,87%	Cukup Baik	99,19%	Cukup Baik
BTN	175,05%	Tidak Baik	180,57%	Tidak Baik	194,24%	Tidak Baik
BNI	85,71%	Cukup Baik	78,02%	Baik	85,97%	Cukup Baik

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 23 jika dirata-rata LDR untuk empat bank milik pemerintah pusat yang dijadikan sampel penelitian adalah 112,97%, semakin tinggi rasio LDR menunjukkan bahwa semakin rendah likuiditas bank dikarenakan besarnya jumlah dana masyarakat yang dialokasikan ke kredit. Nilai LDR dengan predikat tidak baik dimiliki oleh Bank BTN di tahun 2013 sebesar 194,24%. LDR yang berpredikat baik hanya dimiliki oleh Bank BRI di tahun 2011 sebesar 79,82% dan Bank BNI di tahun 2012 sebesar 78,02%. Secara



keseluruhan LDR bank pada Tabel 23 menunjukkan bahwa empat bank milik pemerintah pusat di Indonesia berpredikat cukup baik.

c. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Return On Asset*

**Tabel 24 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA**

Nama Bank	Return On Asset (ROA)					
	2011	Predikat	2012	Predikat	2013	Predikat
BRI	3,26%	Sangat Sehat	3,39%	Sangat Sehat	3,18%	Sangat Sehat
Mandiri	2,26%	Sangat Sehat	2,56%	Sangat Sehat	2,45%	Sangat Sehat
BTN	1,71%	Sehat	1,67%	Sehat	1,63%	Sehat
BNI	2,00%	Sehat	2,16%	Sangat Sehat	1,61%	Sehat

Sumber: ICMD 2013 (Data diolah, 2014)

Tabel 24 menunjukkan bahwa rata-rata ROA untuk empat bank yang dijadikan sampel penelitian adalah 2,32%. Bank rata-rata berpredikat sangat sehat dinilai dengan menggunakan rasio ROA. Nilai ROA tertinggi dimiliki oleh Bank BRI sebesar 3,39% pada tahun 2012. ROA terendah dimiliki oleh Bank BNI sebesar 1,61% pada tahun 2013 yang terlihat pada tabel bahwa selama tiga tahun terakhir terhitung dari tahun 2011-2013 nilai ROA Bank BTN mengalami penurunan. Secara keseluruhan nilai ROA pada Tabel 24 menunjukkan bahwa empat bank milik pemerintah pusat di Indonesia telah menggunakan dana dengan efektif untuk menghasilkan laba.

d. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Net Interest Margin*

**Tabel 25 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NIM**

Nama Bank	NIM			Predikat
	2011	2012	2013	
Bank BRI	10,15%	11,20%	10,46%	Sangat Sehat
Bank Mandiri	5,29%	5,68%	5,83%	Sangat Sehat
Bank BTN	5,29%	4,87%	4,86%	Sangat Sehat
Bank BNI	5,36%	5,50%	6,36%	Sangat Sehat

Sumber: Data diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 25 menunjukkan bahwa empat bank milik pemerintah pusat memperoleh NIM di atas 3%. Secara Keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian mendapatkan predikat sangat sehat dinilai dari rasio NIM. Selama tahun 2011 hingga tahun 2013 Bank BRI memiliki NIM tertinggi dibandingkan bank milik pemerintah pusat lainnya. NIM tertinggi dimiliki oleh Bank BRI dengan nilai sebesar 11,20% pada tahun 2012, sedangkan NIM terendah dimiliki oleh Bank BTN dengan nilai sebesar 4,86% pada tahun 2013. Hasil NIM keseluruhan bank menunjukkan bahwa bank pemerintah pusat memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan pendapatan bunga untuk mengantisipasi potensi kerugian.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan faktor rentabilitas (*earning*) melalui dua rasio yakni, ROA dan NIM penting dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu bank. Tingkat rentabilitas yang baik akan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Penelitian ini menunjukkan matriks peringkat rentabilitas bank milik pemerintah pusat sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang dihasilkan oleh bank yakni:

**Tabel 26 Matriks Peringkat Rentabilitas Bank Milik Pemerintah Pusat**

Nama Bank	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013		
	ROA	NIM	Peringkat	ROA	NIM	Peringkat	ROA	NIM	Peringkat
Bank BRI	3,26%	10,15%	1	3,39%	11,20%	1	3,18%	10,46%	1
Bank Mandiri	2,26%	5,29%	1	2,56%	5,68%	1	2,45%	5,83%	1
Bank BTN	1,71%	5,29%	2	1,67%	4,87%	2	1,63%	4,86%	2
Bank BNI	2,00%	5,36%	2	2,16%	5,50%	1	1,61%	6,36%	2

Sumber: Data diolah (2014)

Tabel 26 menunjukkan matriks peringkat dari hasil faktor rentabilitas yang terdiri dari rasio ROA dan rasio NIM. Bank yang mendapatkan peringkat satu yakni Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI hanya pada tahun 2012, sedangkan Bank BTN dan Bank BNI tahun 2011 dan 2013 mendapatkan peringkat dua. Bank milik pemerintah pusat yang mendapatkan peringkat rentabilitas satu menunjukkan bahwa rentabilitas bank sangat memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan bank. Bank milik pemerintah pusat yang mendapatkan peringkat rentabilitas dua berarti bank tersebut memiliki rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan bank.

e. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Capital Adequency Ratio*

**Tabel 27 Matriks Peringkat dan Predikat Kesehatan CAR Bank**

Nama Bank	CAR			Predikat	Peringkat
	2011	2012	2013		
Bank BRI	14,96%	16,95%	16,99%	Sangat Sehat	1
Bank Mandiri	15,34%	15,48%	14,93%	Sangat Sehat	1
Bank BTN	15,03%	17,69%	15,62%	Sangat Sehat	1
Bank BNI	17,63%	16,53%	15,10%	Sangat Sehat	1

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode (Data diolah, 2014)

Berdasarkan Tabel 27 menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat pada tahun 2011-2013 memperoleh CAR diatas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yang berarti seluruh bank milik pemerintah pusat memperoleh CAR di atas 8%. Keempat bank milik pemerintah pusat secara keseluruhan mendapat predikat sangat sehat dinilai dengan menggunakan rasio CAR. Tabel 25 menunjukkan CAR tertinggi dimiliki oleh Bank BTN sebesar



17,69% pada tahun 2012, sedangkan CAR terendah dimiliki oleh Bank Mandiri dengan nilai sebesar 14,93% pada tahun 2013. Hasil CAR keseluruhan bank berada pada matriks peringkat satu yang berarti, bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha dari bank.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti terhadap empat bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penilaian faktor profil risiko yang menggunakan rasio NPL menunjukkan bahwa rata-rata NPL bank milik pemerintah pusat sebesar 1,88%. Secara keseluruhan rata-rata NPL empat bank milik pemerintah pusat di bawah 5% dikarenakan kredit bermasalah yang dimiliki bank masih diimbangi dengan total kredit. Rata-rata IRR milik pemerintah pusat adalah 107,01%, nilai IRR tertinggi sebesar 113,17% dimiliki oleh Bank BRI ditahun 2013, sedangkan IRR terendah dimiliki oleh Bank BNI sebesar 100,68% ditahun 2011 dikarenakan total *sensitivitas aset* yang lebih rendah dibandingkan tahun 2012 dan 2013. Hasil perhitungan rasio LDR dengan rata-rata 112,97% menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat berpredikat cukup baik, disebabkan masih tingginya dana pihak ketiga yang dialokasikan pada kredit yang diberikan bank.
2. Hasil penilaian faktor GCG yang didukung dengan hasil *self assessment* yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bank milik pemerintah pusat menunjukkan bahwa Bank BRI selama tahun 2011-2013 mendapatkan predikat penerapan GCG sangat baik, karena sesuai dengan sebelas aspek penilai GCG pada SE BI No. 15/15/DPNP. Bank Mandiri mendapat predikat

penerapan GCG sangat baik ditahun 2011 dan 2013, serta mendapat predikat penerapan GCG secara umum baik ditahun 2012 dikarenakan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bank BTN mengalami penurunan dalam penerapan GCG, ditahun 2011 dan 2012 Bank BTN mendapat predikat sangat baik, dan ditahun berikutnya mendapatkan predikat cukup baik dikarenakan penerapan fungsi audit intern bank yang menurun ditahun 2013 dan terlalu tingginya penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam. Bank BNI mendapat predikat penerapan GCG sangat baik karena telah memenuhi sebelas aspek penilaian GCG ditahun 2011 dan 2012, yang kemudian berpredikat baik ditahun 2013.

3. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor rentabilitas dengan rasio ROA menghasilkan rata-rata ROA bank milik pemerintah pusat sebesar 2,32%. ROA tertinggi dimiliki oleh Bank BRI sebesar 3,39% pada tahun 2012 dan ROA terendah dimiliki oleh Bank BNI sebesar 1,61% pada tahun 2013. Hasil penilaian dengan rasio NIM bank milik pemerintah pusat menunjukkan NIM tertinggi dimiliki oleh Bank BRI dengan nilai sebesar 11,20% ditahun 2012, sedangkan NIM terendah dimiliki oleh Bank BTN dengan nilai sebesar 4,86% di tahun 2013, dikarenakan adanya kenaikan beban bunga yang menyebabkan tidak seimbanginya peningkatan pendapatan bunga bersih dengan total aktiva produktif. Secara keseluruhan rata-rata rentabilitas bank milik pemerintah pusat sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan permodalan bank.

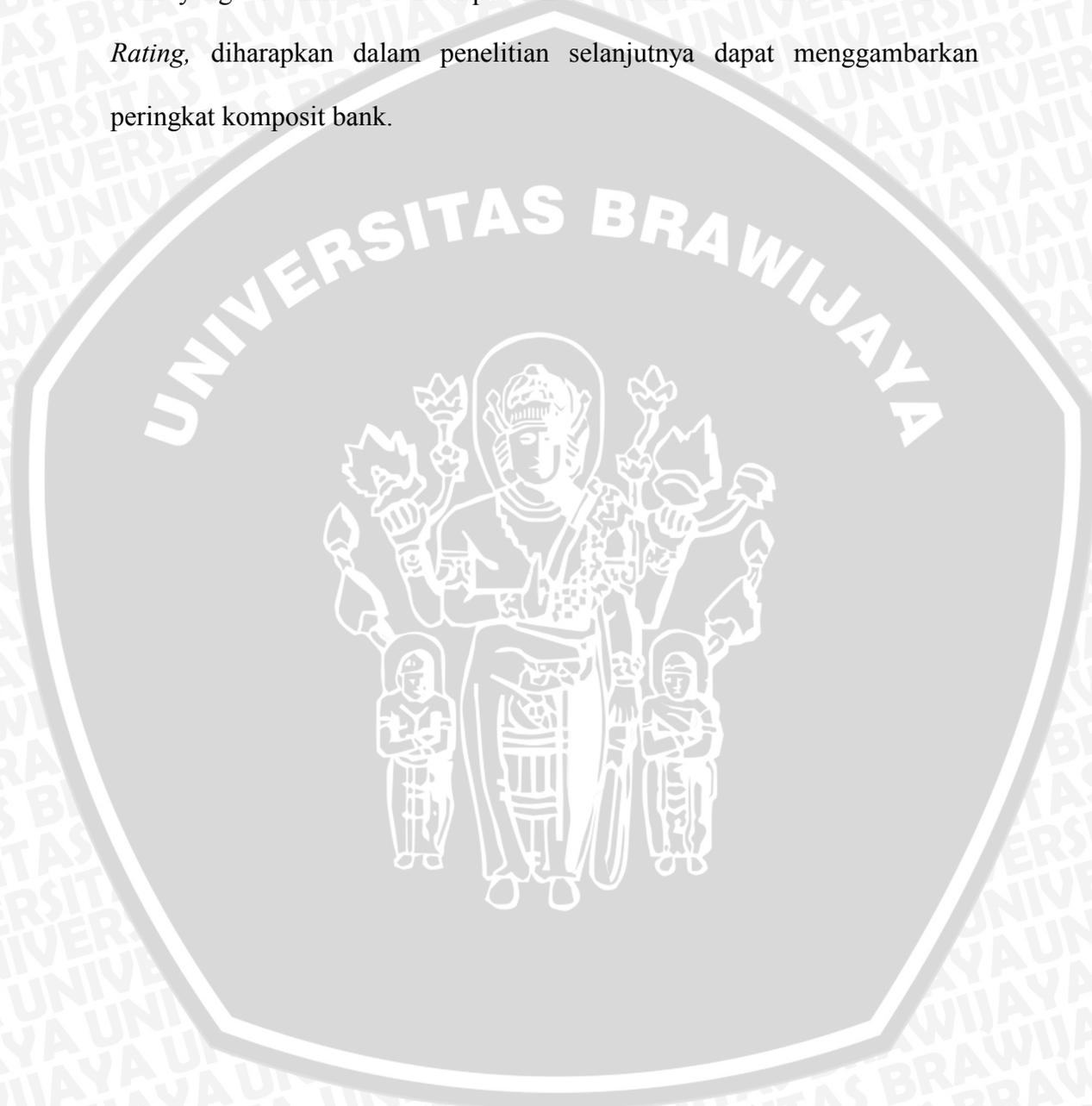
4. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor permodalan dengan menggunakan rasio CAR menunjukkan bahwa, secara keseluruhan CAR bank milik pemerintah pusat berada di atas 8% dan berpredikat sangat sehat. Nilai CAR tertinggi dimiliki oleh Bank BTN dengan nilai 17,69% di tahun 2012, sedangkan CAR terendah dimiliki oleh Bank Mandiri dengan nilai sebesar 14,93% di tahun 2013.

## B. Saran

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kondisi *Non Performing Loan* (NPL) untuk Bank BTN pada tahun 2012 sebesar 3,70% dan tahun 2013 sebesar 3,56%, serta rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di atas 120% dengan predikat tidak baik ditahun 2011-2013, sebaiknya Bank BTN mengurangi jumlah kredit macet, kurang lancar dan kredit yang diragukan serta menekan peningkatan dana pihak ketiga Bank BTN agar bank dapat terhindar dari tingginya kredit bermasalah, dan risiko terjadinya likuiditas.
2. Kondisi faktor GCG, rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*) bank milik pemerintah pusat yang telah mendapatkan predikat secara keseluruhan rata-rata baik, sebaiknya terus dipertahankan oleh manajemen bank agar kesehatan bank yang dinilai dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* tetap terjaga.
3. Penelitian ini hanya menilai tiga faktor risiko dari profil risiko (*risk profile*) yakni, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, selain itu analisis faktor

GCG hanya menggunakan hasil *self assessment* yang telah dilaksanakan bank, sehingga peneliti belum mampu mengkompositkan tingkat kesehatan bank yang diwakili oleh keempat faktor dalam metode *Risk Based Bank Rating*, diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggambarkan peringkat komposit bank.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Baharuddin. 2006. *Jalan Menuju Stability*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Abdullah, M. Faisal Drs. M.M. 2005. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*. Malang: UMM Press.
- Agung, Anak Agung Putu Dr. M.si. 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Arafat, Wilson. 2006. *Manajemen Perbankan Indonesia, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Bank Indonesia. 2014. "Peraturan", diakses pada tanggal 01 September 2014 dari <http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Default.aspx>.
- Bank Indonesia. 2014. "Publikasi Bank", diakses pada tanggal 01 September 2014 dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/default.aspx>.
- Baridwan, Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*, Edisi kedelapan. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Bastian, Indra & Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bursa Efek Indonesia. 2014. *International Capital Market Directory 2013*. Malang: Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya.
- Bursa Efek Indonesia. 2014. "Laporan Keuangan dan Tahunan", diakses pada tanggal 02 September 2014 dari <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Radakarya Offset.
- Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman Ir. Drs. M.M. 2004. *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional (1998-2003)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hasibuhan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ikhsan, Arfan. *Metode Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irmayanto, Juli., dkk. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Ismail Drs. MBA. AK. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.

Judiseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jumingan, S.E, M.M, M.Si. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.

\_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.

\_\_\_\_\_. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Pesada.

\_\_\_\_\_. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Krisna, Wijaya & Djoko. 2005. *Konsolidasi Perbankan Nasional: dari Rekapitulasi menuju Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*. Jakarta: Masyarakat Profesional Madani.

Latumaerissa, Julius R. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Martono & Agus Harjito. 2005. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.

Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan pasar Keuangan Konsep, Teori, dan Realita*. Jakarta: LP3ES Indonesia.

Retnadi, Djoko. 2006. *Memilih Bank yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Riyandi, Saugy. 2013. “Kondisi Ekonomi Saat ini Berbeda dengan Krisis 1998 dan 2008 ?”, diakses pada tanggal 14 Oktober 2014 dari <http://www.merdeka.com>.

Sadeli, Lili M. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Supriyanto, Eko B. 2006. *Budaya Kerja Perbankan, Jalan Lurus Menuju Integritas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.



**1. Perhitungan Kredit Bermasalah (dalam satuan jutaan rupiah)**

a. Bank BRI

<b>Kategori Kredit Bermasalah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tidak lancar	752.016	816.579	930.623
Diragukan	847.057	832.095	949.415
Macet	3.411.035	3.410.758	3.624.233
Jumlah kredit bermasalah	5.010.108	5.059.432	5.504.271

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BRI

b. Bank Mandiri

<b>Kategori Kredit Bermasalah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tidak lancar	531.437	717.077	840.749
Diragukan	434.358	359.037	489.344
Macet	625.872	681.433	1.343.114
Jumlah kredit bermasalah	1.591.667	1.757.547	2.673.207

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank Mandiri

c. Bank BTN

<b>Kategori Kredit Bermasalah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tidak lancar	177.545	562.195	368.471
Diragukan	196.103	515.296	440.012
Macet	1.189.699	1.900.688	2.728.591
Jumlah kredit bermasalah	1.563.347	2.978.179	3.537.074

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BTN

d. Bank BNI

<b>Kategori Kredit Bermasalah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tidak lancar	342.946	641.351	546.276



Kategori Kredit Bermasalah	2011	2012	2013
Diragukan	638.098	666.263	736.350
Macet	1.581.220	4.329.200	4.138.417
Jumlah kredit bermasalah	2.562.264	5.636.814	5.421.043

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BNI

## 2. Perhitungan *Rate Sensiteve Aset* dan *Rate Sensitive Liabilities* (dalam satuan jutaan rupiah)

### a. BANK BRI

Perhitungan RSA dan RSL	2011	2012	2013
Giro pada BI	33.040.418	42.524.126	40.718.495
Giro pada bank lain	5.533.164	4.841.975	9.435.120
Penempatan pada BI dan Bank Lain	73.596.356	66.242.928	36.306.883
Tagihan akseptasi	1.692.176	4.786.121	3.679.684
Wesel tagih	4.828.569	5.934.772	8.926.072
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.383.298	9.550.521	14.440.063
Kredit yang diberikan	269.454.726	336.081.042	419.144.730
Piutang pembiayaan konsumen	8.970.274	11.010.636	13.782.030
Investasi sewa pembiayaan bersih	164.689	196.742	222.851
Efek-efek untuk tujuan investasi	33.917.516	41.136.880	42.673.665
<b>Jumlah Aset (RSA)</b>	<b>440.581.186</b>	<b>522.305.743</b>	<b>589.329.593</b>
Simpanan dari nasabah	384.264.345	450.166.383	504.281.382
Simpanan dari bank lain	4.024.163	2.778.618	3.691.220
Utang akseptasi	1.692.176	4.786.121	3.679.684
Efek-efek utang yang diterbitkan	102.681	-	-
Pinjaman yang diterima	13.097.916	10.888.755	9.084.913
<b>Jumlah Liabilitas (RSL)</b>	<b>403.181.281</b>	<b>468.619.877</b>	<b>520.737.199</b>

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BRI

## b. Bank Mandiri

<b>Perhitungan RSA dan RSL</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Giro pada BI	36.152.674	38.272.155	43.904.419
Giro pada bank lain	9.816.828	9.645.504	14.036.484
Penempatan pada BI dan Bank Lain	51.393.062	48.238.225	45.113.834
Tagihan akseptasi	6.510.436	7.920.471	10.114.889
Wesel tagih	4.811.988	5.549.403	7.523.929
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	12.369.885	14.515.235	3.737.613
Kredit yang diberikan	298.988.258	370.570.356	450.634.798
Piutang pembiayaan konsumen	3.185.570	3.828.369	4.511.545
Investasi sewa pembiayaan bersih	38.758	327.680	612.154
Efek-efek untuk tujuan investasi	12.002.918	10.769.775	26.802.548
<b>Jumlah Aset (RSA)</b>	<b>435.270.377</b>	<b>509.637.173</b>	<b>606.992.213</b>
Simpanan dari nasabah	384.728.603	442.837.863	508.996.256
Simpanan dari bank lain	2.568.151	2.245.490	3.053.019
Utang akseptasi	6.551.103	7.957.512	10.178.370
Efek-efek utang yang diterbitkan	2.211.588	1.545.876	1.779.597
Pinjaman yang diterima	11.703.498	11.608.832	15.997.188
<b>Jumlah Liabilitas (RSL)</b>	<b>407.762.943</b>	<b>466.195.573</b>	<b>540.004.430</b>

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank Mandiri

## c. Bank BTN

<b>Perhitungan RSA dan RSL</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Giro pada BI	5.261.418	7.297.835	9.858.758
Giro pada bank lain	208.252	161.993	400.215
Penempatan pada BI dan Bank Lain	9.777.564	11.466.296	4.839.268
<b>Perhitungan RSA dan RSL</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Tagihan akseptasi	-	-	-
Wesel tagih	-	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-
Kredit yang diberikan	62.619.586	80.430.049	99.330.214
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-
Investasi sewa pembiayaan bersih	-	-	-
Efek-efek untuk tujuan investasi	733.953	1.013.796	4.201.682
<b>Jumlah Aset (RSA)</b>	<b>78.600.773</b>	<b>100.369.969</b>	<b>118.630.137</b>
Simpanan dari nasabah	61.970.015	80.667.983	96.207.622
Simpanan dari bank lain	792.970	706.703	275.257
Utang akseptasi	-	-	-
Efek-efek utang yang diterbitkan	5.438.382	7.136.776	8.836.711
Pinjaman yang diterima	5.695.307	6.737.260	7.073.032
<b>Jumlah Liabilitas (RSL)</b>	<b>73.896.674</b>	<b>95.248.722</b>	<b>112.392.622</b>

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BTN

## d. Bank BNI

<b>Perhitungan RSA dan RSL</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Giro pada BI	18.895.328	22.422.083	23.130.059
Giro pada bank lain	2.130.270	5.844.375	4.102.129
Penempatan pada BI dan Bank Lain	49.328.028	32.616.662	23.472.702
Tagihan akseptasi	7.822.309	10.077.154	11.478.853
Wesel tagih	1.853.144	2.839.499	3.416.879
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.289.462	-	1.896.556
<b>Perhitungan RSA dan RSL</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kredit yang diberikan	163.533.423	200.742.305	250.637.843
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-
Investasi sewa pembiayaan bersih	24.335	24.026	39.507
Efek-efek untuk tujuan investasi	7.627.768	9.800.970	11.965.698
<b>Jumlah Aset (RSA)</b>	<b>253.504.067</b>	<b>284.367.074</b>	<b>330.140.226</b>
Simpanan dari nasabah	231.295.740	257.660.841	291.890.195
Simpanan dari bank lain	7.018.529	3.245.243	3.184.983
Utang akseptasi	4.479.042	4.624.501	6.198.972
Efek-efek utang yang diterbitkan	264.622	4.768.810	6.036.533
Pinjaman yang diterima	8.725.796	8.749.762	18.950.523
<b>Jumlah Liabilitas (RSL)</b>	<b>251.783.729</b>	<b>279.049.157</b>	<b>326.261.206</b>

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BNI

### 3. Perhitungan Dana Pihak Ketiga (dalam satuan jutaan rupiah)

#### a. Bank BRI

Dana Pihak Ketiga	2011	2012	2013
Giro	57.446.282	61.173.929	57.222.180
Tabungan	152.613.359	182.168.251	210.048.476
Deposito	127.499.566	133.556.580	142.909.210
Jumlah Dana Pihak Ketiga	337.559.207	376.898.760	410.179.866

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BRI

#### b. Bank Mandiri

Dana Pihak Ketiga	2011	2012	2013
Giro	65.781.635	88.353.574	96.920.499
Tabungan	149.056.352	183.040.905	215.815.405
Deposito	110.592.026	123.355.461	141.574.497
Jumlah Dana Pihak Ketiga	325.430.013	394.749.940	454.310.401

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank Mandiri

#### c. Bank BTN

Dana Pihak Ketiga	2011	2012	2013
Giro	4.058.125	5.708.788	6.350.752
Tabungan	14.740.375	21.474.509	24.170.000
Deposito	16.972.955	17.358.383	20.615.955
Jumlah Dana Pihak Ketiga	35.771.455	44.541.680	51.136.707

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BTN

#### d. Bank BNI

Dana Pihak Ketiga	2011	2012	2013
Giro	47.454.849	73.297.354	88.079.299
Tabungan	81.22.349	99.990.631	111.735.054
Deposito	61.666.327	84.023.816	91.741.445
Jumlah Dana Pihak Ketiga	190.787.503	257.311.801	291.555.798

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Periode 2011-2013 Bank BNI

**4. Perhitungan Pendapatan Bunga Bersih (dalam satuan jutaan rupiah)**

Nama Bank	Tahun	Pendapatan Bunga (1)	Beban Bunga (2)	Pendapatan Bunga Bersih (1) – (2)
Bank BRI	2011	48.164.348	13.737.272	34.427.076
	2012	49.610.421	13.126.655	36.483.766
	2013	59.461.084	15.354.813	44.106.271
Bank Mandiri	2011	37.730.019	15.954.037	21.775.982
	2012	42.550.442	15.019.850	27.530.592
	2013	50.208.842	17.432.216	32.776.626
Bank BTN	2011	7.334.318	3.759.509	3.574.809
	2012	8.481.318	4.080.603	4.400.715
	2013	10.392.786	5.115.187	5.277.599
Bank BNI	2011	19.564.460	7.020.320	12.544.140
	2012	20.962.244	6.364.392	14.597.852
	2013	26.450.708	7.392.427	19.058.281

Sumber: *International Capital Market Directory* 2013

**5. Perhitungan Aktiva Produktif (dalam satuan jutaan rupiah)**

a. Bank BRI

Pos-Pos Aktiva	2010	2011	2012	2013
Penempatan Pada Bank Lain	83.272.140	3.871.476	3.871.476	36.306.883
Surat Berharga	36.142.852	52.296.840	52.296.840	61.625.147
Kredit	232.976.674	269.454.726	269.454.726	419.144.730
Penyertaan	135.776	164.689	164.689	222.851
Total Aktiva Produktif	352.527.442	325.787.731	325.787.731	517.299.611
Rata-rata Total Aktiva Produktif (awal tahun+akhir tahun)/2		339.157.587	325.787.731	421.543.671

Sumber: *International Capital Market Directory* 2013 Bank BRI

b. Bank Mandiri

Pos-Pos Aktiva	2010	2011	2012	2013
Penempatan Pada Bank Lain	28.914.035	51.393.062	48.238.225	45.113.834
Surat Berharga	105.340.263	90.462.367	89.705.531	109.029.976
Kredit	232.545.259	298.988.258	370.570.356	450.634.798
Penyertaan	7.218.361	9.089.549	11.366.225	-



<b>Pos-Pos Aktiva</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Total Aktiva Produktif	374.017.918	449.933.236	519.880.337	604.778.608
Rata-rata Total Aktiva Produktif (awal tahun+akhir tahun)/2		411.975.577	484.906.787	562.329.473

Sumber: *International Capital Market Directory 2013* Bank Mandiri

c. Bank BTN

<b>Pos-Pos Aktiva</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Penempatan Pada Bank Lain	372.421	9.777.564	11.466.296	4.839.268
Surat Berharga	3.806.852	7.840.767	8.482.726	12.586.642
Kredit	50.668.815	62.619.586	80.430.049	99.330.214
Penyertaan	-	-	-	-
Total Aktiva Produktif	54.848.088	80.237.917	100.379.071	116.756.124
Rata-rata Total Aktiva Produktif (awal tahun+akhir tahun)/2		67.543.003	90.308.494	108.567.598

Sumber: *International Capital Market Directory 2013* Bank BTN

d. Bank BNI

<b>Pos-Pos Aktiva</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Penempatan Pada Bank Lain	38.385.316	49.328.028	32.616.662	23.472.702
Surat Berharga	45.737.618	46.498.258	51.217.974	55.294.210
Kredit	129.399.567	158.223.131	193.050.166	243.757.807
Penyertaan	24.398	41.669	44.097	61.501
Total Aktiva Produktif	213.546.899	254.091.086	276.928.899	322.586.220
Rata-rata Total Aktiva Produktif (awal tahun+akhir tahun)/2		233.818.993	265.509.993	299.757.560

Sumber: *International Capital Market Directory 2013* Bank BNI